



**PARTAI KOMUNIS CINA (PKC) DI BAWAH REZIM  
DENG XIAOPING PADA 1976-1989**

**SKRIPSI**

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Jurusan Sejarah (S1) dan mencapai gelas Sarjana Sastra

Oleh

**FIFI ANGGRAENI**

**NIM. 110110301042**

**JURUSAN ILMU SEJARAH  
FAKULTAS SASTRA UNIVERSITAS JEMBER**

**2015**

**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fifi Anggraeni

NIM : 110110301042

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Partai Komunis Cina (PKC) Di Bawah Rezim Deng Xiaoping Pada 1976-1989“ adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember 30 Oktober 2015

Yang menyatakan,

Fifi Anggraeni

NIM 110110301042

**PERSETUJUAN**

Skripsi ini telah disetujui untuk diujikan oleh:

Dosen Pembimbing,

Drs. Nurhadi Sasmita, M. Hum

NIP. 196012151989021001



**PENGESAHAN**

Diterima dan disahkan oleh

Panitia Penguji Skripsi Program Strata 1 Jurusan Sejarah Fakultas Sastra  
Universitas Jember

Pada hari : Jum'at

Tanggal : 30 Oktober 2015

**Ketua,**

Drs. Nurhadi Sasmita M. Hum

NIP.196012151989021001

**Anggota 1,**

**Anggota 2,**

Drs. I.G. Krisnadi M. Hum

NIP. 19612151989021001

Mrr. Ratna Endang W. SS., MA

NIP. 196907271997022001

**Mengesahkan**

**Dekan Fakultas Sastra Universitas Jember**

Dr. Hairus Salikin, M. Ed.

NIP. 196310151989021001

## PERSEMBAHAN

Karya ini sebagai persembahan untuk :

1. Orang tua, Paeman dan Purwanti, sebagai tanda cinta kasih dan bakti untuk dukungan, kasih sayang dan do'a sepanjang masa.
2. Ita Purwika kakak tercinta dan M. Agung F.E. keponakan tersayang yang selalu memberikan semangat dan hiburan untuk penulis menyelesaikan studinya.
5. Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Komisariat Sastra Cabang Jember.
6. Dunia Intelektual, semoga karya penulis dapat menambah khasanah kajian akademis.
7. Almamater Universitas Jember.

**MOTTO**

“Kita memerlukan kiri yang menyadari bahwa menjadi radikal tidaklah berarti meneriakkan slogan yang paling militan atau melakukan tindakan yang paling ekstrem, yang hanya sedikit orang yang setuju dan yang membuat takut mayoritas, tetapi radikal adalah mampu menciptakan ruang-ruang untuk bertemunya dan bergabungnya dalam suatu perjuangan sektor-sektor terluas yang dimungkinkan” *Martha Harnecker*.

“Tidak peduli kucing itu hitam atau putih, selama ia dapat menangkap tikus, ia adalah kucing-kucing yang baik.” *Deng Xiaoping*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini mengkaji tentang kepemimpinan Deng Xiaoping dalam PKC dengan judul *Partai Komunis Cina (PKC) Di Bawah Rezim Deng Xiaoping Pada 1976-1989*. Kepemimpinan Deng Xiaoping selama periode 1977-1989 terlihat dalam kondisi partai dan pemerintahan selama masa tersebut, yang digambarkan melalui perkembangan perekonomian negara melalui Reformasi Ekonomi dan adanya pergulatan politik internal dalam PKC pada kepemimpinan Deng yakni antar dua faksi yang ikut berperan dalam pelaksanaan Reformasi Ekonomi RRC. Perkembangan ekonomi yang dialami RRC selama dasawarsa 1980an menggambarkan arah pembangunan sosialis yang mengarah pada ekonomi kapitalistik, dan memicu kemunculan gerakan prodemokrasi yang menuntut keterbukaan politik.

Skripsi adalah hasil tugas penyusunan karya ilmiah mandiri oleh mahasiswa pada akhir masa studinya. Setelah melakukan beberapa kali diskusi dengan para dosen dan rekan mahasiswa, serta melakukan eksplorasi berbagai sumber, akhirnya penulis menetapkan PKC rezim Deng Xiaoping sebagai judul. Kerja keras dalam penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat mendapat gelar sarjana strata satu (S1) pada Jurusan Ilmu Sejarah Fakultas Sastra Universitas Jember.

Penyusunan sampai terselesaikannya penulisan karya ilmiah ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Dr. Hairus Salikin, M. Ed., Dekan Fakultas Sastra Universitas Jember,
2. Drs. Nawiyanto, MA. Ph. D., Ketua Jurusan Ilmu Sejarah,
3. Drs. Nurhadi Sasmita M. Hum., Dosen Pembimbing yang telah mengarahkan secara cermat dan meluangkan waktu, pikiran serta perhatian dalam penulisan skripsi ini,

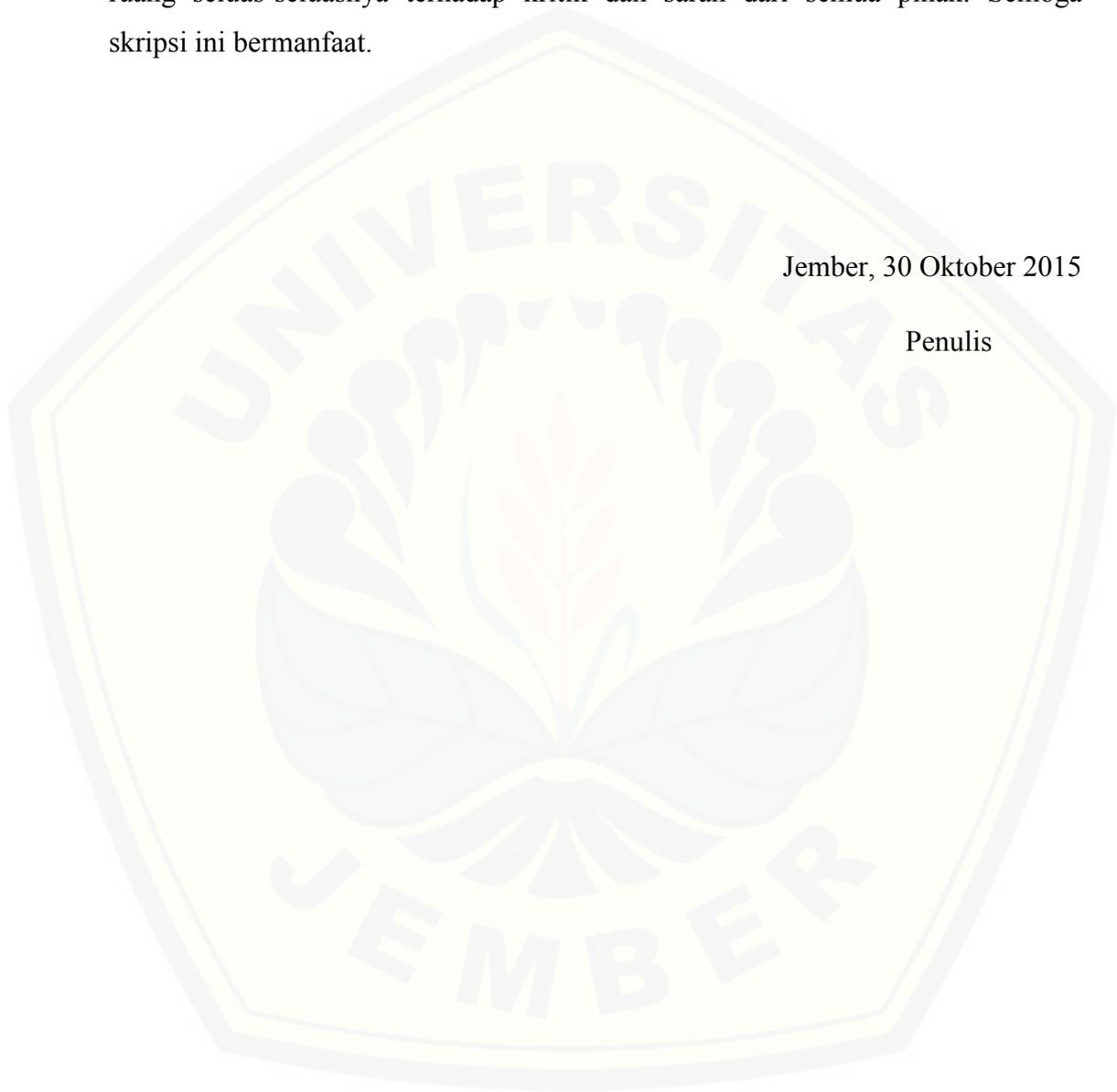
4. Drs. IG Krisnadi, M. Hum., dan Mrr. Ratna Endang W, SS., MA yang telah memberikan kepercayaan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini,
5. Almarhum Drs. Hendro Sumartono yang merupakan bapak, kawan dan dosen yang telah memberi banyak pelajaran kepada penulis,
6. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Ilmu Sejarah Fakultas Sastra, yang telah memberikan bimbingan dan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menempuh studi di Fakultas Sastra Universitas Jember.
7. Seluruh karyawan dan staf Fakultas Sastra Universitas Jember, atas segala bantuan, informasi dan pelayanan selama ini,
8. Perpustakaan Universitas Jember dan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Perpustakaan CSIS dan Perpustakaan Freedom Jakarta yang telah membantu penulis dalam memperoleh sumber, serta instansi-instansi lain,
9. Kedua orang tua dan seluruh keluarga yang selalu memberikan dukungan dan do'a sepanjang masa kepada penulis,
10. Kader GMNI Komisariat Sastra, kawan berjuang dan berfikir yang menyenangkan,
11. Inka Sumarlis L.S.G., kawan yang selalu berbagi ilmu dan cerita selama hampir 10 tahun.
12. Binti Ita'ul Khasanah, Wuri Windyati, Rohmatul Laila, Rodiatam Mardiyah, Kristi Antika, Siti Hasanah, Siti Yuliatin atas kebersamaannya selama ini,
13. Kawan-kawan Jurusan Ilmu Sejarah angkatan 2011 yang banyak memberikan cerita, senda gurau, baik waktu kuliah ataupun di luar kuliah dalam semua perjalanan yang pernah kita lalui,
14. Kawan-kawan yang baru saya kenal semenjak berada di Jakarta, terima kasih atas bantuan dan ilmu yang dibagikan,
15. Semua pihak yang tidak penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan dorongan, semangat, kesempatan, berdiskusi dan

menambahkan referensi buku sangat membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Untuk kesempurnaan karya ilmiah ini penulis berharap dan membuka ruang seluas-seluasnya terhadap kritik dan saran dari semua pihak. Semoga skripsi ini bermanfaat.

Jember, 30 Oktober 2015

Penulis



**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN JUDUL</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISTILAH</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b>	<b>xix</b>
<b>ABSTRAK</b>	<b>xxi</b>
<b>ABSTRACT</b>	<b>xxii</b>
<b>RINGKASAN</b>	<b>xxiii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
<b>1.1 Latar Belakang</b>	<b>1</b>
<b>1.2 Rumusan Masalah</b>	<b>11</b>
<b>1.3 Tujuan dan Manfaat</b>	<b>11</b>
1.3.1 Tujuan	11
1.3.2 Manfaat	12
<b>1.4 Ruang Lingkup</b>	<b>12</b>
<b>1.5 Tinjauan Pustaka</b>	<b>13</b>
<b>1.6 Pendekatan dan Kerangka Teori</b>	<b>17</b>
<b>1.7 Metode Penelitian</b>	<b>19</b>
<b>1.8 Sistematika Penulisan</b>	<b>24</b>
<b>BAB 2 PKC Rezim Mao Zedong</b>	<b>26</b>
<b>2.1 Sejarah Singkat PKC</b>	<b>26</b>

<b>2.2 RRC dan PKC di bawah Mao Zedong</b>	<b>32</b>
2.2.1 Mao Zedong Sebagai Pemimpin RRC dan PKC	36
2.2.2 Pembangunan Sosialis Karakteristik Cina	38
2.2.3 Politik Luar Negeri RRC 1949-1976	41
2.2.4 Kebijakan Politik Dalam Negeri RRC 1956-1960	44
<b>2.3 Revolusi Kebudayaan Rezim Mao Zedong</b>	<b>53</b>
2.3.1 Jalannya Revolusi Kebudayaan	56
2.3.2 Implikasi Terhadap Kondisi Politik dan Ekonomi RRC	72
<b>BAB 3 PKC DALAM REFORMASI EKONOMI RRC REZIM DENG XIAOPING</b>	<b>77</b>
<b>3.1 Kepemimpinan Deng Xiaoping dalam PKC</b>	<b>77</b>
3.1.1 Reformasi Ekonomi RRC 1978	81
3.1.2 Kondisi Perekonomian RRC Pasca Reformasi Ekonomi 1978	89
3.1.3 Peranan Kaum Pragmatis dalam Reformasi Ekonomi	99
<b>3.2 Deng Xiaoping Berkuasa dalam Pemerintahan</b>	<b>102</b>
<b>3.3 Pergulatan Politik Internal PKC Rezim Deng Xiaoping</b>	<b>109</b>
3.3.1 Dinamika Pergulatan Politik Internal PKC	120
3.3.1.1 Kebijakan dalam Kepemimpinan Deng Xiaoping	124
3.3.1.2 Dominasi Pengaruh dalam Internal PKC	135
3.3.2 Pengaruh Pergulatan Politik Internal PKC Terhadap Partai	142
<b>3.4 Pengaruh Kebijakan Ekonomi Sosialis Era Deng Xiaoping</b>	<b>145</b>
<b>BAB 4 KESIMPULAN</b>	<b>152</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>158</b>
<b>LAMPIRAN</b>	<b>167</b>

**DAFTAR SINGKATAN**

<i>AS</i>	: Amerika Serikat
<i>GEN</i>	: General Education
<i>IMF</i>	: International Moneter Federation
Komintern	: Komunis Internasional
KRN	: Kongres Rakyat Nasional
PKC	: Partai Komunis Cina
PKUS	: Partai Komunis Uni Soviet
<i>PLA</i>	: People's Liberation Army
PM	: Perdana Menteri
Repelita	: Rencana Pembangunan Lima Tahun
RRC	: Republik Rakyat Cina
SDM	: Sumber Daya Manusia
Sekjen	: Sekretaris Jenderal
<i>SEZ</i>	: Special Economic Zone
<i>STS</i>	: Secondary Technical School
<i>SVT</i>	: Secondary Vocational School
<i>SWT</i>	: Secondary Workers School
TPR	: Tentara Pembebasan Rakyat
<i>TT</i>	: Secondary Teacher Training School
US	: Uni Soviet
<i>VT</i>	: Vocational School
<i>WTO</i>	: World Trade Organization

### DAFTAR ISTILAH

- Anti-imperialisme : Bentuk tidak mendukung pada sistem politik yg bertujuan menjajah negara lain untuk mendapatkan kekuasaan dan keuntungan yg lebih besar
- Borjuasi Nasional : Negara-negara yang termasuk dalam negara berkembang.
- Desentralisasi : Sistem pemerintahan yang memberikan kekuasaan kepada pemerintah daerah untuk melakukan otonomi khusus.
- Diktatur Proletariat : Mengacu pada negara sosialis, dimana kaum proletar memegang kekuasaan politik.
- Gang Four* : Dikenal juga dengan Kelompok Empat merupakan kelompok radikal pembela Mao Zedong atas kebijakan ekstremnya untuk mencanangkan Revolusi Kebudayaan pada 1960-1970an
- Great Helmsman : Great Helmsman berarti Nahkoda Agung, sebutan Mao bagi dirinya sendiri RRC atas gebrakan baru dan tindakan revolusioner sebagai penerapan kekuasaannya.
- Gerakan Seratus Bunga : Propaganda politik yang dilakukan oleh Mao dalam rangka memperoleh dukungan para intelektual untuk ikut bergabung dalam melancarkan Lompatan jauh ke Depan.
- Harian Rakyat : Koran resmi milik Partai Komunis Cina yang menyuarakan pandangan dan kepentingan partai.
- Industrialisasi : Usaha menggalakkan industri dalam suatu negara.
- Kapitalisme : Sistem dan paham ekonomi (perekonomian) yg modalnya bersumber pd modal pribadi atau modal perusahaan swasta dng ciri persaingan dl pasaran bebas

- Kolektivisasi : Usaha untuk menjadikan kegiatan bersama atau kepemilikan bersama dalam satu wadah.
- Kolonialisme : Paham mengenai penguasaan oleh suatu negara atas daerah atau bangsa lain dengan maksud untuk memperluas negara tersebut.
- Komune Rakyat : Sebuah organ terbesar di RRC yang terdiri dari komune-komune yang menghimpun semua fungsi pemerintahan lokal yang meliputi bidang ekonomi baik dalam produksi, distribusi maupun konsumsi rakyat, dan kesehatan, serta pendidikan dalam ketahanan rakyat.
- Komunisme : Paham atau ideologi yang menganut ajaran Karl Marx dan Fredrich Engels, yang hendak menghapuskan hak milik perseorangan dan menggantikannya dengan hak milik bersama yang dikontrol oleh Partai Komunis yang dipimpin oleh diktator proletariat.
- Komintern : Organisasi komunis revolusioner internasional yang merupakan perhimpunan partai-partai komunis dari berbagai negara yang berfungsi antara 1919-1943.
- Kontrarevolusioner : Orang-orang yang dianggap bertentangan dengan arah revolusi.
- Koumintang : Partai politik tertua dalam sejarah modern Cina yang didirikan oleh Dr. Sun Yat Sen dan berasaskan nasionalis dan dikenal juga dengan nama Partai Nasionalis Tiongkok.
- Landreform* : Kebijakan yang bertujuan untuk merombak dan mengubah sistem agraria yang ada dengan maksud untuk meningkatkan distribusi pendapatan pertanian dan mendorong pembangunan desa.

- Leninisme : Paham yang dikembangkan dan dinamai berdasarkan nama pemimpin Revolusi Rusia, Vladimir Lenin (terdiri dari teori politik dan ekonomi sosialis yang dikembangkan dari Marxisme dan penafsiran pribadi Lenin terhadap teori Marxis sesuai dengan kondisi sosial masyarakat agraris Rusia (1721-1917).
- Long March* : Sebuah perjalanan panjang yang dilakukan Mao Zedong dan tentara komunis untuk menghindari serangan kaum nasionalis dan menjadi perjalanan menyebarkan ajaran komunis.
- Lompatan Jauh ke Depan : Rancangan sosial dan ekonomi yang diperkenalkan oleh pemimpin PKC, Mao Zedong, yakni mengupayakan pertumbuhan produksi pertanian dan industri di RRC secara radikal dan membawa Cina kepada titik menuju cita-cita masyarakat komunis yang makmur dan mandiri.
- Maoisme : Paham mengenai gagasan Mao berdasarkan pemikir-pemikir sosialis seperti Karl Marx, Engel, Lenin, dan Stalin yang disesuaikan dengan kondisi objektif RRC serta pengalaman-pengalaman perjuangan Mao.
- Marxisme : Sebuah paham yang berdasar pada pandangan-pandangan Karl Marx (meliputi teori yang berkaitan dengan sistem ekonomi, sosial dan politik) melalui gagasannya yang meliputi niali lebih, historis materialisme dan dialektika materialisme.
- Neokolonialisme : Kolonialisme atau penjajahan dalam bentuk baru seperti dalam bidang ekonomi atau budaya.
- Pengawal Merah : Perkumpulan pelajar komunis radikal yang menjadi pengikut setia Mao Zedong yang berusaha merevolusionerkan rakyat RRC melalui cara-cara

- kekerasan yang dibentuk pada Revolusi Kebudayaan.
- Politbiro : Organisasi eksekutif untuk beberapa partai politik terutama partai komunis.
- Revisionis : Orang-orang yang melakukan perubahan dalam suatu ajaran atau paham.
- Revolusi Kebudayaan : Propaganda politik di RRC yang dicanangkan ketua PKC, Mao Zedong pada 1966 untuk menyingkirkan pesaing dan lawan politik Mao dan merevolusionerkan masyarakat.
- Renmin Ribao* : Dikenal dengan nama lain sebagai *Harian Rakyat* merupakan koran resmi milik Partai Komunis Cina yang menyuarakan pandangan dan kepentingan partai.
- Semi Diktator : Istilah yang digunakan untuk menunjukkan sistem pemerintahan yang tidak sepenuhnya diktator.
- Sentralisasi : Sistem pemerintahan yang memusatkan kekuasaan pada pemerintahan pusat.
- Sosialisme : Ajaran atau paham yang memiliki cita-cita untuk memperbaiki atau mengurangi kesenjangan dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakatnya serta mewujudkan kesetaraan dalam struktur masyarakatnya.
- Tentara Merah : Atau juga dikenal dengan TPR (Tentara Pembebasan Rakyat) yang merupakan kekuatan militer terbesar RRC yang memiliki kekuasaan politik.

**DAFTAR TABEL**

<b>Nomor</b>	<b>Judul Tabel</b>	<b>Halaman</b>
Tabel 2.1	Karir Politik Mao Zedong 1949-1976	35
Tabel 2.2	Produksi Industri RRC Pada 1952-1957	48
Tabel 2.3	Perbandingan Sistem Ekonomi Sosialis (Terpusat) dan Sistem Ekonomi Kapitalis (Liberal)	60
Tabel 3.1	Pendaftaran Sekolah Menengah Atas di Cina pada 1980-1993	83
Tabel 3.2	Bidang Mata Pelajaran dalam Program Pengiriman Mahasiswa Cina di AS pada 1978-1979	86
Tabel 3.3	Indeks Harga Nilai Bruto Produksi Menurut Tingkat Dan Tipe Kepemilikan pada 1978-1990	91
Tabel 3.4	Pertumbuhan Produksi Pertanian pada 1980an.	92
Tabel 3.5	Pertumbuhan Ekonomi RRC pada 1957-1979	94
Tabel 3.6	Laporan Indeks Harga Nilai Bruto Hasil Industri dari 40 Cabang Industri pada 1988	96
Tabel 3.7	Profil Wilayah SEZ's RRC	130
Tabel 3.8	Pertumbuhan Ekonomi Shenzhen pada 1979-1994	131
Tabel 3.9	Investasi Asing di Shenzhen Menurut Asal Negara Pada 1986-1993	132
Tabel 3.10	Daftar Negara, Bidang/Produksi dan Jumlah Investasi Asing di RRC pada 1980an dan 199an	133
Tabel 3.11	Kepemimpinan PKC pada 1977-1987	140
Tabel 3.12	Pertumbuhan Populasi dan Migrasi Sementara di Shenzhen Pada 1979-1994	150

**DAFTAR GAMBAR**

<b>Nomor Gambar</b>	<b>Judul Gambar</b>	<b>Halaman</b>
Gambar 2.1	Tungku Pembakaran/Peleburan	51
Gambar 2.2	Petani yang bekerja dalam Komune Rakyat	51
Gambar 2.3	Petani bekerja dalam pembangunan bendungan air	52
Gambar 2.4	Anggota komune brigade produksi	52
Gambar 2.5	Diagram Komune Rakyat	52
Gambar 2.6	<i>Pengwal Merah</i> membuat poster propaganda	68
Gambar 2.7	<i>Pengwal Merah</i> berkumpul di lapangan Tiananmen	68
Gambar 2.8	“Pejalan Kapitalis 1 Cina dihukum	70
Gambar 2.9	“Pejalan Kapitalis 2 Cina dihukum	71
Gambar 2.10	Tuan tanah dieksekusi	71
Gambar 2.11	Pembakaran patung tradisional Cina	72
Gambar 3.1	Kegiatan dalam <i>Vacational School 1</i>	84
Gambar 3.2	Kegiatan dalam <i>Vacational School 2</i>	84
Gambar 3.3	Kegiatan dalam <i>Vacational School 3</i>	85
Gambar 3.4	Produksi Industri Tembaga	97
Gambar 3.5	Produksi Industri Tenaga Uap Panas dan Batu Bara	98
Gambar 3.6	Produksi Industri Kilang Minyak	98
Gambar 3.7	Struktur Pemerintahan RRC	105
Gambar 3.8	Peta wilayah SEZ’s RRC	129
Gambar 3.9	Peta wilayah SEZ Zhenzhen	130
Gambar 3.10	Struktur organisasi PKC	137

**DAFTAR LAMPIRAN**

<b>Nomor Lampiran</b>	<b>Judul Lampiran</b>	<b>Halaman</b>
Lampiran A	Surat Ijin Penelitian Perpustakaan FIB UI	167
Lampiran B	Surat Ijin Penelitian Freedom Jakarta	168
Lampiran C	Surat Ijin Penelitian CSIS Jakarta	169
Lampiran D	Surat Ijin Penelitian Departemen Luar Negeri RI	170
Lampiran E	Surat Ijin Penelitian Perpustakaan Nasional RI	171
Lampiran F	Peta RRC	172
Lampiran G	Foto-foto Peristiwa Revolusi Kebudayaan	173
Lampiran H	Foto-foto Peristiwa Tiananmen 1989	175
Lampiran I	Tokoh Politik Era Mao Zedong	179
Lampiran J	Tokoh Politik Era Deng Xiaoping	180
Lampiran K	Kompas "Industrialisasi RRC"	181
Lampiran L	Kompas "Fenomena Perkembangan Ekonomi RRC	182
Lampiran M	Kompas "Deng Ikut Bertanggungjawab atas Kesalahan Reformasi	183
Lampiran N	Kompas "Reformasi Politik di RRC Timbulkan Krisis Ekonomi	185
Lampiran O	Kompas "Cina dan Reformasi Demokrasi"	186
Lampiran P	Kompas "Puluhan Ribu Mahasiswa Tuntut Pemerintah Mundur	187

Lampiran Q	Kompas “Polisi Bubarkan Aksi Duduk Mahasiswa Cina”	188
Lampiran R	Kompas “Aksi Unjuk Rasa di Cina Meluas ke Luar Beijing”	189



## ABSTRAK

Tulisan ini dilatarbelakangi oleh pemahaman tentang kegagalan pemerintahan Mao Zedong mengenai penerapan pembangunan sosialis Republik Rakyat Cina (RRC). Kepemimpinan Mao yang mengutamakan kekuatan politik justru menimbulkan banyak kerugian bagi RRC karena kelaparan bahkan pembantaian yang dilakukan selama kampanye-kampanye politik yang dilakukan pada rezim Mao Zedong, seperti Gerakan Seratus Bunga, Lompatan Jauh ke Depan dan Revolusi Kebudayaan. Kegagalan tersebut menjadi salah satu landasan utama Reformasi Ekonomi dilaksanakan pada era Deng Xiaoping. Selama pelaksanaan Reformasi Ekonomi, RRC banyak mengalami perombakan baik dalam hal ekonomi maupun politik. Reformasi Ekonomi RRC di bawah kepemimpinan Deng Xiaoping memberlakukan ekonomi kapitalistik di bawah panji pembangunan sosialis. Mekanisme ekonomi pasar, politik pintu terbuka, dan Empat Modernisasi (Modernisasi Pertanian, Modernisasi Industri, Modernisasi Pendidikan dan Teknologi, Modernisasi Pertahanan Nasional) merupakan bagian dari kebijakan dalam kepemimpinan Deng. Selama pelaksanaan Reformasi Ekonomi RRC mencapai pertumbuhan ekonomi yang mengesankan, RRC bahkan menyandang status negara yang mencapai pertumbuhan ekonomi tertinggi di dunia pada 1981 dengan Gross National Product (GNP) mencapai rata-rata 9.98% dalam setahun. Selain pencapaian dalam meningkatkan perekonomian negara, reformasi yang terjadi dilakukan RRC juga berdampak terhadap kondisi internal Partai Komunis Cina (PKC) dalam kepemimpinan Deng Xiaoping. Perbedaan pemikiran dalam partai memicu adanya faksionalisme pada koalisi pemerintahan Deng menjadi dua kelompok yakni kelompok reformis dan kelompok konservatif dan militer.

Kata Kunci: Mao Zedong, Deng Xiaoping, Reformasi Ekonomi, Faksionalisme.

### ABSTRACT

This paper is motivated by comprehension about the failure of Mao Zedong's rule on the application of socialist construction of Populace Republic China (PRC). Mao's leadership that prioritizes political forces actually causes much harm to the PRC, starvation even massacres committed during the political campaign carried out in Mao's regime, as the Hundred Flowers Movement, the Great Leap Forward and the Cultural Revolution. Such failures become one of the cornerstones of Economic Reforms carried out in the era of Deng Xiaoping. During the implementation of the Economic Reforms, a remodeled PRC both in economic and in political terms. The economic reforms in the PRC under the leadership of Deng Xiaoping impose capitalist economy under the banner of socialist construction. The mechanisms of market economy, the open policy, and the Four Modernizations (Agriculture modernization, Modernization of Industry, Education and Technology Modernization, National Defense Modernization) are part of Deng's policies in government. During the implementation of the Economic Reforms PRC impressed economic growth, China and even the status of countries that achieve the highest economic growth in the world in 1981 with the National Gross Product (GNP) reached an average of 9.98% in a year. In addition to achievements in improving the country's economy, reforms happen to PRC also have an impact on the internal condition of the China Communis Party (CCP) in the leadership of Deng Xiaoping. Differences of thought in the party are triggering the factionalism in the coalition government of Deng into two groups, namely the reformists and the conservatives and the military.

Key Words: Mao Zedong, Deng Xiaoping, Economic Reforms, Factionalism.

## RINGKASAN

### Partai Komunis Cina (PKC) Di Bawah Rezim Deng Xiaoping

#### Pada 1976-1989

Fifi Anggraeni, 110110301042; 2015; Jurusan Ilmu Sejarah, Fakultas Sastra  
Universitas Jember

Kondisi perekonomian RRC pada 1957-1976 menunjukkan kegagalan pemerintah Mao dalam mengendalikan situasi ekonomi negara. Strategi pembangunan radikal yang dilaksanakan rezim Mao Zedong bertumpu pada kemandirian negara melakukan produksi besar-besaran agar mampu bersaing dengan negara-negara Barat melalui kampanye Lompatan Jauh ke Depan. Realitas yang terjadi di lapangan menunjukkan negara mengalami kerugian yang cukup besar karena bencana kelaparan yang terjadi selama kampanye tersebut. Minimnya ketersediaan tenaga ahli, SDM dan teknologi yang tidak memenuhi syarat dalam proses produksi. Faktor lain yang menjadi penyebab kegagalan kampanye tersebut adalah kurangnya pengawasan pusat terhadap kinerja pejabat-pejabat yang bertugas pada wilayah-wilayah yang menjadi tempat proses produksi di bawah Komite Rakyat. Gelombang keterpurakan ekonomi RRC selanjutnya digambarkan pada peristiwa Revolusi Kebudayaan pada 1966-1976. Selama Revolusi Kebudayaan berlangsung, RRC mengalami ketidakproduktifan karena pemerintahan Mao terfokuskan pada kegiatan politik. Kegiatan tersebut meliputi propaganda pemerintahan Mao mengenai pentingnya ideologi Maoisme seperti yang dijelaskan dalam *The Little Red Book*. Pembersihan terhadap orang-orang yang dianggap kontrarevolusiner pada partai, serta orang-orang yang terlibat dalam golongan kanan, kapitalis dan lainnya. Kondisi tersebut mengakibatkan kondisi perekonomian negara dalam situasi memprihatinkan dan menjadikan Deng Xiaoping dari golongan pragmatis mengambil langkah baru untuk memulihkan kondisi perekonomian sebelumnya.

Seperinggal Mao, RRC di bawah pemerintahan Deng Xiaoping melakukan Reformasi Ekonomi melalui Empat Modernisasi yakni modernisasi pertanian, modernisasi industri, modernisasi ilmu pengetahuan dan teknologi dan modernisasi pertahanan nasional. Pada perkembangannya Reformasi Ekonomi era

Deng Xiaoping menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang mengesankan. Kesuksesan tersebut ditunjang oleh kebijakan politik pintu terbuka serta modernisasi yang dilakukan. Pertumbuhan ekonomi RRC meningkat tinggi pada 1985 yakni dari 4.3% menjadi 21.7% dan menurun menjadi 11.4% pada 1986, kemudian pada 1988 menjadi 20.8%.

Selama pelaksanaan Reformasi Ekonomi, selain perkembangan perekonomian negara, kondisi internal PKC mengalami krisis politik partai yang digambarkan dalam perbedaan pandangan politik antar dua faksi. Dalam koalisi pemerintahan Deng Xiaoping terdapat dua faksi yakni kelompok reformis dan kelompok konservatif-militer. Selama pelaksanaan reformasi kedua kelompok tersebut ikut terlibat aktif dalam kepemimpinan Deng. Dari keterlibatan tersebut, ditinjau dari segi historis pergulatan politik internal dalam partai menjadi sesuatu yang lumrah dan eksis selama partai berdiri. Hal tersebut juga ditunjukkan selama Reformasi Ekonomi, perbedaan pendapat dan pandangan masing-masing kelompok dari kedua kelompok merupakan fase RRC menetapkan model pembangunan sosialis yang sesuai. Secara garis besar keterbukaan ekonomi RRC menunjukkan kondisi perekonomian yang mengesankan selama kepemimpinan Deng, ikut memicu tuntutan yang berasal dari pelajar dan mahasiswa RRC mengenai keterbukaan politik. Situasi tersebut juga mengundang perdebatan antara kedua kelompok mengenai otoritas yang dimiliki partai serta kerelevanan ideologi partai. Rentetan peristiwa tersebut menggambarkan secara keseluruhan kepemimpinan Deng Xiaoping dalam partai selama periode 1977-1989.

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Cina sejak menjadi Republik Rakyat Cina (RRC) pada 1949 merupakan salah satu negara ketiga yang berhasil menerapkan pembangunan sosialisnya dengan gagasan para pemimpinnya yang radikal dan pragmatis-realis, tanpa harus berkiblat sepenuhnya terhadap negara-negara Barat seperti Amerika Serikat (AS), Inggris dan lainnya. RRC sebagai negara komunis terbesar kedua setelah Uni Soviet sangat menentang sistem kapitalisme pada rezim Mao Zedong, sebaliknya RRC menjadi negara yang kemajuan ekonominya diakui oleh dunia melalui pasar bebas dan sistem kapitalisme yang dimulai sejak era Deng Xiaoping.

Dinamika ekonomi dan politik RRC pada masa transisi kepemimpinan Mao Zedong menuju kepemimpinan Deng Xiaoping adalah salah satu yang menjadi titik balik RRC sebagai negara komunis. Kepemimpinan yang berbeda antara keduanya menjadi ciri khas tersendiri pada eranya masing-masing. Mao yang sangat terkesan radikal baik kepemimpinannya dalam partai maupun negara berbeda dengan Deng, yang justru mempunyai pemikiran lebih pragmatis-realis

terkait pembangunan sosialis RRC. Pemikiran yang sifatnya lebih revisionis ini menjadikan RRC sebagai negara komunis yang mengarah pada kapitalisme, dan dalam hal ini kedudukan Partai Komunis Cina (PKC) patut dipertanyakan.

Kondisi tersebut menjadikan RRC mengalami banyak kemelut baik di bidang politik maupun ekonomi. Mao Zedong misalnya, dengan pembangunan radikalnya banyak memberikan kesan bagi rakyat RRC juga terhadap negara-negara lain di dunia. Menurut Donnithorne, model pembangunan RRC mengandung beberapa pengecualian, yaitu dari sudut politiknya yang memakai unsur paksaan dan pengekangan, walaupun kemudian RRC di masa Mao, dapat mengendalikan inflasi secara luar biasa.<sup>1</sup> Pada era Deng Xiaoping dengan pemikirannya yang pragmatis-realis, kapitalisme dihidupkan kembali melalui pasar bebas. Pilihan Deng atas model pertumbuhan menjadikan kita untuk memperbincangkan kembali pemikiran mengenai modernisasi.<sup>2</sup> Pemikiran mengenai modernisasi biasanya akan menghasilkan sesuatu yang tidak diinginkan oleh negara sosialis pada umumnya, misalnya terjadi ketimpangan antara desa dan kota, pendapatan sektor industri dan sektor pertanian serta ketergantungan yang berlebih terhadap negara-negara maju, serta menjadikan negara yang kompetitif dan eksploitatif.

Ditarik lebih jauh lagi dari masa dinasti-dinasti seperti dinasti Qing, dan dinasti Han, RRC sudah memulai basis ekonominya melalui perdagangan. Sistem pemerintahan RRC pada masa dinasti juga menganut pemerintahan yang otoriter. Setelah masa dinasti runtuh, banyak pembaruan-pembaruan yang dilakukan oleh RRC baik dari sistem politik maupun sistem ekonominya. Dari serangkaian peristiwa yang mewarnai kehidupan ekonomi politik RRC dari masa ke masa, yang paling menarik dikaji adalah mengenai Revolusi Kebudayaan dan Reformasi Ekonomi di RRC. Dua peristiwa besar ini menjadi titik balik RRC, yakni pengaruh RRC mulai menampakkan dirinya sebagai macan Asia setelah Jepang dan Korea. Perubahan dan kemajuan RRC bukan hanya dari segi ekonomi dan

---

<sup>1</sup>Poltak Partogi Nainggolan, *Reformasi Ekonomi RRC Era Deng Xiaoping*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995), hlm. 53.

<sup>2</sup>*Ibid.*, hlm. 31

politik yang menjadikan monumental di hadapan dunia terutama negara-negara Barat, namun dari segi ideologi yang menjadi salah satu paham terbesar dunia yakni komunisme. Tidak dapat dipungkiri bahwa pertarungan dua ideologi besar dunia yang dimulai sejak perang dunia hingga perang dingin masih berlangsung dan berdampak langsung terhadap kehidupan bermasyarakat dan bernegara seperti halnya di RRC. Eksistensi PKC selama kurang lebih 7 dasawarsa sampai kepemimpinan Deng Xiaoping, menjadi sebuah prestasi bagi partai dalam mempertahankan otoritas partai dan menekan demokrasi politik di RRC.

Pada rezim Mao Zedong dengan dilatarbelakangi untuk melawan imperialisme dan kapitalisme, pada 1966 ketua Mao mencanangkan Revolusi Kebudayaan.<sup>3</sup> Revolusi ini dianggap sebagai jalan yang harus ditempuh Mao, rakyat RRC membutuhkan perombakan terutama dalam kebudayaan yang dianggap menjauh dari cita-cita komunisme RRC. Namun demikian cara yang ditempuh pada masa kepemimpinan Mao berbeda dengan konsep Uni Soviet. Uni Soviet melakukan perjuangan revolusinya dengan kaum buruh sebagai penggeraknya, sedangkan Mao Zedong lebih mengutamakan kaum petani serta kaum intelektual sebagai kekuatan revolusi. Di sisi lain, hubungan antara RRC dengan Uni Soviet sudah terjalin lama bahkan sebelum PKC memperoleh kemenangan. Hubungan ini banyak direalisasikan dengan bantuan dan kerjasama yang dilakukan Partai Komunis Uni Soviet (PKUS) dengan RRC seperti dukungan politik bahkan bantuan militer. PKUS adalah salah satu yang menjadi panutan bagi PKC setelah keberhasilan Revolusi Bolshevik 1917, yang juga sebagai pusat konsolidasi yang dilakukan Komunis Internasional (Komintern).

Kekacauan justru mulai muncul pada 1966. Sebuah gelombang baru kekerasan terjadi di RRC, berupa teror *Pengawal Merah* meliputi setiap sudut

---

<sup>3</sup> Revolusi Budaya atau lebih lengkapnya *Revolusi Budaya Proletar Agung* adalah propaganda politik di RRC yang dicanangkan oleh ketua PKC, Mao Zedong pada 1966 untuk menyingkirkan pesaing dan lawan politik Mao dan merevolusionerkan masyarakat. Dalam kekacauan sosial dan kekerasan politik yang mengikutinya, ribuan orang mati dan jutaan orang dipenjarakan bahkan terusir. Kata-kata dan ajaran Mao yang terkumpul dalam *Buku Merah Kecil* menjadi buku pegangan dalam Revolusi Kebudayaan ini. Kata-kata Mao itu juga menginspirasi kemunculan *Tentara Merah*. Terrence Cheng, *Anak-anak Langit*, (Jakarta: Serambi, 2002), hlm. 449.

negara.<sup>4</sup> Pada 1966, *Pengawal Merah* yang ditunjuk oleh Mao sebagai motor penggerak jalannya Revolusi Kebudayaan mengeksekusi segala sesuatu yang berbau luar dan kapitalis.<sup>5</sup> Banyak peneliti berpendapat bahwa ribuan orang mati pada saat revolusi kebudayaan. Mereka yang disinyalir sebagai kontrarevolusioner adalah musuh partai dan pantas diberi hukuman mati atau mendapatkan kritik diri dengan belajar ke pedalaman bersama petani. Orang-orang yang dianggap kontrarevolusioner adalah mereka yang merupakan tuan tanah, disinyalir menjadi orang kanan dan anti partai, selain itu ada beberapa kategori lain lagi. Dalam perjalanannya ternyata Revolusi Kebudayaan banyak diatur oleh istri Mao, yaitu Jiang Qing. Setelah kelompok *Pengawal Merah* pertama kali dibentuk oleh mahasiswa-mahasiswa Beijing, situasi negara menjadi tidak terkendali. Kelompok *Pengawal Merah* ini bergerak melawan semua birokrasi dan menghancurkan sejumlah tempat religius dan historis. Selama empat tahun Revolusi Kebudayaan (1966-1970), praktis semua universitas dan sekolah ditutup.<sup>6</sup> Akibat dari ini semua, yang menjadi korban Revolusi Kebudayaan bukan hanya orang dewasa, namun juga anak-anak.

Mao Zedong yang saat itu menjadi pimpinan PKC dan juga sekaligus kepala negara mempunyai ideologi yang radikal mengenai pemerataan pembangunan dengan memperkenalkan ajaran Marxisme-Leninisme kepada rakyat RRC. Dalam menjalankan pembangunan sosialisnya pemikiran Mao lebih menyesuaikan dengan realitas yang ada di RRC dengan wilayahnya yang agraris, sehingga ini juga menjadi salah satu pendukung Mao dan kawan-kawan mendapat respon yang cukup besar dari kalangan petani. Justru di lain pihak pergolakan politik terus berlangsung antara kelompok revolusioner-radikal, kelompok pragmatis-realis, dan kelompok moderat. Hal tersebut menjadikan RRC berubah dengan cara yang sulit dibayangkan oleh negara-negara Barat.

---

<sup>4</sup> FX. Sutopo, *China Sejarah Singkat*, (Yogyakarta: Garasi, 2009), hlm. 124.

<sup>5</sup> *Pengawal Merah* merupakan perkumpulan pelajar komunis radikal yang menjadi pengikut setia Mao yang berusaha merevolusionerkan rakyat Cina melalui cara-cara kekerasan. Terrence Cheng, *op.cit.*, hlm. 450.

<sup>6</sup> FX. Sutopo, *op.cit.*, hlm. 125.

Revolusi besar-besaran oleh kaum proletar dalam pelaksanaannya mengalami kegagalan, dan dalam kekacauan tersebut yang menjadi korban sebenarnya adalah anak-anak RRC. Mereka dari kecil dituntut untuk masuk dalam kemelut politik yang dialami RRC. Mereka yang termasuk dalam kelompok pragmatis-realis dengan gagasan pembangunan sosialis dalam ekonomi cenderung menuju ke arah kapitalisme, mendapat kritik diri. Kritik yang dimaksudkan adalah sebuah kritik yang dilakukan terhadap dirinya sendiri dengan bentuk melakukan pelayanan masyarakat di desa-desa dan belajar lagi mengenai ajara-ajaran Mao yang ada pada *Buku Merah Kecil*. Seperti halnya Liu Shaoqi dan Deng Xiaoping yang dianggap sebagai kapitalis.

Pada masa Revolusi Kebudayaan, keadaan politik RRC mengalami kekacauan yang ikut berdampak terhadap kondisi perekonomian negara. Sebelum Mao mencanangkan Revolusi Kebudayaan, ia berhasil memperbaiki keadaan ekonomi RRC dengan mengendalikan inflasi dengan baik. Namun hal tersebut juga tidak terlalu menjamin kemajuan pembangunan ekonomi RRC. Oleh karena itu pada masanya ada beberapa gerakan yang menitikberatkan pada kesadaran politik yang ditujukan agar sosialisme RRC sesuai dengan teori yakni Gerakan Seratus Bunga, Gerakan Anti Kanan (1956), Lompatan Jauh Ke Depan (1957-1960), sampai pada Revolusi Kebudayaan (1966-1969). Hal tersebut ditujukan agar RRC dihindarkan dari kebangkitan kaum borjuasi dan kapitalisme. Pada masa tersebut RRC benar-benar menutup diri untuk negara luar terutama AS yang merupakan pemimpin kapitalisme. Hal ini mengakibatkan RRC semakin tertinggal jauh dari negara-negara maju.

Revolusi Kebudayaan dianggap gagal oleh rakyat RRC, karena menambah kesengsaraan rakyat berupa penyiksaan fisik dan teror dari *Pengawal Merah*. Keadaan ekonomi RRC semakin kacau, begitu juga panggung politik di RRC. Kondisi tersebut menjadi gambaran bahwa selama kepemimpinan Mao baik dalam partai maupun pemerintahan, Mao menggunakan kekuasaan politik dan doktrin ideologi sebagai dasar kepemimpinannya. Pada akhir masa Revolusi Kebudayaan, Deng Xiaoping kembali lagi ke ranah politik, dengan pemikirannya yang mengatakan bahwa “ Sosialisme tidak harus dengan kemiskinan.”, mulai

menampakkan dirinya. Selama 1975 produksi pabrik-pabrik industri mulai menjadi tertib kembali, kondisi tersebut karena Deng Xiaoping sebelumnya yang banyak difitnah kembali memegang jabatan sebagai Wakil Perdana Menteri.<sup>7</sup> Setiap orang menyambut baik penekanannya terhadap sosialisme sebagai alat untuk memperbaiki taraf hidup rakyat. Rakyat sudah mulai lelah dengan menerima anjuran agar melakukan pengorbanan diri dengan rasa penuh berbakti.<sup>8</sup> Revolusi yang dilakukan RRC selama menuju pembangunan sosialis sebagai negara komunis kedua di dunia tidak mudah. Banyak pengorbanan yang dilakukan untuk bisa mencapai pembangunan sosialis yang sesuai dengan karakter RRC sendiri. Melalui kondisi tersebut Deng Xiaoping dan kawan-kawan yang memiliki pemikiran pragmatis-realis, merombak RRC dengan memperbaiki segi ekonominya kembali ke sistem kapitalisme yang dibungkus dengan sosialisme dengan melakukan Reformasi Ekonomi pada 1978.

Deng Xiaoping pada masa Revolusi Kebudayaan, mengalami pengasingan dari panggung politik RRC. Pada 1977an, Deng muncul kembali ke ranah politik RRC dengan dukungan dari kelompok pragmatis-realis. Pemimpin pragmatis tersebut, dapat menyalurkan kembali pemikirannya mengenai pembangunan ekonomi di RRC. Deng dengan pemikiran-pemikirannya yang berbeda dengan Mao terus menyalurkan pemikirannya untuk pembangunan sosialis RRC. Rencana tersebut berjalan tanpa adanya kemelut yang mengacaukan RRC seperti halnya kesalahan dalam Revolusi Kebudayaan. Dengan dikembalikannya Tentara Pembela Rakyat (TPR) ke tempatnya semula, ini menjadi dukungan tersendiri bagi Deng dan kawan-kawan. Setelah Mao meninggal, kelompok pragmatis-realis yang mendominasi dalam kepartaian juga pemerintahan RRC. Deng Xiaoping sebagai pengganti Mao, pada 1979. Ia memulai kebijakan reformasi pasar bebas menghidupkan kembali semangat usaha. Setelahnya RRC, meskipun komunis dalam ideologi dan bentuk pemerintahan, telah ambil bagian di dalam privatisasi

---

<sup>7</sup> Liang Heng & Judith Shapiro, *Tragedi Anak Revolusi*, (Jakarta: PT Temprint, 1989), hlm. 245

<sup>8</sup> *Ibid.* hal. 248

ekonomi. Ini berarti bahwa mereka telah meninggalkan ajaran paling mendasar komunisme yakni mengenai penghapusan hak milik privat atau pribadi.<sup>9</sup>

Jika Mao mempunyai perspektif yang spesifik tentang sosialisme, maka Deng juga demikian. Dalam pemikiran Deng, sosialisme yang berusaha diterapkan di RRC adalah sosialisme dengan karakteristik RRC, di mana prinsip-prinsip dasar Marxisme diintegrasikan dengan kondisi aktual RRC.<sup>10</sup> Menurut Deng, apapun dapat ditempuh untuk perkembangan pembangunan sosialis RRC, walaupun itu dianggap konvergensi terhadap ideologi. Menurut Deng ideologi tidak dapat dilaksanakan secara dogmatis, tetapi harus mengalir dan dapat diterima. Sosialisme yang dimaksudkan oleh kelompok pragmatis-realis adalah seperti halnya di Yugoslavia, yakni yang diperhitungkan dalam pembangunan ekonomi adalah kekuatan pasar dan mengakui kepemilikan swasta, di samping kepemilikan negara, dalam sektor pertanian. Selama periode perencanaan Reformasi Ekonomi, Deng dan kawan-kawan sebagai perumus kebijakan pembangunan RRC, mengadopsi model Soviet yang memberikan penekanan terhadap pembangunan sektor industri, khususnya bidang produksi padat modal.<sup>11</sup> Begitu pula di RRC, hal serupa diterapkan pada kemajuan sektor industri, di mana industrialisasi dilaksanakan dengan devisa dari sektor pertanian. Teknologi produksi barang-barang industri lebih diperhatikan metode padat modalnya, dibandingkan dengan padat karya.<sup>12</sup>

Pada masa Mao Zedong nasionalisme dikendalikan bagi kepentingan politik, maka di era modernisasi dan reformasi, nasionalisme condong membentuk semangat RRC baru yang bercita-cita setara dengan kejayaan Qin Shihuang Di, kaisar kuning yang mempersatukan seluruh daratan Cina.<sup>13</sup> Dua peristiwa besar ini menjadikan RRC banyak mengalami dinamika baik di bidang sosial, ekonomi bahkan politik. Hal ini menjadikan RRC semakin belajar untuk menemukan arah

---

<sup>9</sup> Richard Pipes, *Komunisme Sebuah Sejarah*, (Yogyakarta: Mataangin, 2004), hlm. 191.

<sup>10</sup> Poltak Partogi Nainggolan, *op.cit.*, hlm. 83.

<sup>11</sup> Reformasi Ekonomi merupakan salah satu program di era Deng Xiaoping untuk membenahi sistem ekonomi Cina pasca Revolusi Kebudayaan. *Ibid.*, hlm. 81-109.

<sup>12</sup> *Ibid.* hlm. 84.

<sup>13</sup> FX. Sutopo, *op.cit.*, hlm. 135.

sistem politik dan ekonomi yang tepat untuk negaranya sesuai dengan budaya RRC yakni kapitalisme ke luar, sosialisme ke dalam.

Pembaruan-pembaruan yang dilakukan Deng tidak lepas dari dukungan yang diberikan oleh Amerika Serikat, hubungan RRC dengan AS yang semakin membaik setelah tahun 1970an menjadi sebuah dukungan politik RRC atas Uni Soviet juga sebuah kerjasama dalam mengembangkan modernisasi RRC. Kepemimpinan Deng Xiaoping membawa banyak pengaruh terhadap kondisi perekonomian negara dan politik partai. Hal tersebut meliputi pergulatan politik yang dihadapi oleh lembaga internal PKC di bawah kepemimpinan Deng serta perubahan model pembangunan yang mengarah pada liberalisme melalui Reformasi Ekonomi. Pasca 1976, peta politik PKC dibagi menjadi dua faksi yakni faksi konservatif dan militer, dan kelompok reformis. Sedangkan kelompok Maois yang sebelumnya lebih dominan pada Revolusi Kebudayaan dipecat dari jabatannya dalam partai dan ditangkap pada 6 Oktober 1976 atas kesalahannya dalam Revolusi Kebudayaan.<sup>14</sup> Perubahan peta politik tersebut menjadi salah satu gambaran pergulatan politik internal PKC dalam kepemimpinan Deng Xiaoping pada 1977-1989. Di sisi lain Reformasi Ekonomi yang dilakukan Deng membawa banyak perubahan terutama dalam sistem ekonomi yang tengah diterapkan pada masanya yakni adanya pasar bebas secara tidak langsung telah menghidupkan kembali kapitalisme di RRC. Kondisi tersebut juga mempengaruhi internal partai yang digambarkan dengan pergulatan politik yang semakin melebar antara sayap kanan dan sayap kiri dalam tubuh PKC. Pergulatan politik internal tersebut digambarkan dalam beberapa peristiwa penting seperti pengambilan keputusan atau penerapan kebijakan yang dilakukan dalam Kongres Partai, Kongres Rakyat Nasional serta pertemuan-pertemuan lain yang dilakukan partai. Serta keterbukaan ekonomi yang juga menuntut adanya keterbukaan politik sebagai bentuk tuntutan masyarakat terhadap jalannya reformasi di bawah kepemimpinan Deng Xiaoping.

Puncak pergulatan politik internal kedua kelompok terlihat jelas setelah Peristiwa Tiananmen 1989. Tuntutan akan demokrasi politik bagi RRC dalam

---

<sup>14</sup> Roderick MacFarquhar, *The Politics of China 1949-1989*, (New York: Cambridge University Press, 1994), hlm. 476.

peristiwa tersebut mengancam otoritas PKC sebagai kekuatan sentral. Serta menjadi tantangan dan eksistensi kedua kelompok untuk bertahan dengan menunjukkan loyalitasnya terhadap partai. Serangkaian peristiwa tersebut serta kebijakan yang diberlakukan Deng Xiaoping selama proses pembangunan RRC pasca Mao, merupakan gambaran kepemimpinan Deng dalam partai selama periode 1977-1989.

Skripsi ini berjudul “Partai Komunis Cina (PKC) Di Bawah Rezim Deng Xiaoping Pada 1976-1989”. Penulis mengkaji tulisan yang berkaitan dengan permasalahan politik dan ekonomi di RRC dengan mengambil sudut pandang terkait pembangunan sosialisnya pada rezim Deng Xiaoping. Dalam kurun waktu sejak dibentuknya Cina menjadi RRC, negara komunis ini mengalami dua gelombang terbesar dalam pembangunan sosialisnya. Hal ini dapat kita lihat dari Rezim Mao Zedong dan Rezim Deng Xiaoping. Penulis mencoba mengkomparasikan kedua rezim ini sebagai gambaran perjalanan PKC. Sesuai dengan judul tersebut yang menjadi fokus kajian adalah permasalahan politik dan ekonomi dalam kepemimpinan Deng Xiaoping. Hal itu tergambar dalam judul, penulis meneliti terkait kondisi PKC selama rezim Deng Xiaoping yang digambarkan dalam kebijakan-kebijakan Deng dalam meningkatkan ekonomi negara dan kondisi internal partai. Pada masa tersebut dalam Reformasi Ekonomi banyak dilontarkan kebijakan ekonomi dan politik yang sifatnya lebih revisionis, dan justru mengundang pergulatan antara dua faksi dalam internal PKC. Dua faksi tersebut adalah mereka yang memposisikan diri sebagai pengikut Mao yang cenderung bersikap konservatif dan revolusioner serta golongan senior militer yang dikenal dengan kelompok konservatif dan militer, sedangkan di faksi lain adalah para revisionis yang cenderung bersikap pragmatis-realis dan berperan aktif dalam pelaksanaan modernisasi ekonomi RRC dan dikenal sebagai kelompok reformis. RRC menjadi mungkin sebagai ketertarikan penulis karena RRC merupakan salah satu negara dunia ketiga yang berideologi komunis dan termasuk yang sukses dalam pembangunan sosialisnya dalam kepemimpinan Deng Xiaoping. Periode 1976-1989 adalah peralihan kepemimpinan pada generasi kedua dengan Deng Xiaoping sebagai pemimpin tertinggi, dan ditandai oleh

pelaksanaan Reformasi Ekonomi RRC. Sejak meninggalnya Mao Zedong yang merupakan pemimpin besar PKC, serangkaian pembaruan-pembaruan terkait pembangunan sosialis RRC dirancang kembali oleh Deng dan kedua faksi dalam koalisi pemerintahannya. Pada 1989 merupakan puncak pergulatan politik yang terjadi antara kedua kelompok dengan tersingkirnya kelompok reformis yang ditandai oleh Peristiwa Tiananmen 1989, yang dilatarbelakangi oleh tuntutan mahasiswa dan rakyat RRC akan keterbukaan ekonomi yang perlu diimbangi dengan keterbukaan politik.

Berdasarkan paparan di atas, penulisan mengemukakan beberapa alasan mengenai ketertarikannya mengkaji peristiwa di RRC dengan judul “Partai Komunis Cina (PKC) Di Bawah Rezim Deng Xiaoping 1976-1989” sebagai berikut:

1. Optimisme RRC dalam pembangunan sosialisnya yang bersifat lebih revisionis pada rezim Deng Xiaoping, di samping keberadaan partai tunggal yakni PKC yang menjadi pusat pengaturan negara, sehingga banyak memunculkan pergulatan politik yang mewarnai perjalanan negara yang dikategorikan ke dalam negara dunia ketiga.
2. Belum banyaknya studi ilmiah mengenai PKC rezim Deng Xiaoping yang dibahas secara detail terkait pandangan baru bagi partai dan negara mengenai pembangunannya serta penerapan sistem baru dalam negara komunis melalui pengembangan karakteristik Cina di Program Studi Ilmu Sejarah Fakultas Sastra Universitas Jember.
3. Eksistensi perkembangan isme-isme di dunia saat ini juga sangat diperlukan untuk menunjang keberadaan sebuah negara. Eksistensi PKC sebagai partai yang berideologikan komunisme menjadi sebuah teladan tersendiri seiring dengan tantangan globalisasi yang semakin pesat serta perubahan sistem ekonomi liberal yang diterapkan RRC.

## 1.2 Rumusan Masalah

Untuk memberikan arah dan gambaran yang tepat mengenai tulisan yang berjudul “Partai Komunis Cina (PKC) Di Bawah Rezim Deng Xiaoping pada 1976-1989” disajikan dalam beberapa rumusan masalah. Adapun rumusan masalah yang menjadi fokus kajian dalam tulisan ini menggambarkan kondisi-kondisi umum dan khusus dalam rezim Deng Xiaoping secara terstruktur sebagai berikut:

1. Bagaimana PKC di bawah Rezim Deng Xiaoping ?
2. Apa yang melatarbelakangi terjadinya Reformasi Ekonomi RRC Era Deng Xiaoping?
3. Bagaimana proses berlangsungnya Reformasi Ekonomi di bawah rezim Deng Xiaoping?
4. Bagaimana Peran Deng Xiaoping dan PKC dalam pelaksanaan Reformasi Ekonomi di RRC ?

## 1.3 Tujuan dan Manfaat

### 1.3.1 Tujuan

Tujuan merupakan keinginan yang hendak dicapai oleh penulis atau peneliti, dan manfaat adalah jawaban langsung atas keinginan penulis.<sup>15</sup> Penulisan skripsi ini mempunyai beberapa tujuan yakni:

1. Mengetahui dan memahami bagaimana PKC di bawah kepemimpinan Deng Xiaoping.
2. Mengidentifikasi apa yang menjadi latar belakang terjadinya Reformasi Ekonomi RRC Era Deng Xiaoping.
3. Mengetahui serta mengidentifikasi bagaimana jalannya Reformasi Ekonomi RRC era Deng Xiaoping.
4. Mengetahui peran Deng Xiaoping dan PKC dalam pelaksanaan Reformasi Ekonomi di RRC.

---

<sup>15</sup> Nurhadi Sasmita dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Jember*, (Yogyakarta: Lembah Manah, 2012), hlm. 19.

### 1.3.2 Manfaat

Sebagai hasil dari tujuan suatu penulisan skripsi ini, manfaat yang dapat diperoleh dari kajian ini yakni:

1. Memberikan pengetahuan terkait kondisi PKC dan RRC di bawah Rezim Deng Xiaoping yang meliputi kebijakan ekonomi sosialis yang mengarah pada liberalisme, konflik kepartaian terutama dalam partai tunggal yang nantinya juga bisa menghasilkan analisis yang lebih jauh dari tulisan ini dan tulisan-tulisan sebelumnya yang mempunyai bahasan sama.
2. Skripsi ini dapat menjadi sebuah referensi bagi para penikmat sejarah terutama yang menyukai pembahasan terkait pembangunan ekonomi sosialis RRC dan juga Partai Komunis Cina Era Deng Xiaoping.
3. Tulisan ini dapat memberikan sumbangan terhadap penulisan sejarah terutama terkait pembahasan jalannya Reformasi Ekonomi dan Pergulatan Politik Internal PKC Era Deng Xiaoping.
4. Memberikan pandangan dan hasil analisis terkait kedudukan Deng Xiaoping dan PKC selama pelaksanaan Reformasi Ekonomi serta menegaskan otoritas partai.

### 1.4 Ruang Lingkup

Tulisan ini sesuai dengan judulnya, lingkup spasial yang digunakan adalah lingkup nasional RRC. Lingkup temporal yang digunakan adalah 1976-1989 dan lingkup kajian sejarah politik. Pemilihan lingkup spasial, temporal dan lingkup kajian tersebut dikemukakan atas beberapa pertimbangan penulis. Lingkup nasional RRC yang digunakan dalam lingkup spasial penulis adalah karena RRC merupakan salah satu negara yang berpengaruh di dunia karena perkembangan ekonominya yang monumental, terutama mengenai perjalanan politiknya dengan adanya PKC sebagai partai tunggal. Hal yang menarik adalah bagaimana transisi kepemimpinan PKC berdampak besar terhadap arah kebijakan ekonomi RRC di bawah pemimpin yang baru yakni Deng Xiaoping, dengan tetap mempertahankan keberadaan PKC sebagai pusat kekuatan politik dan mengembangkan ekonomi

kapitalis berdasarkan sosialisme dengan karakteristik RRC. Selain itu, eksistensi PKC dan internal partai yang mampu dipertahankan dalam rezim Deng Xiaoping memberikan gambaran akan kepemimpinan Deng yang mampu menekan demokrasi politik di tengah-tengah gencarnya demokrasi ekonomi selama pelaksanaan Reformasi Ekonomi.

Lingkup temporal yang berkisar antara 1976-1989 adalah dilihat dari 1976 berarti awal karir Deng sepeninggal Mao mewujudkan jalannya Reformasi Ekonomi dengan serangkaian pembaruan-pembaruan terkait kebijakan ekonomi sosialis RRC, sedangkan 1989 adalah tahun perjalanan reformasi ini kemudian banyak dipertanyakan oleh rakyat RRC karena keterbukaan ekonomi yang dilakukan tidak diimbangi dengan keterbukaan politik, yang kemudian menjadi salah satu sebab banyaknya pertentangan dalam internal PKC, yakni antara kedua faksi dalam tubuh PKC semakin terlihat jelas dengan adanya tuntutan demokrasi politik di RRC. Serta memberi ketegasan garis pemikiran Deng Xiaoping mengenai partai.

Kajian Politik yang menjadi bahasan ini sama halnya disampaikan dalam lingkup spasial dan temporal di atas, bahwa kajian ini yang nantinya digunakan berhubungan dengan keberadaan PKC di bawah Deng Xiaoping selama pelaksanaan Reformasi Ekonomi. Sejarah politik meliputi pemerintahan, kepemimpinan, pemberontakan, partai dan kekuasaan. Dalam hal ini, kebijakan ekonomi sosialis yang diterapkan di RRC semasa Deng Xiaoping berdampak terhadap perekonomian negara dan kondisi internal partai yang basisnya adalah sebagai kajian politik.

### **1.5 Tinjauan Pustaka**

Dalam kajian ilmu pengetahuan, salah satu langkah penentuan utama yang harus dipertimbangkan ialah mengenai masalah orisinalitas karya tulis. Keabsahan suatu karya ilmiah yang berbasis pada ilmu pengetahuan, dapat didukung dengan adanya perbandingan-perbandingan yang memaparkan sudut pandang yang akan dihasilkan dan perbedaan serta orisinalitas dari karya lainnya. Tinjauan pustaka memuat uraian tentang isi utama pustaka secara ringkas penjelasan tentang

relevansi (tema, lokasi, permasalahan, dan pendekatan) antara buku atau karya yang sudah pernah ditulis dengan penelitian yang dilakukan. Perbedaan ini yang dapat mempertegas bahwa penelitian yang dilakukan berbeda dengan buku atau hasil penelitian terdahulu, sehingga tampak aspek orisinalitasnya.<sup>16</sup>

Beberapa pustaka yang digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain adalah hasil Kongres Partai ke-11 PKC pada 12-18 Agustus 1977, Kongres Partai ke-12 pada 1-11 September 1982 dan Kongres Partai ke-13 PKC pada 25 Oktober-1 November 1987. Hasil Kongres Partai ke-11 yakni setelah meninggalnya Mao, Kelompok Empat diturunkan dari jabatannya di partai, dan Deng Xiaoping memperoleh jabatannya kembali yakni sebagai wakil Perdana Menteri serta persiapan pelaksanaan Reformasi Ekonomi RRC. Hasil Kongres Partai ke-12 yakni didirikannya Komite Penasehat Nasional dan Komite Investigasi Disiplin Nasional, dihapuskannya jabatan ketua partai dan mengaktifkan kembali sekretaris jenderal sebagai jabatan tertinggi, dan Hua Guofeng kehilangan jabatan resminya sebagai ketua dan digantikan Hu Yaobang yang menjabat sebagai sekjen partai. Hasil Kongres Partai ke-13 yakni Deng Xiaoping dan pimpinan partai “Generasi Kedua” lainnya mengundurkan diri dari jabatan aktif dalam partai dan “Generasi Ketiga” seperti Zhao Ziyang mendominasi Komite Kerja Politbiro. Dari hasil Kongres Partai 11-13 tersebut menunjukkan pelaksanaan Reformasi Ekonomi dan kebijakan-kebijakan di dalamnya, serta pergantian kekuasaan yang akan memberikan gambaran pada penulis untuk menganalisis keberadaan dan perkembangan PKC selama rezim Deng Xiaoping. Terutama mengenai pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan selama pelaksanaan Reformasi Ekonomi dan posisi kekuasaan dalam partai.

Buku yang ditulis oleh Umar Suryadi Bakri yang berjudul *Cina, Qua Vadis ? Pasca Deng Xiaoping*.<sup>17</sup> Buku ini terdiri dari beberapa himpunan artikel yang ditulis oleh beberapa penulis, dalam pembasannya meliputi eksistensi PKC

---

<sup>16</sup> Nurhadi Sasmita, *Op.cit*, hlm. 23.

<sup>17</sup> Umar Suryadi Bakri, *Cina Qua Vadis? Pasca Deng Xiaoping*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996).

pasca Reformasi Ekonomi Era Deng Xiaoping serta kepemimpinan Deng Xiaoping. Otoritas PKC mulai dipertanyakan akibat tidak adanya keterbukaan dalam reformasi yang berlangsung. Reformasi Ekonomi yang dilakukan Deng di RRC membawa banyak perubahan terutama sistem ekonomi yang tengah diterapkan pada masanya yakni adanya pasar bebas yang secara tidak langsung telah menghidupkan kembali kapitalisme di RRC. Keterbukaan ekonomi ini juga menuntut adanya keterbukaan politik sebagai bentuk tuntutan masyarakat terhadap jalannya reformasi di bawah kepemimpinan Deng Xiaoping.

Umar Suryadi Bakri menyampaikan tentang bagaimana PKC pasca ditinggal oleh kepemimpinan Deng yang merupakan penggagas Reformasi Ekonomi di RRC. Begitu juga dengan nasib reformasi tersebut pasca Deng meninggalkan panggung politik RRC. Itu menjadi pertanyaan besar dalam buku ini, namun justru hal ini terpatahkan ketika Deng Xiaoping ternyata tetap berkiprah dalam percaturan politik PKC dengan berada di belakang layar. Kemudian yang menjadi kecemasan dikemudian hari adalah ketika RRC benar-benar kehilangan sosoknya karena usianya yang sudah menua. Beberapa bab juga dibahas terkait pengganti Deng dikemudian hari yang diam-diam juga telah dipersiapkan oleh pemimpin kolektif tersebut.<sup>18</sup> Buku ini memberikan pandangan detail tentang kepemimpinan Deng pasca reformasi berlangsung bagi penulis, selain itu penulis juga memperoleh gambaran konstruksi tentang PKC selama Reformasi Ekonomi dijalankan. Berbeda halnya dengan perspektif Umar Suryadi

---

<sup>18</sup> Ada dua model kepemimpinan RRC yang saling bersaing. Di satu pihak, ada corak kepemimpinan yang bersifat kolektif. Oleh sebagian pemimpin, model ini dianggap sebagai yang paling operasional dalam pengambilan keputusan. Sistem ini didasarkan pada pendapat, bahwa penentuan kebijaksanaan harus impersonal. Pada gaya kepemimpinan ini, otoritas untuk menentukan suatu kebijaksanaan berada pada berbagai dewan dalam setiap tingkat kepemimpinan dan bukan di tangan seorang individu. Para penganjur gaya kepemimpinan kolektif ini antara lain Deng dan Liu Shaoqi. Di sisi lain ada pemimpin RRC yang berpendapat, kepemimpinan kolektif akan menimbulkan birokratisme yang mengakibatkan adanya kelambanan dalam mengambil langkah kebijaksanaan, mereka lebih mendukung bentuk kepemimpinan yang didasarkan pada “prinsip pemimpin”. Model ini sangat mengandalkan pada otoritas seorang pemimpin kuat, dominan dan memiliki kharisma. Dan prinsip ini dianut oleh Mao dan pengikut-pengikutnya. Rene L. Pattiradjawane, “Partai Komunis Cina Menghadapi Badai” dalam Umar Suryadi Bakry (Editor), *Pasca Deng Xiaoping: Cina Quo Vadis?*, (Jakarta: PT Sinar Harapan, 1996), hlm. 1-5.

Bakri, penulis lebih cenderung membahas konsistensi PKC dalam masa transisi dari rezim Mao Zedong ke era Deng Xiaoping, dan penulis lebih tertarik pada masa 1976-1989 terkait pergulatan politik internal PKC yang kemudian menandai semakin sengitnya pertentangan antara kubu konservatif dengan kubu revisionis Deng, yang kemudian menjadi menarik untuk mempertimbangkan masa depan PKC sebagai partai tunggal di RRC.

Karya Poltak Partogi Nainggolan yang berjudul *Reformasi Ekonomi RRC Era Deng Xiaoping, Pasar Bebas dan Kapitalisme dihidupkan lagi*.<sup>19</sup> Buku ini memuat komparasi antara kepemimpinan di bawah Mao Zedong dan juga Deng Xiaoping. Perbandingan ini yang nantinya menjadi sebuah referensi untuk kepemimpinan PKC dan RRC di masa mendatang. Selain itu, sama halnya dengan judul buku ini bahwa uraian di dalamnya terfokus kepada jalannya Reformasi Ekonomi Deng Xiaoping, dampaknya terhadap kondisi ekonomi masyarakat RRC dan juga kondisi politik dalam tubuh PKC. Seperti diketahui bahwa pasca reformasi, komune rakyat yang merupakan pengaturan rakyat RRC secara terpusat mulai dihapuskan dan diadakan liberalisasi usaha dan manajemen sehingga berpengaruh terhadap kelangsungan perekonomian internasional. Secara garis besar dalam tulisan Poltak Partogi Nainggolan, lebih kepada pembahasan proses Reformasi Ekonomi dan dampaknya bagi perjalanan perekonomian RRC.

Tulisan Edvard Kardelj yang berjudul *Socialism and War* dan diterjemahkan menjadi *Jalan Menuju Sosialisme Sedunia*.<sup>20</sup> Buku Edvard Kardelj ini merupakan perbandingan penerapan sosialisme yang diterapkan oleh RRC dan Yugoslavia, serta ajaran-ajaran Marxisme yang kemudian disesuaikan dengan kondisi negara masing-masing. Beberapa negara di Asia dan Eropa yang berasaskan Komunisme dengan cirinya masing-masing tanpa banyak mengurangi keaslian ajaran Marx, banyak melakukan penyesuaian atas ideologi ini dan kemudian berpengaruh terhadap kebijakan-kebijakan ekonomi dan politik dalam negaranya. Hal tersebut menjadi dasar penulis dapat mengembangkan analisis

---

<sup>19</sup> Poltak Partogi Nainggolan, *loc.cit.*

<sup>20</sup> Edvard Kardelj, *Jalan Menuju Sosialisme Sedunia*, (Yogyakarta: Tarawang Press, 2001).

terkait perkembangan komunisme di RRC sebagai bentuk manifestasi kehidupan ekonomi dan politiknya, yang juga digambarkan dengan PKC di bawah Rezim Deng Xiaoping.

### 1.6 Pendekatan dan Kerangka Teori

Setiap kajian tulisan sejarah atau karya ilmiah dalam bentuk apapun pasti menggunakan kerangka teori atau pendekatan untuk mempermudah proses penulisan. Sejarah memerlukan bantuan dari ilmu-ilmu sosial lainnya untuk meningkatkan kemampuan atau daya jelasnya. Konstruksi atau gambaran tentang masa silam sangat ditentukan oleh pendekatan yang digunakan dalam menyoroti subyek yang dikerjakan. Sebagai sudut pandang, pendekatan akan menentukan unsur-unsur masa silam mana yang harus dimunculkan dalam narasi. Untuk menganalisis dan menjelaskan subyek yang diteliti sejarah memerlukan alat bantu berupa kerangka analitis berupa konsep-konsep atau teori-teori dari ilmu lain yang relevan. Kerangka analitis sering dipadankan dengan kerangka konseptual. Kerangka analitis berfungsi membantu peneliti dalam mengorganisasikan subyek penelitiannya, sehingga rangkaian berbagai aspek yang membentuk suatu peristiwa atau fenomena dapat dijelaskan dengan lebih baik.<sup>21</sup>

Penulis menggunakan pendekatan politik yang relevan dengan beberapa kondisi internal PKC yang melibatkan pergulatan antara dua faksi yang berseberangan dalam partai. Sejarah politik berhubungan dengan masalah pemerintahan dan kenegaraan, kemudian sejarah politik didefinisikan sebagai *history of power*.<sup>22</sup> Kekuasaan yang terbagi menjadi 2 kekuatan dalam PKC dengan Deng Xiaoping sebagai penyeimbang merupakan hal yang mendasari kondisi partai dan negara, terutama internal partai merupakan basis dari kajian politik.

Pada pembahasan teori dan konsep negara di negara berkembang sebenarnya terletak pada bagaimana negara menjelmakan dirinya dalam sebuah keadaan atau kondisi yang spesifik, yakni keadaan dunia ketiga, karena

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 23.

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 176.

kondisinya yang spesifik menghasilkan juga sifat-sifat spesifik. Jadi yang dibahas bukan sebuah teori baru tentang negara di Dunia Ketiga karena pada dasarnya tidak ada teori tersendiri tentang Dunia Ketiga.<sup>23</sup> Pemerintahan yang berkembang di RRC adalah pemerintahan yang terpusat pada kekuatan satu partai yakni PKC. Pada dasarnya pemerintahan semacam ini adalah pemerintahan yang otoriter, kontrol negara sangat diperlukan, dalam hal ini oleh PKC. Thomas Hobbes menekankan pentingnya kekuasaan pada negara, karena kalau tidak para warga akan saling berkelahi dalam memperjuangkan kepentingan mereka. Di sini mulai muncul hipotesa bahwa negara merupakan wakil dari kepentingan umum atau publik, sedangkan masyarakat hanya mewakili kepentingan pribadi atau kelompok secara terpecah-pecah. Teori ini kemudian dihidupkan lagi di zaman modern melalui Teori Negara Organik. Akhirnya muncul Karl Marx yang memiliki tafsiran baru tentang negara dan kekuasaan, dia juga memakai Teori Hegel. Akan tetapi teori ini diubahnya dengan menyatakan bahwa tujuan sejarah adalah terciptanya masyarakat sosialis, bukan masyarakat demokratis.<sup>24</sup> Dilihat dari sudut pandang RRC, teori yang relevan dengan kajian tersebut adalah Teori Negara Organik di mana dalam konsep negara organik, negara merupakan lembaga yang memiliki kemauan sendiri yang mandiri dan secara aktif mencampuri urusan masyarakat, untuk membentuk masyarakat yang lebih baik seperti yang dikemukakan Alfred Stepan, salah seorang tokoh yang membahas Teori Negara Organik dalam hal ini RRC menjadikan PKC sebagai wadah. Dari sini kemudian partai memiliki kekuasaan untuk ikut menentukan arah perekonomian negara melalui kebijakan yang diberlakukan untuk rakyatnya, termasuk kebijakan ekonomi sosialis dalam Reformasi Ekonomi yang diterapkan oleh Deng Xiaoping.

---

<sup>23</sup> Arief Budiman, *Teori Negara Negara, Kekuasaan dan Ideologi*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1996), hlm. 107.

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 7

### 1.7 Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode sejarah. Metode sejarah meliputi pengumpulan sumber, kritik sumber, sintesis sampai kepada penyajian hasil penelitian. Semua kegiatan atau proses harus mengikuti metode dan kegiatan serta aturan yang benar. Dengan demikian metode sejarah sebagaimana disebutkan di atas adalah seperangkat aturan dan prinsip-prinsip yang sistematis untuk mengumpulkan sumber-sumber sejarah secara efektif, menilainya secara kritis dan menyajikan sintesis dari hasil-hasil yang dicapai dalam bentuk tulisan.<sup>25</sup> Menurut Kuntowijoyo, metode sejarah adalah cara-cara penelitian dan penulisan sejarah. Langkah-langkah dalam pemilihan topik, pengumpulan sumber, kritik ekstern dan intern, analisis dan interpretasi, penyajian dalam bentuk tulisan (historiografi).<sup>26</sup>

Ada empat tahapan dalam metode sejarah yakni pengumpulan sumber-sumber (heuristik), kritik sumber yang terdiri dari kritik intern dan kritik ekstern, penafsiran sumber (interpretasi) dan penulisan sejarah (historiografi).<sup>27</sup> Hubungan metode sejarah dan sumber sejarah sangat erat dan merupakan bagian integral. Penulisan sejarah tidak akan dapat dilakukan jika tidak tersedia sumber atau dokumen mengenai masa lalu yang diteliti. Sebaliknya tersedianya sumber juga menuntut kemampuan peneliti untuk memahami isinya serta menuangkannya dalam rangkaian kisah yang menggambarkan masa lampau secara lebih rinci, runtut, dengan kausalitas yang relevan, dan mudah dipahami.<sup>28</sup>

Pada tahapan pertama metode penelitian sejarah yakni Heuristik (pengumpulan sumber). Heuristik adalah suatu usaha untuk menemukan dan mengumpulkan sumber-sumber sejarah. Pada tahapan ini, dalam penelitiannya penulis menggunakan sumber pustaka. Banyak kajian berupa buku terkait Reformasi Ekonomi RRC yang dapat dijadikan referensi serta pembanding untuk

---

<sup>25</sup> Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah: Edisi Kedua*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003), hlm. 81.

<sup>26</sup> Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2005), hlm. 90.

<sup>27</sup> Kuntowijoyo, *ibid.*

<sup>28</sup> Nurhadi Sasmita dkk., *op.cit.*, hlm.25.

penulis seperti halnya surat kabar sezaman seperti *Peking Review*, *Beijing Review* dan Kompas, buku seperti *Cina Quo Vadis? Pasca Deng Xiaoping* karya Umar Suryadi Bakri, *Reformasi Ekonomi RRC era Deng Xiaoping, Pasar bebas dan kapitalisme dihidupkan kembali* karya Poltak Partogi Nainggolan, selain itu juga ada *Jalan Menuju Sosialisme Sedunia* oleh Edvard Kardelj serta buku dari Robert F. Ash dan Y.Y . Kueh yang berjudul *The Chinese Economy Under Deng Xiaoping* sebagai sumber sekunder.

Serta Hasil Kongres Partai ke11-13 PKC dan gambar atau foto yang menunjukkan peristiwa yang bersangkutan sebagai sumber primer. Penggunaan sumber foto disamping memperkaya kisah sejarah, juga dapat membuka dan menawarkan topik baru untuk penelitian sejarah.<sup>29</sup> Sumber berupa foto ini didapat dari sejumlah laman yang diakses melalui internet dan surat kabar. Salah satu kelebihan foto adalah dapat memuat berbagai unsur kehidupan yang dapat dinarasikan secara lebih detail untuk menghasilkan paparan masa silam yang komprehensif. Bambang Purwanto menyatakan bahwa gambaran kehidupan sehari-hari lebih mudah ditemukan dalam bentuk visual.<sup>30</sup> Gambaran tersebut diperoleh dari peristiwa-peristiwa besar seperti Lompatan Jauh ke Depan, Revolusi Kebudayaan, Reformasi Ekonomi dan Peristiwa Tiananmen 1989. Foto-foto seperti kemajuan pembangunan ekonomi dan Peristiwa Tiananmen 1989 yang ditunjukkan dalam peristiwa tersebut memberi gambaran kondisi PKC dan RRC dalam rezim Deng Xiaoping.

Buku-buku serta surat kabar tersebut merupakan beberapa referensi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yang diperoleh dari beberapa perpustakaan di Universitas Jember, perpustakaan-perpustakaan di Jakarta juga Toko Buku di Jember dan Yogyakarta. Selain dari buku-buku tersebut sumber yang diperoleh juga berasal dari artikel-artikel dari internet seperti situs resmi kompasiana, marxist.org, *asian studies*, *beijingreview*, *chinatoday*, serta jurnal-jurnal luar

---

<sup>29</sup> Jean Gelman Taylor, "Aceh: Narasi foto, 1873–1930" dalam Henk Schulte Nordholt, Bambang Purwanto, Ratna Saptari (Editor), *Perspektif Baru Penulisan Sejarah Indonesia* (Jakarta: KITLV dan Yayasan Obor Indonesia, 2008), hlm. 321.

<sup>30</sup> Bambang Purwanto, "Menulis Kehidupan Sehari-hari Jakarta" dalam Henk Schulte Nordholt, Bambang Purwanto, Ratna Saptari (Editor), *Perspektif Baru Penulisan Sejarah Indonesia* (Jakarta: KITLV dan Yayasan Obor Indonesia, 2008), hlm. 250.

negeri dan surat kabar nasional maupun internasional yang berupa bahasan yang sama.

Tahap kedua dalam metode penelitian sejarah yakni kritik sumber yaitu proses mengumpulkan sumber-sumber yang telah diperoleh. Pada intinya, kritik sumber adalah menguji validasi sumber yang telah dihimpun.<sup>31</sup> Kritik sumber meliputi kritik ekstern dan kritik intern. Kritik ekstern menilai, apakah sumber itu benar-benar sumber yang diperlukan, dan sumber itu asli, turunan, atau mungkin palsu. Dengan kata lain, kritik ekstern menilai keakuratan sumber. Kritik intern menilai kredibilitas dan realibilitas data dalam sumber.<sup>32</sup> Tujuan utama kritik sumber adalah untuk menyeleksi data, sehingga diperoleh fakta. Setiap data sebaiknya dicatat dalam lembaran lepas (sistem kartu), agar memudahkan pengklasifikasiannya berdasarkan kerangka tulisan.

Tahapan Ketiga yakni Interpretasi (penafsiran). Setelah fakta untuk mengungkap dan membahas masalah yang diteliti cukup memadai, kemudian dilakukan interpretasi, yaitu penafsiran akan makna fakta dan hubungan antara satu fakta dengan fakta lain. Penafsiran atas fakta harus dilandasi oleh sikap obyektif. Kalaupun dalam hal tertentu bersikap subyektif, harus subyektif rasional, jangan subyektif emosional. Rekonstruksi peristiwa sejarah harus menghasilkan sejarah yang benar atau mendekati kebenaran. Untuk itu penulis mengkomparasikan berbagai literatur buku, surat kabar sezaman terkait juga artikel-artikel yang mempunyai bahasan yang sama serta hasil Kongres Partai dan foto-foto peristiwa besar sebagai analisis. Seperti halnya Kuntowijoyo yang membagi tahapan interpassi menjadi dua bagian yakni analisis dan sintesis. Pada prinsipnya analisis adalah upaya menemukan fakta dari sumber-sumber yang telah terkumpul. Sedangkan sintesis adalah menyatukan data-data yang ada untuk menemukan fakta tentang suatu peristiwa sejarah.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> Daliman, *Metode Penelitian Sejarah* (Yogyakarta: Ombak, 2012), hlm. 65.

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> Kuntowijoyo (2005), *loc.cit.*

Tahapan keempat yakni Historiografi yang merupakan merangkai fakta berikut maknanya secara kronologis atau diakronis dan sistematis, menjadi tulisan sejarah sebagai kisah. Kedua sifat uraian itu harus benar-benar tampak, karena kedua hal itu merupakan bagian dari ciri karya sejarah ilmiah, sekaligus ciri sejarah sebagai ilmu. Selain kedua hal tersebut, penulisan sejarah, khususnya sejarah yang bersifat ilmiah, juga harus memperhatikan kaidah-kaidah penulisan karya ilmiah umumnya. Model penulisan yang bersifat deskriptif analitis adalah bentuk penulisan yang berusaha memaparkan dan menjelaskan permasalahan yang dihadapi dengan menganalisis secara kritis terhadap sumber penulisan yang sudah diperoleh sehingga menghasilkan konstruk narasi yang dapat dipercaya kebenarannya. Dan mengadakan interpretasi dan pengkajian secara sistematis dengan kausalitas yang benar, sehingga menghasilkan suatu bentuk penulisan yang mendekati kebenaran dan objektif.

Kaedah penulisan dengan menggunakan 5 W 1 H (What, why, When, Where, Who dan How) menjadi metode yang efektif untuk mewujudkan penulisan yang ideal. Dengan demikian tidak hanya aspek deskriptif naratif saja yang akan disajikan, melainkan juga kausalitasnya yang mencakup lingkup waktu dan tempat sehingga mempertegas peristiwa yang menjadi kajiannya. Dalam penulisan sejarah ini penulis menggunakan beberapa prinsip dalam penulisan sejarah yang diungkapkan Sartono Kartodirjo mengenai struktur logis penulisan sejarah yakni:<sup>34</sup>

1. Kejadian atau peristiwa dinarasikan dalam urutan kronologis, dari awal sampai akhir.
2. Dari sekelompok fakta (peristiwa) perlu ada penentuan fakta kausal, fakta peristiwa dan fakta akibat. Seperti yang digambarkan dalam peristiwa Revolusi Kebudayaan Rezim Mao Zedong yang kemudian berlanjut pada Reformasi Ekonomi Era Deng Xiaoping sebagai bentuk penyebab kegagalan rezim Mao dalam urusan perekonomian dan

---

<sup>34</sup> Sartono Kartodirjo, *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1993), hlm. 60-62.

Peristiwa Tiananmen 1989 sebagai akibat dari tuntutan akan keterbukaan politik selama pelaksanaan Reformasi Ekonomi.

3. Uraian berupa deskriptif naratif perlu adanya proses serialisasi yakni mengurutkan peristiwa-peristiwa berdasarkan prinsip no.2.
4. Untuk memberi struktur kepada waktu maka perlu dilakukan periodisasi waktu berdasarkan kriteria tertentu, seperti ciri-ciri khas yang ada pada periode tertentu seperti yang digambarkan dalam rezim Mao Zedong dan Deng Xiaoping.
5. Dan suatu peristiwa dengan lingkup waktu dan ruang yang cukup besar sering memerlukan pembabakan atas episode-episode seperti gerakan sosial tentu mengalami masa awal penuh keresahan sosial, munculnya pemimpin dan ideologi, masa akselerasi konflik, konfrontasi, masa reda seperti yang digambarkan oleh kedua rezim di RRC. Pada rezim Deng Xiaoping kemunculan pemimpin, pergulatan politik internal dalam partai, munculnya alternatif ideologi Marxisme serta gerakan pro demokrasi merupakan episode-episode selama kepemimpinan Deng.

Seperti yang diuraikan diatas, kajian penulisan ini berupa kajian politik yang diuraikan secara kronologis dan bersifat deskriptif analitis. Sartono Kartodirjo mengungkapkan bahwa kebanyakan proses politik diungkapkan menurut satu dimensi yakni dimensi politik saja, hal tersebut digambarkan secara unidimensional dan tidak menggambarkan bagaimana konflik antargolongan muncul, bagaimana orientasi nilai golongan masing-masing, pengambilan keputusan kolektif, otoritas pemimpin untuk memobilisasi pengikut dan lain sebagainya.<sup>35</sup> Sebaliknya dalam penulisan ini penulis menggambarkan kondisi PKC rezim Deng Xiaoping dengan menyertakan perkembangan pembangunan ekonomi, pergulatan politik internal PKC sebagai anak masalah dengan memberi gambaran munculnya konflik antar golongan, orientasinya, pengambilan keputusan serta otoritas partai dan Deng Xiaoping dalam memobilisasi dua faksi dalam kepemimpinannya.

---

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm. 46-47.

### **1.8 Sistematika Penulisan**

Sistematika Penulisan dalam tulisan ini, seperti kebanyakan penulisan skripsi, tulisan terdiri dari 4 bab. Penulisan bab pertama, di dalamnya meliputi pandangan umum tentang tulisan yang dituangkan dalam judul dan karya penulis dengan bab 1 yakni pendahuluan. Dalam bab 1 pendahuluan ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, ruang lingkup, tinjauan pustaka, pendekatan dan kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab 2 berjudul PKC Rezim Mao Zedong yang terdiri dari tiga sub bab yakni sub bab pertama berupa 2.1 Sejarah Singkat PKC dan sub bab kedua berupa RRC dan PKC di bawah Mao Zedong yang terdiri dari 4 anak sub bab yakni anak sub bab pertama 2.1.1 Mao Zedong Sebagai Pemimpin RRC dan PKC, anak sub bab kedua 2.1.2 Pembangunan Sosialis Karakteristik Cina, anak sub bab ketiga 2.1.3 Politik Luar Negeri RRC 1949-1976 dan anak sub bab keempat 2.1.4 Kebijakan Politik Dalam Negeri RRC 1956-1960. Sub bab kedua yakni 2.2 Revolusi Kebudayaan Rezim Mao Zedong terdiri dari dua anak sub bab berupa 2.2.1 Tercetusnya Revolusi Kebudayaan dan 2.2.2 Jalannya Revolusi Kebudayaan 2.2.3 Implikasi Terhadap Kondisi Politik Dan Ekonomi RRC. Pada bab 2 ini adalah bahasan tentang rezim Mao Zedong yakni masa kepemimpinan sebelum Deng Xiaoping yang nantinya akan menjadi pengantar atau dasar kepemimpinan Deng Xiaoping.

Pembahasan selanjutnya adalah Bab 3 yang berjudul PKC Dalam Reformasi Ekonomi RRC Era Deng Xiaoping yang terdiri dari empat sub bab yakni diantaranya sub bab pertama 3.1 Kepemimpinan Deng Xiaoping dalam PKC yang terdiri dari tiga anak sub bab yakni anak sub bab pertama berupa 3.1.1 Reformasi Ekonomi RRC 1978, anak sub bab kedua berupa 3.1.2 Kondisi perekonomian RRC pasca Reformasi Ekonomi 1978 dan anak sub bab ketiga berupa 3.1.3. Peranan kaum Pragmatis dalam Reformasi Ekonomi Sedangkan sub bab kedua yakni 3.2 Deng Xiaoping Berkuasa Dalam Pemerintahan. Dan sub bab ketiga berupa 3.3 Pergulatan Politik Internal PKC Rezim Deng Xiaoping, yang terdiri dari dua anak sub bab diantaranya sub bab 3.3.1 Dinamika Pergulatan

Politik Internal PKC yang terdiri dari 3.3.1.1 Kebijakan dalam Kepemimpinan Deng Xiaoping dan 3.3.1.2 Dominasi Pengaruh dalam Internal PKC dan anak sub bab kedua yakni 3.3.2. Pengaruh Pergulatan Politik Internal PKC Terhadap Partai. Sedangkan sub bab keempat berupa 3.4 Pengaruh Kebijakan Ekonomi Sosialis Era Deng Xiaoping. Dan Bab 4 adalah kesimpulan yang merupakan bagian akhir dari tulisan ini. Bagian ini berupa kesimpulan dari semua bab yang disajikan sekaligus menjawab rumusan masalah yang disajikan oleh penulis.



## BAB 2

### PKC REZIM MAO ZEDONG

#### 2.1 Sejarah Singkat PKC

Partai Komunis Cina (PKC) adalah salah satu partai komunis terbesar di dunia. Partai tersebut merupakan bagian dari perjalanan negara Cina yang menjadi satu kesatuan dalam sebuah sistem yang disebut dengan negara komunis. Pada Mei 1920 PKC berdiri sebagai salah satu partai yang ikut aktif memperjuangkan RRC sebagai sebuah negara yang bertransformasi dari feodalisme menuju sebuah negara demokrasi baru atas saran dan dukungan yang diberikan oleh Rusia dan Komintern. PKC berawal dari sebuah kelompok belajar radikal kecil yang berada di pusat kota-kota besar di RRC. Berbeda dengan Rusia, dimana partai komunis tiba-tiba didirikan menggunakan kekuatan sendiri atau di Eropa Timur dimana rezim komunis berdiri sebagai kekuatan pemerintah, PKC mendapatkan kekuasaan melalui perjuangan yang panjang untuk memperoleh kekuatan nasional.<sup>1</sup> Hal tersebut dibuktikan dengan perjuangan PKC selama peperangan dengan Jepang pada 1937-1945, dan perang saudara dengan kaum nasionalis pada

---

<sup>1</sup> Tony Saich, "The Communist Party of China", Encyclopedia Americana vol . 7 (New York: Grolier Incorporated, 1998), 444-445.

1927-1937 dan 1945-1949. Pertempuran antara PKC dan Koumintang terjadi sejak 1927, namun dalam rangka bekerjasama melawan Jepang pada 1937-1945 keduanya memilih melakukan kerjasama dalam mengalahkan Jepang. Pengalaman tersebut banyak berdampak terhadap kondisi setelah 1949.

Sejak pertengahan 1920, PKC menganut prinsip kediktatoran demokrasi rakyat dengan meletakkan posisi kelompok bawah menjadi tingkat yang lebih tinggi dan prinsip individu diubah menjadi sistem kolektif. Dan dalam prinsip tersebut, 3 juta organisasi pokok partai yang terdapat dalam struktural partai mulai dari tingkat pusat sampai daerah berada di bawah Kongres Nasional Partai yang diadakan 5 tahun sekali di Beijing.<sup>2</sup> Menurut Anggaran Dasar partai, Kongres Partai merupakan badan tertinggi dalam pengambilan keputusan. Pelaksanaan Kongres Partai selama 1921-1992 banyak menghasilkan keputusan dan regenerasi kader partai yang menunjukkan kondisi dan perkembangan PKC.

Kepemimpinan dalam PKC dimulai oleh Chen Duxiu pada 1921, Mao Zedong pada 1949-1976 dan Deng Xiaoping pada 1977-1992. Mao Zedong merupakan pemimpin generasi pertama setelah berdirinya Cina sebagai RRC pada 1949, dan Deng Xiaoping merupakan gerasi kedua yang dimulai pada 1977 setelah meninggalnya Mao. Kepemimpinan resmi dalam PKC terdapat pada Kongres Partai ke-1 sampai Kongres Partai ke-13. Berikut hasil-hasil Kongres Partai selama 1921-1987:<sup>3</sup>

1. Kongres Partai ke-1, 23-31 Juli 1921.

Kongres Partai ke-1 yang diadakan pada 23-31 Juli 1921 di Shanghai, tepatnya di danau Nanhui provinsi Zhejiang menghasilkan beberapa keputusan seperti pengangkatan Chen Duxiu sebagai sekjen pertama. Kongres tersebut dihadiri oleh 2 delegasi Komintern dan 12 delegasi dari beberapa daerah yakni Mao Zedong, Dong Biwu, Li Da, Liu Renjing, Wang Jinmei, Chen Gongbo, He Shuheng, Chen Tanqiu, Zhanng Guotao, Deng Enming dan Zhou Fohai dengan jumlah anggota partai lebih dari 50. Pada kongres tersebut Mao merupakan delegasi dari wilayah Hunan. Pembahasan yang dilakukan

---

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> “Chinese Communist Party Information”, dalam <http://www.chinatoday.com>.

dalam kongres tersebut meliputi penyetujuan program pertama partai dan menetapkan nama PKC secara resmi. Keputusan lain yang dihasilkan dalam Kongres Partai ke-1 yakni Zhang Guotao ditunjuk sebagai Kepala Organisasi dan Li Da sebagai Kepala Propaganda.<sup>4</sup>

2. Kongres Partai ke-2, 16-23 Juli 1922

Kongres Partai ke-2 pada 16-23 Juli 1922 bertempat di Shanghai dengan dihadiri oleh 12 delegasi dengan jumlah anggota partai 195. Kongres tersebut membahas mengenai persetujuan dan memberikan deklarasi yang meliputi situasi dunia, semi kolonial dan semi feodal masyarakat Cina, motif kekuatan dan sasaran revolusi Cina, dan merumuskan program-program partai. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah Cina modern, partai memutuskan 4 program mengenai revolusi demokrasi, penentangan imperialisme dan feodalisme, dan secara tegas menjalankan tugas negara dan orientasi dari revolusi Cina, serta menyetujui konstitusi PKC. Selain itu, kongres tersebut menghasilkan anggota elit Komite Sentral yang terdiri dari Chen Duxiu, Zhang Guotao, Cai Hesen, Li Dazhao, Gao Junyu, Deng Zhongxia dengan Chen Duxiu sebagai ketua Komite Sentral.

3. Kongres Partai ke-3, 12-20 Juni 1923

Kongres Partai ke-3 dilaksanakan pada 12-20 Juni 1923 dan bertempat di wilayah Guangzhou provinsi Guangdong. Pada kongres tersebut terdapat 30 lebih delegasi yang hadir sebagai perwakilan dari masing-masing daerah, dengan keseluruhan anggota partai sebanyak 420. Pembahasan yang terdapat dalam Kongres Partai ke-3 meliputi pembentukan front persatuan atas kerjasama Komunis dan Koumintang yang disetujui oleh Komintern pada 12 Januari 1923. Serta menetapkan beberapa anggota Komite Sentral seperti Mao Zedong, Chen Duxiu, Luo Zhanglong, Cai Hesen, Tan Pingshan dan Chen Duxiu ditunjuk sebagai ketua.

4. Kongres Partai ke-4, 11-22 Januari 1925

Kongres Partai ke-4 yang dilaksanakan pada 11-22 Januari 1925 bertempat di Shanghai dengan dihadiri oleh 20 delegasi. Anggota partai pada 1925

---

<sup>4</sup> *People's Daily* (online), Juli 1921.

berjumlah 994 orang, hal tersebut menunjukkan bahwa selama 4 tahun terakhir anggota partai mengalami peningkatan yang cukup masif. Pada kongres ke-4, para delegasi membahas terkait analisa terhadap perbedaan peran dari berbagai kelas dalam masyarakat Cina pada gerakan revolusioner nasional. Hal tersebut menggambarkan bahwa pentingnya kepemimpinan proletariat dan kerjasama antara buruh atau pekerja dengan petani. Selain itu dalam kongres tersebut juga menghasilkan anggota Komite Sentral yang baru seperti Chen Duxiu, Zhang Guotao, Peng Shuzhi, Cai Hesen dan Qu Qiubai.

5. Kongres Partai ke-5, 27 April-9 Mei 1927

Kongres Partai ke-5 dilaksanakan pada 27 April-9 Mei 1927 di wilayah Wuhan, provinsi Hubei dengan dihadiri oleh 80 delegasi. Pada 1927 PKC memiliki jumlah anggota sebanyak 57.967 dan merupakan kaderisasi dengan jumlah anggota tertinggi setelah berdirinya partai pada 1920. Dalam kongres tersebut Chen Duxiu dikritik karena penyimpangannya terhadap garis politik partai seperti kelalaiannya dalam merebut kepemimpinan revolusioner atas kaum borjuis dalam hal ini Koumintang. Serta merencanakan program revolusi agraria dan membangun kekuatan demokrasi yang revolusioner di pedesaan. Kongres Partai ke-5 menghasilkan 29 kader terpilih sebagai anggota Komite Sentral dan 10 kader sebagai anggota pengganti dengan Chen Duxiu sebagai sekjen.

6. Kongres Partai ke-6, 18 Juni-11 Juli 1928

Kongres Partai ke-6 dilaksanakan pada 18 Juni-11 Juli 1928 di Moskow dengan dihadiri oleh 84 delegasi ditambah 34 delegasi pengganti dengan anggota partai berjumlah lebih dari 40.000. Tugas utama dalam kongres tersebut yakni menyimpulkan pengalaman yang dapat dipelajari atas kegagalan revolusi terbesar pertama (Juni 1923-Juli 1927), menganalisa dasar revolusi, situasi politik, memimpin dasar dan politik partai selama periode baru untuk mempersatukan seluruh gagasan partai dan mengembangkan kekuatan revolusioner. Kongres tersebut menghasilkan 23 anggota Komite Sentral dan 13 anggota pengganti, dengan Xiang Zhongfa, Zhou Enlai, Su

Zhaozheng, Xiang Ying, Qu Qiubai, Zhang Guotao and Cai Hesen terpilih sebagai anggota Politbiro dan Xiang Zhongfa sebagai sekjen.

7. Kongres Partai ke-7, 23 April-11 Juni 1945

Kongres Partai ke-7 dilaksanakan pada 23 April-11 Juni 1945 di wilayah Yan'an, provinsi Shaanxi dengan dihadiri 544 delegasi dan 208 delegasi pengganti. Pada kongres tersebut keseluruhan jumlah anggota partai berjumlah 1,21 Juta. Dalam kongres tersebut Mao Zedong terpilih sebagai ketua partai dan pada saat yang sama konstitusi partai diloloskan. Mao banyak berjasa selama pelaksanaan *Long March* pada 1935-1934, partisipasi aktif Mao selama perlawanan terhadap Koumintang membawanya sebagai kader partai yang dipertimbangkan.

8. Kongres Partai ke-8, 15-27 September 1956

Kongres Partai ke-8 dilaksanakan pada 15-27 September 1956 di Beijing dengan dihadiri oleh 1.026 delegasi dan 107 delegasi pengganti. Pada kongres tersebut jumlah anggota partai keseluruhan tercatat 10,37 juta kader. Kongres Partai ke-8 merupakan kongres pertama setelah Cina berdiri sebagai Republik Rakyat Cina (RRC) pada 1949. Selama kongres, Mao Zedong memberikan pidato pembukaan, Liu Shauqi menyampaikan laporan politik dan Zhou enlai menyampaikan Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) kedua (1958-1962) dalam rangka mengembangkan perekonomian negara. Kongres tersebut menghasilkan 97 anggota Komite Sentral yang baru terpilih dan 73 anggota pengganti. Pada Sidang Pleno ke-1 dalam Komite Sentral ke-8 PKC orang-orang baru yang terpilih yakni Mao Zedong sebagai ketua Komite Sentral, dengan Zhou Enlai, Liu Shaoqi, Zhu De and Chen Yun sebagai wakil ketua dan Deng Xiaoping sebagai sekjen. Dan keenam anggota tersebut juga menjabat sebagai anggota Komisi Tetap Politbiro.

9. Kongres Partai ke-9, 1-24 April 1969

Kongres Partai ke-9 dilaksanakan pada 1-24 April 1969 di Beijing dengan dihadiri oleh 1.512 delegasi dan keseluruhan anggota partai pada kongres tersebut tercatat sebanyak 22 Juta. Tidak banyak hal penting yang dilakukan selama kongres tersebut, karena PKC banyak mengalami penderitaan selama

Revolusi Kebudayaan, Komite Partai di provinsi, daerah otonom dan berbagai organisasi partai tidak dipulihkan atau didirikan serta anggota partai yang belum melaksanakan tugas dalam partai seperti biasanya. Pada kongres tersebut mengesahkan teori dan praktek mengenai Revolusi Kebudayaan dan menegaskan posisi Lin Biao dan Jiang Qing dalam Komite Sentral. Selain itu kongres juga menghasilkan 170 anggota baru dipilih, 109 anggota pengganti dalam Komite Sentral. Dan Mao Zedong dipilih sebagai ketua dengan Lin Biao sebagai wakil ketua dalam Komite Sentral.

10. Kongres Partai ke-10, 24-28 Agustus 1973

Kongres Partai ke-10 dilaksanakan pada 24-28 Agustus 1973 di Beijing dengan dihadiri oleh 1.249 delegasi dan anggota keseluruhan partai dalam kongres tersebut tercatat sebanyak 28 Juta. Pada kongres tersebut kekuasaan kelompok empat yang terdiri dari Jiang Qing, Yao Wenyan, Zhang Chungqiao, dan Wang Hongwen semakin luas dengan menjadi anggota Politbiro dan Komite Sentral. Sedangkan Lin Biao diturunkan dari jabatannya karena dianggap kontra-revolusioner dengan berusaha melakukan kudeta terhadap Mao Zedong. Kongres Partai ke-10 menghasilkan terpilihnya 195 anggota dan 124 anggota pengganti dalam Komite Sentral. Pada Sidang Pleno ke-1 dalam Komite Sentral ke 10, Mao Zedong terpilih sebagai ketua dengan Zhou Enlai, Wang Hongwen, Kang Sheng, Ye Jianying and Li Desheng sebagai wakil ketua dalam Komite Sentral PKC. Serta terpilihnya anggota Komite Tetap Politbiro yang terdiri dari Mao Zedong, Wang Hongwen, Ye Jianying, Zhu De, Li Desheng, Zhang Chunqiao, Zhou Enlai, Kang Sheng and Dong Biwu.

Kongres Partai ke-11 sampai Kongres Partai ke-13 menunjukkan kondisi kepemimpinan Deng Xiaoping dan dua faksi dalam koalisi pemerintahannya. Setelah kepemimpinan Chen Duxiu, Mao Zedong merupakan pemimpin generasi pertama setelah berdirinya RRC pada 1949 dan Deng Xiaoping merupakan pemimpin generasi ketiga. Kepemimpinan Deng Xiaoping secara garis besar digambarkan dengan kondisi RRC dan PKC pada 1977-1992.

## 2.2 RRC dan PKC di bawah Mao Zedong

RRC secara resmi berdiri sebagai sebuah negara komunis setelah kemenangan Komunis yang dipimpin oleh Mao atas Koumintang yang dipimpin oleh Chiang Kai Shek. Mao Zedong sebagai pemimpin dalam partai merasa bertanggung jawab atas kemajuan RRC sebagai salah satu negara yang sukses membawa komunisme di Asia. Perjalanan karirnya sebagai salah satu punggawa partai sepanjang sejarah digambarkan dengan kondisi RRC dari 1949-1976. Kepemimpinan Mao Zedong dapat kita lihat dari beberapa aspek seperti struktural partai ketika ia berdiri sebagai seorang ketua dan kebijakan-kebijakan yang diterapkan. Ketika era komunisme dimulai di RRC, Uni Soviet menjadi salah satu sekutu terbesarnya, menyusul kemudian ada Korea Utara dan beberapa negara lainnya seperti Vietnam. Pada dasarnya Uni Soviet adalah sekutu bagi negara komunis yang baru terbentuk. Anggapan bahwa Uni Soviet adalah pusat komando tempat komunisme dilahirkan dan menjadi pedoman bagi negara-negara komunis lainnya, menjadikan RRC menginginkan komunisme di negaranya menjadi salah satu yang diperhitungkan oleh seluruh negara di dunia. Secara khusus Mao Zedong menekankan bahwa sangat penting bagi RRC untuk meniru konsep revolusi seperti yang terjadi pada Rusia yang berhasil mendirikan negara komunis pertama di dunia. Oleh sebab itu doktrin Sosialisme-Komunisme yang diadopsi dari ajaran Marxisme-Leninisme menjadi landasan sikap perjuangan RRC. Ternyata dalam sejarah perkembangannya, konsep revolusi Rusia yang diadopsi oleh RRC terbukti gagal karena kondisi negara yang berbeda seperti halnya basis massa. Bentuk kegagalan tersebut kemudian menjadi sebuah bentuk perjuangan baru RRC dalam mewujudkan pembangunan sosialisnya melalui wujud komunisme yang disesuaikan dengan karakteristik Cina.

Mao Zedong memiliki sudut pandang tersendiri dalam memahami Marxisme. Salah satu keberhasilan yang diperolehnya adalah ketika dirinya mampu menerapkan ideologi tersebut berbeda dengan yang ada di Uni Soviet. Perbedaannya terletak dari penerapan ideologi komunisme dalam beberapa aspek. Lebih rincinya, Marxisme bukan hanya menyoalkan buruh dan kehidupan komunal masyarakat sosialis, melainkan Marxisme yang menyeluruh dengan

karakter Cina. Ketua Mao tampil sebagai seorang yang ingin disejajarkan dengan Marx dan Lenin. Hampir semua tokoh yang mengawali gerakan Marxis di RRC, seperti Chen Duxiu, Qu Qiubai dan Li Lisan, kecuali Li Dazhao, merupakan penganut doktrin Marxisme Klasik yang percaya bahwa kelas buruh adalah inti gerakan komunis.<sup>5</sup> Kesan kaku dan dogmatis atas doktrin Marxisme tersebut menjadi salah satu faktor bahwa buruh bukan satu-satunya subyek penggerak revolusi. Transisi RRC dari kekuasaan dinasti menuju kekuasaan demokrasi baru di bawah kediktatoran demokrasi rakyat yang dipimpin kelas pekerja,<sup>6</sup> atau yang lebih dikenal dengan istilah *Diktatur Proletariat*<sup>7</sup> dalam negara komunis. Ada 4 faktor yang menjadi pertimbangan atas Teori Maoisme tentang Komunisme yakni:

“Doktrin tentang peran desa lebih penting daripada peran kota, hal ini karena sebagian besar wilayah Cina merupakan wilayah agraris. 2) Doktrin bahwa *Tentara Merah* lebih penting daripada aksi massa. 3) Doktrin tentang semangat revolusi lebih penting daripada keahlian khusus. 4) Doktrin bahwa kekuatan subjektif lebih penting daripada kekuatan objektif.”<sup>8</sup>

Keempat doktrin tersebut juga sejalan dengan ciri-ciri Maoisme yakni Unsur Tani dan Komunisme Cina yakni dukungan revolusi berasal dari kaum tani, Revolusi berdasarkan Empat Kelas yang terdiri dari kaum proletar atau buruh, kaum petani, kaum intelektual borjuis kecil dan golongan kapitalis kecil menengah sebagai kesatuan revolusioner dan Unsur Gerilya yakni pembentukan tentara gerilya yang berasal dari kaum petani untuk menghadapi kekuatan musuh

---

<sup>5</sup> Priyanto, Wibowo, *Perubahan Sosial Cina Tahap Pertama: Mao dan Pedesaan (1949-1959)*, (Jakarta: Wedatama WidyaSastra, 2008), hlm. 2.

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 1.

<sup>7</sup> *Diktatur Proletariat*, dalam konsep ini negara bertugas merealisasikan sebuah masyarakat yang dianggap sebagai ujung terakhir dari proses sejarah, yakni masyarakat egalitarian, yang juga dikenal sebagai masyarakat komunis. Dalam masyarakat ini tidak ada lagi eksploitasi, karena semua diatur secara bersama. Tidak ada lagi kepemilikan modal (alat produksi) secara pribadi, baik individu maupun kelompok. Pada dasarnya dalam konsep ini, negara dikuasai oleh kelas ploterariat. Arief Budiman, *Teori Negara: Negara, Kekuasaan, dan Ideologi*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1996), hlm. 21-23.

<sup>8</sup> Agus Setiawan, “Pengaruh Modernisasi Ekonomi Era Deng Xiaoping dan Jiang Zemin Terhadap Partai Komunis Cina”, *skripsi* tidak diterbitkan, Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Jember, 2004, hlm. 112.

(Koumintang). Dalam aksinya Mao banyak menerapkan kebijakan-kebijakan yang radikal dan terkadang memaksakan. Propaganda-propaganda yang diluncurkan sekitar tahun-tahun kepemimpinannya sebagai ketua merupakan bukti keradikalannya. Beberapa di antaranya yang sangat terkenal seperti Gerakan Seratus Bunga, Lompatan Jauh ke Depan dan Revolusi Kebudayaan. RRC banyak disoroti oleh dunia ketika terjadi banyak bencana kelaparan bahkan kematian karena gerakan-gerakan radikal yang dipaksakan oleh sang ketua.

Sejak PKC berdiri, Mao yang sudah lama berkecimpung dalam partai merupakan salah satu yang sukses membangun komunisme di RRC. Ketua yang memilih konsep kepemimpinan radikal ini banyak memfokuskan jalan perjuangan RRC menggunakan tenaga petani. Kondisi RRC yang sebagian besar terdiri dari wilayah agraris, menjadi salah satu sumber untuk prospek bidang pertanian, selain perkembangan industri. Kemauan yang besar serta mimpi Mao untuk RRC bukan sekedar angan-angan. Hal ini digambarkan dengan kepemimpinannya ketika banyak melakukan kampanye serentak di seluruh wilayah RRC. Salah satunya peningkatan produksi gandum, beras bahkan besi untuk menyamai Inggris dalam jangka waktu 15 tahun setelah dilaksanakannya kampanye Lompatan Jauh ke Depan pada 1958. Konsep kolektivisasi yang kemudian dikenal dengan sistem komunal adalah sebuah konsep administratif yang diperuntukkan kepada rakyat Cina.<sup>9</sup> Secara garis besar inti dari Maoisme yang terdapat dalam Kutipan *The Little Red Book* yakni Revolusi permanen, perjuangan yang keras dan fokus pada petani ketimbang pekerja kota.<sup>10</sup>

Selain kebijakan-kebijakan yang mengiringi kepemimpinan Mao Zedong, dalam struktural partai baik sebagai kepala negara maupun ketua partai merupakan komponen penting. Pejabat-pejabat yang mengiringi era-nya adalah bagian dari kebijakan dan keberlangsungan negara serta partai. Orang-orang partai seperti halnya Zhou Enlai, Liu Shaoqi dan juga Deng Xiaoping adalah bagian dari

---

<sup>9</sup> Frank, Dikotter, *Kelaparan Hebat Di Masa Mao, Sejarah Bencana paling Dahsyat Di China 1958-1962*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2010), hlm. 72.

<sup>10</sup> Andrew Taylor, "Kutipan Mao Zedong (1964)", dalam *Ensiklopedi Buku-Buku Yang Mengubah Dunia, Lebih Dari 50 Buku Yang Paling Berpengaruh Dalam Sejarah Manusia*, (Jakarta: Erlangga. 2012), hlm. 192.

perjalanan Mao Zedong sebagai seorang pemimpin. Salah satu faktor keberhasilan Mao juga tercermin dari struktural partai yang dibawahinya. Hal ini terlihat dari perjalanan karir Mao semenjak awal RRC dan PKC berdiri:

**Table 2.1**  
**Karir Politik Mao Zedong**

No.	Jabatan	Masa Jabatan	Keterangan
1.	Presiden RRC	27 September 1954-27 April 1959.	Didahului : - Digantikan : Liu Shaoqi.
2.	Ketua dari Komite Sentral PKC Ke-1.	19 Juni 1954-9 September 1976.	Didahului : Mao Zedong (Sebagai Ketua Politbiro) Digantikan : Hua Guofeng Deputi : Liu Shaoqi Lin Biao Zhou Enlai Hua Guofeng
3.	Ketua Dari Politbiro Sentral PKC.	20 maret 1943-20 April 1969.	Didahului : Zhang Wentian (Sebagai Sekretaris Jenderal Komite Sentral). Digantikan : Mao Zedong (Sebagai Ketua Komite Sentral).
4.	Ketua BPK Militer Pusat Ke-1.	23 Agustus 1945-1949 8 September 1954-9 September 1976	Didahului : - Digantikan : Hua Guofeng
5.	Ketua Komite Nasional CPPCC Ke-1.	21 September 1949-25 Desember 1954 25 Desember 1954-9 September 1976	Didahului : - Digantikan : Zhou Enlai
6.	Anggota Kongres Rakyat Nasional.	15 September 1954-18 April 1959 21 Desember 1964-9 September 1976	Konstituensi : Beijing At-Large.

Sumber : <http://id.wikipedia.org>

RRC dan PKC merupakan satu-kesatuan, sehingga dalam hal ini urusan negara sepenuhnya merupakan kewenangan dan tanggungjawab partai. Mao Zedong yang juga banyak memegang jabatan dalam partai mempunyai peranan penting dalam mengatur keperluan negara. Hal itu terbukti dengan banyak terlibatnya ketua dengan serangkaian propaganda yang dilakukan pada 1958an untuk melancarkan rencana awal keberhasilan yang ingin dicapai RRC dalam jangka waktu 15 tahun. Kegagalan-kegagalan Mao dan RRC dalam mewujudkan

hal tersebut, justru membawa keterpurukan baru bagi negara atas jumlah kelaparan, kematian bahkan kerugian yang semakin melebarkan kemiskinan di RRC.

### 2.2.1 Mao Zedong Sebagai Pemimpin RRC dan PKC

Kepemimpinan Mao Zedong yang revolusioner terlihat sejak perang revolusi di RRC berlangsung, perselisihan dengan Koumintang serta perang dengan Jepang menjadikan Mao sosok pemimpin bercirikan radikal-revolusioner. Keberadaannya sebagai seorang kepala negara dan ketua partai sekaligus menjadi pembuktiannya dalam sejarah perkembangan komunisme di RRC. Kesatuan antara negara dan partai tidak membawa banyak perbedaan atas kebijakan-kebijakan politik yang diterapkan oleh Mao. Secara garis besar Mao lebih banyak menuangkan gagasan dan tindakannya melalui propaganda politik berupa kampanye dan gerakan politik lainnya, yang juga menjadi ciri khasnya dalam melakukan gebrakan baru bagi komunisme di RRC. Gebrakan baru tersebut bukan saja sebuah tindakan revolusioner melainkan penerapan kekuasaan versi Mao yang menyebut dirinya sebagai *Great Helmsman (Nahkoda Agung)* dalam mempertahankan kultus individu RRC.<sup>11</sup> Kecenderungan pemimpin-pemimpin seperti Adolf Hitler (Jerman), Kim Il Sung (Korea Utara), Joseph Stalin (Rusia) serta Mao Zedong (RRC), ciri khas kepemimpinan yang dibentuk tidak bergantung pada keagungan yang dibentuk tetapi lebih kepada penerapan kekuasaan yang tak terbatas, mekanisme kendali dan terutama manipulasi media massa yang diwujudkan menjadi sebuah citra, suara dan pemikiran pemimpinnya.<sup>12</sup>

Pada 1949 Mao Zedong secara resmi memproklamkan Cina sebagai sebuah negara republik dan menjadi pemimpin negara. Pada saat yang bersamaan, Mao juga memegang posisi tertinggi dalam partai. Setelah RRC mengalami beberapa tahapan revolusi mulai dari revolusi Cina 1919 sampai pada revolusi demokrasi ke sosialisme yang ditandai dengan perang antara kaum nasionalis (Koumintang) dan kaum komuni, Mao selalu berada pada garda terdepan.

---

<sup>11</sup> Andrew Taylor, *op.cit.*, hlm. 193.

<sup>12</sup> *Ibid.*

Perjuangannya yang masif dan tak kenal kompromi melawan beragam pikiran reaksioner dan oportunist di luar dan dalam partai, membuktikannya sebagai seorang tokoh besar dalam persebaran komunisme di RRC. Awal karir Mao dimulai ketika dirinya berada di perguruan tinggi sebagai seorang mahasiswa Universitas Beijing. Mao ditunjuk menjadi perwakilan untuk menghadiri kongres partai komunis pertama Komintern di Uni Soviet. Mao memulai karirnya menjadi organisator partai dan menunjukkan kemasifannya terutama dalam menyebarkan ajaran Marxisme-Leninisme. Pembuktiannya sebagai seorang organisator partai berujung pada kemenangan komunis atas kaum nasionalis yang terus berupaya menyingkirkan komunis, yang puncaknya terjadi pada peristiwa *Long March*. Peristiwa *Long March* merupakan titik balik kebesaran komunis dan Mao Zedong di RRC. Perjalanan sejauh 90.000 Km selama 1 tahun dengan membawa massa sebanyak 100 ribu orang dan hanya tersisa sebanyak 20 ribu untuk menghindari serangan Koumintang tersebut membawa RRC lebih dekat dengan Uni Soviet, dan mampu memperluas ajaran komunis serta berhasil menghindar dari ancaman kaum nasionalis.<sup>13</sup>

Gebrakan-gebrakan baru yang selalu dihadirkan oleh Mao menjadi salah satu ciri khas kepemimpinannya. Gebrakan awal yang dilakukan Mao terhadap RRC yakni *landreform* (pembaharuan sistem kepemilikan tanah), sebagai dasar terbentuknya kolektivisasi pertanian. Kepemilikan tanah yang sifatnya masih menganut sistem produksi feodalis dan kapitalis sebagai warisan lama menggerakkan Mao melakukan *landreform*. Gerakan *landreform* tersebut meliputi pendistribusian kembali tanah kepada petani-petani miskin serta membentuk petugas agitator yang dikirim ke setiap desa di seluruh wilayah RRC untuk menggolongkan masyarakatnya berdasarkan kepemilikan tanah individu.<sup>14</sup> Hal ini dianggap efektif sebagai tahapan akhir dari revolusi sosialis sebagai bentuk keberhasilan atas pendistribusian kekayaan pada rakyat secara merata. Sebaliknya gerakan ini justru memunculkan kampanye-kampanye lain setelahnya yang justru lebih radikal dan menimbulkan korban. Terbukti selama kampanye *landreform*

---

<sup>13</sup> Leo Agung S., *Sejarah Asia Timur 2*, (Yogyakarta: Ombak, 2012), hlm. 15-17.

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 38.

berlangsung, tercatat 2 juta orang yang dihukum mati dan diadili atas kesalahannya sebagai penindas rakyat seperti tuan tanah atau petani kaya.<sup>15</sup> Selama kepemimpinannya dalam partai dan negara, Mao selalu mengutamakan mobilisasi massa dan mengerahkannya untuk pembangunan sosialis yang revolusioner. Bentuk mobilisasi massa ini diwujudkan dengan adanya berbagai kampanye politik selama masa kepemimpinannya seperti *landreform*, Pelita pertama, Gerakan Seratus Bunga, Lompatan Jauh ke Depan sampai Revolusi Kebudayaan yang merupakan gelombang penghancuran budaya terbesar di RRC pada abad 20.

Sebagai salah satu pendiri PKC, Mao menjalin kerjasama dengan Uni Soviet terutama dalam bidang ekonomi dan militer yang diwujudkan dalam perjanjian Tiongkok-Soviet pada Februari 1950.<sup>16</sup> Hubungan kerjasama tersebut kemudian menjadi dasar politik luar negeri RRC untuk 10 tahun ke depan. Pada prinsipnya, garis besar politik luar negeri RRC selama kepemimpinan Mao menekankan kerjasama dengan negara-negara sosialis lainnya dan juga negara borjuasi nasional. Untuk dalam negeri, Mao menekankan pembangunan sosialis yang revolusioner, sebagai bentuk pembuktian akan kemenangan dan perkembangan komunisme di bawah kepemimpinan Mao.

### 2.2.2 Pembangunan Sosialis Karakteristik Cina

Ajaran Marxisme yang tersebar luas di RRC dipelajari oleh Mao ketika menjadi seorang mahasiswa. Bagi Mao, Marxisme merupakan salah satu alat perjuangan yang dapat mewujudkan cita-citanya dalam melawan imperialisme dan kapitalisme di RRC. Sama seperti Lenin, Mao juga menyesuaikan Marxisme dengan kondisi yang dihadapinya dan jika pandangan Lenin adalah tanpa teori revolusioner tidak mungkin akan ada gerakan revolusioner,<sup>17</sup> Mao juga

---

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> Donald W. Klein (Coauthor of “Biographic Dictionary of Chinese Communism”), “Mao Tze Tung” dalam *Encyclopedia Americana* vol . 18 (New York: Grolier Incorporated, 1998), hlm 273-274.

<sup>17</sup> Franz Magnis Suseno, *Dari Mao Ke Marcuse: Percikan Filsafat Marxis Pasca Lenin*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013), hlm. 99.

berpandangan bahwa praksis merupakan tolak ukur kebenaran.<sup>18</sup> Sebaliknya kondisi di setiap negara sosialis berbeda, menggunakan perspektif Marxisme secara dogmatis terhadap seluruh negara sosialis juga bukan merupakan solusi yang tepat. Bahkan perubahan zaman juga menjadi pertimbangan, situasi yang dihadapi Mao sangat berbeda dengan situasi yang dihadapi oleh Lenin di Rusia beberapa tahun sebelumnya.<sup>19</sup> Karakteristik RRC ditinjau dari situasi historis Cina, terdapat tiga dimensi yang strategis di dalamnya, yakni:

“Pertama dimensi global, Mao memandang sosialisme sebagai kekuatan melawan hegemoni global kapitalisme internasional. Dimensi kedua adalah dunia ketiga, di dunia ketiga kapitalisme bukan suatu perkembangan internal, melainkan alat hegemoni asing. Maka sosialisme bagi Mao merupakan sarana untuk mematahkan hegemoni asing dan mengembalikan kedaulatan Cina atas dirinya sendiri. Dimensi ketiga adalah dimensi nasional. Kapitalisme, dengan menginkorporasikan Cina ke dalam cakupannya, mewujudkan masyarakat Cina menurut suatu model asing. Sebagai anti kapitalisme, Marxisme menjanjikan kemungkinan penemuan diri nasional bagi sebuah masyarakat yang terancam akan dicaplok oleh dunia kapitalis. Marxisme menjadi sarana untuk memastikan kembali identitas Cina.”<sup>20</sup>

Marxisme menurut pandangan Mao Zedong bertumpu pada Marxisme yang merupakan refleksi atas kondisi universal, dan refleksi atas masyarakat RRC dan dunia ketiga. Kondisi yang dimiliki RRC secara keseluruhan berbeda dengan beberapa negara komunis lainnya. Hampir 70 % wilayah RRC merupakan wilayah agraris. Mao Zedong memanfaatkan hal ini sebagai basis massa terbesar di RRC. Konstruksi sosialisme tidak dimulai di negara-negara yang memiliki kelas buruh yang besar dan berpengalaman, sebaliknya justru tumbuh di negara-negara dimana kapitalis baru dimulai dan sebagian besar penduduknya terdiri atas petani dengan kaum buruh sebagai minoritas.<sup>21</sup> Hal ini karena kondisi politik mendahului kondisi ekonomi, sama halnya di RRC dan beberapa negara komunis di dunia ketiga lainnya dan Rusia. Sosialisme di RRC bangkit atas imperialisme

---

<sup>18</sup> From Marx To Mao, “On Practice”, *Selected Works Of Mao Tze Tung* Vol. 1, (Peking: Foreign Languages Press, 1965), hlm. 295.

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 99-100.

<sup>21</sup> Marta Harnecker, *Sosialisme Pengalam Venezuela/ Amerika Latin*, penerjemah Nug Katjasungkana, (Yogyakarta: Resist Book, 2015), hlm 76-77.

dan kapitalisme yang baru saja berkembang setelah keruntuhan dinasti. Revolusi 1917 di Rusia didasarkan atas pemberontakan proletariat terhadap imperialisme dan feodalisme dengan bantuan borjuis. Kemenangan proletariat tersebut merupakan langkah awal atas sosialisme.<sup>22</sup> Menurut Lenin peralihan menuju sosialisme sudah dimulai sebelum Revolusi Oktober 1917 jauh sebelum kaum proletar memperoleh kekuasaan. Revolusi tidak bisa berhenti pada tahap revolusi borjuasi saja, karena negara telah bergerak maju begitu juga dengan kapitalisme yang juga terus bergerak maju dan akan menuntut sosialisme untuk bergerak maju.<sup>23</sup> Perbedaan dengan RRC terletak pada basis massa. Kondisi perkembangan masyarakat industri yang didominasi oleh kalangan proletariat di Rusia menjadikan buruh sebagai basis utama. Keberhasilan Rusia melahirkan Komunisme berawal dari negaranya, pada akhirnya pemerintahan komunis di Rusia mengalami kemunduran akibat kerugian ekonomi yang diderita setelah Perang Dingin. Hal ini menjadikan masyarakat dunia tidak lagi terpolarisasi antara Blok Barat dan Blok Timur. RRC sendiri tetap menjadi negara komunis terbesar di dunia dengan karakteristik dan ideologi yang mencerminkan Cina.

Model pembangunan RRC didasarkan atas mitos revolusi yang dimaksudkan Mao sebagai revolusi negara berkembang dengan menampilkan konteks sejarah dan budaya sendiri.<sup>24</sup> Pembangunan sosialis yang diterapkan Mao terlihat stabil dan terstruktur, sebaliknya dalam perjalanannya terdapat banyak pergolakan politik dan kondisi sosial yang terjadi. Mulai dari keberagaman pemikiran yang terdapat dalam partai dan negara, kemudian kerugian secara finansial serta kekejaman dan kematian yang dialami oleh rakyatnya. Mao memandang politik sebagai pertimbangan utama dalam menjalankan pembangunan, berbeda halnya dengan Brazil yang lebih mementingkan ekonomi. Terbukti ketika Mao tetap memberikan dukungan terhadap perang Korea,

---

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> Vladimir I. Lenin, "The Proletarian Revolution and The Renegade Kautsky", dalam <http://marxist.org/archive/lenin/works/1918/prrk/subservience.htm>, diunduh pada 20 April 2015.

<sup>24</sup> Leo Agung S., *op.cit.*, hlm. 35-36.

meskipun kondisi ekonomi RRC sedang memprihatinkan.<sup>25</sup> Pertimbangan ekonomi lebih ditekankan oleh pemerintahan Deng Xiaoping. Perbedaan tersebut yang menjadikan model pembangunan sosialis di RRC memiliki dua model dalam 4 dasawarsa selama kepemimpinan Mao Zedong dan Deng Xiaoping. Model pembangunan tersebut secara garis besar mencerminkan karakteristik RRC terutama dalam hal pembangunan sosialisnya.

### 2.2.3 Politik Luar Negeri RRC Pada 1949-1976

Secara garis besar kondisi RRC selama kepemimpinan Mao terdiskripsikan dalam politik luar negeri RRC. Politik luar negeri RRC antara 1949-1976 dapat dipilah dalam empat periode:<sup>26</sup>

1. 1949-1953: Kaum Imperialis Amerika Serikat (AS) berupaya menjegal dan memutarbalikkan revolusi Cina serta menekan kemajuan gerakan revolusioner di Asia. PKC berupaya memerangi kekuatan militer AS di Korea dan mendukung perjuangan revolusioner di Vietnam dan Asia Tenggara lainnya.
2. 1954-1960an selama “Periode Bandung”, upaya AS untuk menjegal Cina, disertai pergantian kekuasaan kolonial Eropa dengan negara neokolonial dominasi AS. Politik luar negeri Zhou Enlai, berupaya membangun aliansi dengan negara-negara sosialis dan bekas jajahan dengan panji anti-imperialisme. Politik ini secara praktek menekankan dukungan pada rezim borjuasi nasional, seperti Indonesia dan India, namun mengurangi dukungan pada perjuangan revolusioner.
3. Dasawarsa 1960an: Ciri-ciri pentingnya adalah ledakan gerakan pembebasan nasional yang berpusat di Vietnam, kebangkitan perjuangan revolusioner di negara-negara imperialis dan permulaan Revolusi Kebudayaan di Cina, suatu revolusi baru dalam sebuah negara sosialis. Faktor-faktor ini memperkuat orientasi internasional revolusioner dalam politik luar negeri Cina selama dasawarsa ini. Pada saat yang sama, perjuangan sengit berlangsung di dalam PKC, terkait dengan politik luar negeri. Perjuangan ini sangat bertalian dengan polemik melawan Liu Shaoqi, Deng Xiaoping dan para penempuh jalan kapitalis dalam PKC.
4. 1969-1970an: Sosialisme Cina dihadapkan pada kondisi-kondisi baru. Ancaman militer yang serius terjadi di perbatasan utara dengan Uni Soviet dan Menteri Pertahanan, Lin Biao membelot dari kubu revolusioner. Perkembangan yang merugikan tersebut menghambat

---

<sup>25</sup>*Ibid.*, hlm. 40.

<sup>26</sup> MLM Revolutionary Study Group, *Politik Luar Negeri China Era Mao*, penerjemah Hidayat Purnama, (Yogyakarta: Pustaka Nusantara, 2011), hlm. 3.

Revolusi Kebudayaan Cina dan memulihkan kedudukan Deng Xiaoping serta para pejabat yang digulingkan atau hanya diturunkan pangkatnya beberapa tahun sebelumnya. Situasi ini juga mendorong munculnya Teori Tiga Dunia yang mendukung aliansi strategis dengan kaum imperialis Barat dan mendominasi politik luar negeri Cina dari 1973 sampai wafatnya Mao pada 1976.

Selama periode tersebut dalam politik luar negerinya, Mao terus memberikan dukungan politik dan militer bagi kemunculan kekuatan revolusioner dan anti revisionisme di negara-negara lain dalam melawan imperialisme. Hal ini terbukti dengan adanya politik luar negeri RRC di bawah pengaruh Zhou Enlai yang berupaya membangun aliansi dengan negara-negara sosialis dan bekas jajahan dengan panji anti-imperialisme. Upaya tersebut direalisasi melalui Konferensi Bandung dan pembentukan negara-negara Non Blok.<sup>27</sup> Konferensi Bandung merupakan pertemuan negara-negara Asia dan Afrika yang sebagian besar adalah negara baru merdeka dengan tujuan membangun kerjasama ekonomi dan budaya dalam melawan imperialisme dan neokolonialisme AS. Konferensi tersebut berlangsung selama 18-24 April 1955 di Bandung, Indonesia.

Selama kurang lebih 26 tahun, kepemimpinan Mao Zedong merupakan cerminan keradikalan sebuah negara komunis di Asia. Arah revolusioner dan pendirian internasionalis Mao pada prinsipnya adalah faktor penentu dari politik luar negeri RRC dari 1949-1976.<sup>28</sup> Hubungan dengan negara-negara sosialis lainnya juga merupakan gambaran kongkrit atas kepemimpinan Mao Zedong. Pergantian kolonialisme dengan neokolonialisme dominasi AS menjadikan gerakan dukungan RRC terhadap beberapa negara yang berseteru dengan AS semakin aktif. RRC mengirim bantuan pasukan dan senjata terhadap rakyat Vietnam dan Korea yang melakukan perlawanan. Dominasi ekonomi yang dilakukan AS terhadap sebagian wilayah lain negara Vietnam dan Korea mendapatkan respon kuat yang membangkitkan perlawanan dari sebagian wilayah lainnya yang sedang memerangi neokolonialisme AS. Selain masifnya propaganda politik luar negeri Mao dengan memberikan banyak dukungan

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 10-17.

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 4-5.

terhadap negara-negara lain, di dalam negeri Mao juga telah mengencangkan praktek revolusioner untuk memperbaiki tatanan ekonomi RRC. Hal ini bertujuan untuk memicu gerakan revolusioner yang ada di negara-negara sosialis lainnya.

Pemikiran Mao tentang revolusi industri yang singkat bagi RRC dan dapat melampaui Revolusi Industri di Inggris melalui Lompatan Jauh ke Depan, salah satunya didasari oleh ketersediaan tenaga kerja yang melimpah. Hampir seperempat manusia di bumi berada di RRC. Sebaliknya, dalam perjalanannya beberapa hal yang menjadi faktor penting terlaksananya industrialisasi ini seperti ketersediaan bahan mentah, serta alat produksi kurang menjadi pertimbangan Mao sehingga justru menimbulkan kerugian yang besar bagi RRC. Kegagalan Lompatan Jauh ke Depan tersebut menyebabkan kelaparan bahkan kematian rakyat RRC sebanyak 30-40 juta. Kerugian secara finansial juga diderita oleh RRC karena belanja negara yang berlebihan ketika berlangsungnya kampanye Lompatan Jauh ke Depan.

Kegagalan kampanye tersebut berdampak juga terhadap stabilitas politik PKC, selain kerugian secara finansial dan permasalahan kemanusiaan. Hal ini kemudian memicu munculnya para revisionis kembali ke permukaan. Revisionisme yang ditunjukkan Uni Soviet atas keberadaan neokolonial AS juga memicu kebangkitan para revisionis RRC seperti Deng Xiaoping dan Liu Shaoqi. Terdesaknya posisi Mao dalam partai, juga semakin masifnya gerakan revisionis dalam negeri dan luar negeri menjadi salah satu alasan bahwa RRC harus memurnikan ajaran Marxis dengan pemikirannya sendiri.

Propaganda politik yang dilakukan ketua tidak hanya sampai pada tahap tersebut, melainkan digambarkan dengan munculnya gelombang baru yang lebih besar dan merupakan bagian dari revolusi lanjutan. Sebuah masa yang mengubah sebagian besar aspek kehidupan masyarakat Cina, munculnya Revolusi Kebudayaan atau revolusi budaya proletar agung yang dianggap sebagai jalan keluar bagi Mao. Menguatkan jiwa komunis kembali anggota partai, para intelektual, petani dan semua masyarakat Cina dengan mengilhami kembali ajaran-ajaran Marxis dan pemikiran Mao yang tertuang dalam *The Little Red Book*.

#### 2.2.4 Kebijakan Politik Dalam Negeri RRC Era Mao Zedong

Selama kepemimpinan Mao Zedong dalam partai dan negara, Mao menerapkan beberapa propaganda politik yang radikal. Propaganda-propaganda politik ini kemudian menjadi garis besar haluan politik dalam negeri RRC selama kepemimpinan Mao Zedong (1949-1976). Gerakan Seratus Bunga, Lompatan Jauh ke Depan dan Revolusi Kebudayaan adalah propaganda politik Mao yang membawa pengaruh besar terhadap kelangsungan RRC selama beberapa dasawarsa. Propaganda politik ini secara tidak langsung menjelaskan terkait kebijakan politik dalam negeri selama kepemimpinan Mao. Kebijakan dalam negeri yang diterapkan Mao tidak berbeda jauh dengan politik luar negeri RRC (1949-1976). Politik luar negeri RRC era Mao menekankan hubungan kerjasama dengan negara-negara borjuasi nasional serta negara sosialis lainnya, sedangkan politik dalam negeri lebih kepada pembenahan sistem ekonomi dan politik RRC. Hal ini meliputi peningkatan produksi industri serta pertanian. Pembenahan sistem politik meliputi pendisiplinan kader partai, arah politik partai serta pemurnian ideologi sesuai dengan pemikiran yang dilontarkan Mao Zedong dalam *The Little Red Book*.

Mao melancarkan aksinya melalui beberapa tahapan kampanye politik. Keberhasilan Pelita pertama menjadi acuan pelaksanaan kampanye politik Mao berikutnya. Secara garis besar keberhasilan Pelita pertama menjadi dasar dilaksanakannya Pelita kedua yang kemudian lebih dikenal dengan nama Lompatan Jauh ke Depan. Sebelum kampanye tersebut resmi diluncurkan, Mao dan Zhou Enlai beserta petinggi partai lainnya mendiskusikan langkah untuk meningkatkan partisipasi para intelektual untuk membangun RRC yang baru.<sup>29</sup> Kampanye tersebut diwujudkan dengan adanya Gerakan Seratus Bunga, yang kemudian juga menjadi salah satu penyokong terlaksananya kampanye Lompatan Jauh ke Depan. Berikut propaganda politik Mao yang menjadi garis besar politik dalam negeri RRC era Mao setelah keberhasilan Pelita pertama pada 1956-1976.

---

<sup>29</sup> Stuart R. Schram, "Mao Zedong", dalam *Encyclopedia Britanica Vol. 23 Fifteenth Edition*, (New York: Encyclopedia Britanica Inc, 2010), hlm. 471.

### Gerakan Seratus Bunga (1956-1957)

Kampanye Seratus Bunga atau yang lebih dikenal dengan Gerakan Seratus Bunga merupakan salah satu propaganda politik yang dilaksanakan selama kepemimpinan Mao Zedong. Tujuan diadakannya kampanye tersebut adalah untuk menghimpun dukungan dari rakyat terutama dari kalangan intelektual. Dukungan untuk ikut berperan aktif dalam rencana pembangunan lima tahun kedua atau yang dikenal dengan Lompatan Jauh ke Depan. Dukungan yang diberikan berupa kritikan yang ditujukan untuk kebijakan dalam pemerintahan serta partisipasi masyarakat dalam urusan pemerintahan. Kampanye ini merupakan gagasan Zhou Enlai, dalam pelaksanaannya Mao mengutus Zhou dan birokrat dalam pemerintahan pusat lainnya untuk menjalankan kampanye tersebut.<sup>30</sup>

Gerakan Seratus Bunga diperoleh dari puisi tradisional Cina yakni *Biarkan Seratus Bunga Mekar Bersama, Seratus Aliran Bersaing Bersuara Dan Hidup Berdampingan Untuk Jangka Panjang Dan Saling Mengawasi*.<sup>31</sup> Puisi tradisional tersebut menjadi sebuah filosofi Gerakan Seratus Bunga. Makna seratus aliran bersuara bersaing dalam puisi tersebut oleh Mao diartikan sebagai sebuah seni dan ratusan mazhab yang mewarnai perkembangan pemikiran. Menurut Zhou Enlai pemerintah membutuhkan kritik dari rakyat sebagai bentuk perwujudan dari kediktatoran rakyat demokratik. Hal ini diwujudkan dengan Gerakan Seratus Bunga pada akhir 1956.

Kampanye tersebut juga merupakan sebuah bentuk penggalangan simpati atas kepemimpinan Mao Zedong yang mampu menunjukkan sebuah keterbukaan pemerintah dan partai kepada masyarakat. Setelah kampanye ini diluncurkan, awalnya reaksi muncul dari sebagian masyarakat dan hanya meliputi permasalahan kecil saja. Antusias masyarakat meningkat setelah Mao menyampaikan pidato di hadapan Konferensi Agung Negara pada 27 Februari 1957, bahwa rakyat dianjurkan untuk menyampaikan kritiknya, yang

---

<sup>30</sup> Mao Tse Tung, *Empat Karya Filsafat*, penerjemah Sulang Sahun, (Yogyakarta: Fuspada, 2001), hlm. 177.

<sup>31</sup> "Hundred Flower Campaign", dalam <http://www.newworldencyclopedia.org>, diunduh pada 13 April 2015.

disampaikannya menggunakan kalimat "biarkan seratus bunga mekar dan seratus aliran Bersaing Bersuara."<sup>32</sup> Para intelektual yang mulanya takut untuk berpendapat, Mei 1957 intelektual-intelektual tersebut sudah yakin mengantongi izin resmi dari Mao. Tidak lama setelahnya banyak surat yang ditujukan kepada pemerintah berupa kritikan. Banjir kritik yang diberikan masyarakat bukan hanya melalui surat saja melainkan dilakukan secara lebih masif yakni dengan unjuk rasa, penerbitan artikel dan majalah serta penempelan poster di universitas-universitas. Kritikan yang dilontarkan meliputi tuntutan atas kebebasan akademik yang dilakukan oleh guru-guru, protes terhadap KRN yang terkesan lamban dalam memberlakukan undang-undang yang sudah dibuat, taraf kehidupan RRC yang rendah serta sikap korup yang dilakukan oleh kader partai dan banyak hal lainnya. Beberapa surat kritikan yang dikirimkan kepada pemerintah oleh para intelektual seperti berikut:

“Dari seorang profesor perguruan tinggi: Para anggota Partai, seharusnya menempati posisi kepemimpinan mereka dan menggunakannya dengan baik, sebaliknya mereka tampak menikmati semua hak istimewanya secara berlebihan.

Dari seorang pemimpin mahasiswa: Sosialisme yang sebenarnya sangat demokratis, tetapi sosialisme yang kita miliki di sini tidak demokratis. Saya menyebut masyarakat sosialisme kita adalah sosialisme yang berasal dari dasar feodalisme.

Dari editor Studi Sastra: Tidak ada yang bisa menyangkal bahwa di negara kita saat ini masih ada banjir dan kekeringan, masih ada kelaparan dan pengangguran, masih ada penyakit menular dan penindasan pada birokrasi, ditambah fenomena yang tidak menyenangkan dan tidak dapat dibenarkan lainnya. Seorang penulis sejati yang memiliki hati nurani dan pikiran yang jernih seharusnya tidak puas dengan menutup mata dan tetap diam menghadapi kehidupan nyata dan penderitaan rakyat. Jika penulis tidak memiliki keberanian untuk mengungkapkan penyakit kegelapan dalam masyarakat, tidak memiliki keberanian untuk berpartisipasi secara positif memecahkan masalah penting dalam kehidupan masyarakat, dan tidak memiliki keberanian untuk menyerang semua bentuk kesakitan, suatu kejelekan, maka bisakah dia disebut sebagai seorang penulis?”<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Asia For Educators, “Intellectual Opinions From The Hundred Flowers Periode 1957”, Columbia University, hlm. 3, dalam <http://afe.easia.columbia.edu>, diunduh pada 5 April 2015.

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 2-3.

Mao menganggap hal tersebut melewati batas, dan mengancam kepemimpinan serta pemerintahannya. Untuk mengatasinya, Mao menghentikan Kampanye Seratus Bunga dan justru menjadikannya sebagai bentuk penyingkiran lawan politiknya. Hal ini terbukti ketika sekitar 300.000 orang yang aktif melontarkan kritikan terhadap pemerintahan Mao Zedong diidentifikasi sebagai orang kanan.<sup>34</sup> Sebagian besar dari orang-orang tersebut berasal dari kalangan intelektual, dan ada pula yang berasal dari kader partai sendiri. Sebagai konsekuensinya, orang yang dicap sebagai kanan dipaksa melakukan pendidikan ulang dengan dikirim ke dalam kamp kerja paksa yang ada di desa, secara keseluruhan sekitar 500.000 ribu orang dihukum.<sup>35</sup>

#### Lompatan Jauh ke Depan ( 1958-1960)

Sebagai bentuk lanjutan dari Gerakan Seratus Bunga, pada 1958 Mao juga meluncurkan kampanye Lompatan Jauh ke Depan. Kampanye ini merupakan bentuk realisasi Repelita kedua setelah keberhasilan yang dicapai oleh Repelita pertama (1953-1957). Tujuan utama dari kampanye tersebut adalah mencapai sebuah komunisme sejati dan meningkatkan status perekonomian RRC. Keberhasilan RRC dalam Repelita pertama dalam hal peningkatan hasil produksi industri ternyata tidak dapat mengimbangi hasil pertanian, sehingga terjadi ketimpangan yang cukup besar. Selama lima tahun produksi industri meningkat 14,1%, banyak proyek telah selesai dengan bantuan Uni Soviet. Pabrik baja dan tambang batu bara di daerah Dongbei serta di wilayah Wuhan didirikan pabrik-pabrik baru, di sebelah barat Cina ladang-ladang minyak dimanfaatkan, pusat-pusat tekstil dihidupkan kembali serta jalur kereta api diperluas dan ditunjang oleh konstruksi jalan-jalan raya.<sup>36</sup> Pelita pertama terbilang sukses dengan mengolah hasil dari ladang-ladang minyak, pendirian pabrik, serta perbaikan infrastruktur untuk melancarkan kegiatan produksi. Hal ini merupakan salah satu rencana

---

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> Oxford Community School, "The Emergence Of Modern China 1911-1976: Part Two, Communist China 1949-1976", dalam <http://www.oxford.oxon.sch.uk/1949-76Booklet.pdf>, diunduh pada 27 April 2015.

<sup>36</sup> Natalia Soebago, "Komune Rakyat Pedesaan Cina", *Skripsi*, Perpustakaan Universitas Indonesia, dalam <http://lib.ui.ac.id>.

pembangunan di RRC tahapan rekonstruksi dan konsolidasi awal. Perencanaan pembangunan tersebut mendapat dukungan dari Uni Soviet, dan beberapa tokoh revisionis RRC seperti Liu Shauqi dan Deng Xiaoping. Penggunaan tenaga ahli dan bantuan modal serta alat produksi dari Uni Soviet ikut andil dalam keberhasilan Repelita pertama terutama dalam produksi industri. Gambaran peningkatan produksi industri RRC pada Repelita pertama (1953-1957) sebagai berikut:

**Tabel 2.2**  
**Produksi Industri RRC Pada 1952-1957**

No	Produksi Industri	1952	1957	
		Hasil Produksi	Target Produksi	Hasil Produksi
1.	Batu Bara (Juta Ton)	64	113	124
2.	Besi (Juta Ton)	1.9	4.7	5.86
3.	Baja (Juta Ton)	1.35	4.12	5.24
4.	Pupuk Kimia (Ratus Ton)	194	570	740
5.	Alat Mesin(Potongan)	13,374	37,192	80,000
6.	Minyak Mentah (Juta Ton)	0,44	1.42	2
7.	Tenaga Listrik (Ratusan Juta KW)	7.26	15.9	19.1

Sumber: GCSE Modern World History, "Mao's China 1930-1976", dalam [www.hodderplus.co.uk](http://www.hodderplus.co.uk).

Keinginan yang sama untuk mencapai peningkatan dalam perekonomian berbasis industri juga ingin dicapai Mao melalui kampanye Lompatan Jauh ke Depan. Sebagai tambahan, dalam kampanye tersebut target yang ingin dicapai adalah keseimbangan antara peningkatan industri yang diiringi dengan peningkatan produksi pertanian. Konsep dasar Mao Zedong dalam menjalankan kampanye Lompatan Jauh ke Depan selain didasarkan atas keberhasilan Repelita pertama yakni ketersediaan tenaga kerja yang melimpah serta luas wilayah RRC. Kedua hal ini menjadi faktor pendukung untuk melaksanakan kampanye tersebut layaknya Revolusi Industri di Inggris. Tujuan awal yakni untuk mencapai komunisme sejati RRC terutama dalam mewujudkan ekonomi sosialis, salah satunya adalah redistribusi kekayaan terhadap masyarakat. Hal ini dapat diwujudkan ketika kekayaan yang dimiliki negara mampu menghidupi setiap

populasi yang ada di dalamnya yang nanti akan diatur dalam sebuah komune bersama.<sup>37</sup> Perwujudan sistem ini terhimpun dalam Komune Rakyat pada 1958.

Komune Rakyat merupakan organisasi politik dan ekonomi bersama yang bentuknya juga direalisasikan dalam koperasi. Tercatat pada akhir tahun terbentuk 25.000 komune yang terdiri dari 5000 rumah tangga.<sup>38</sup> Salah satu sistem yang diterapkan dalam komune tersebut adalah perolehan poin kerja anggota komune sebagai bentuk koperasi mandiri. Poin kerja tersebut diperoleh dari upah atau uang yang diperoleh oleh anggota. Sejak peluncuran kampanye Lompatan Jauh ke Depan hanya terhitung selama 3 tahun dan bukannya 5 tahun seperti rencananya. Hal ini dikarenakan efek yang ditimbulkan kampanye tersebut justru merugikan RRC secara materi maupun non materi. Rencana pembangunan lima tahun periode kedua tersebut menargetkan industri dan pertanian per-tahunnya sebesar 11.8 %, sedangkan implementasinya hanya mencapai 0.6 %, lebih rincinya target produksi pertanian per-tahunnya 6.2% dan implementasinya 4.3% serta target produksi industri per-tahunnya 14.9% dan implementasinya 3.8%.<sup>39</sup> Pengoptimalan target produksi dan pertanian yang direncanakan, dalam perjalanannya justru hanya difokuskan pada industri yang meliputi produksi baja yang berkualitas tinggi. Pada pertemuan Politbiro Agustus 1958, diputuskan bahwa produksi baja akan diproduksi dua kali lipat dalam tahun tersebut, sebagian besar peningkatan dijalankan melalui tungku baja halaman belakang di setiap komune.<sup>40</sup> Hasil yang diperoleh justru sebaliknya, hasil produksi baja berkualitas rendah dan bernilai kecil karena keterbatasan bahan yang digunakan yakni berasal dari besi-besi tua. Produksi pertanian yang seharusnya cukup menghasilkan, seperti gandum dan beras, justru terabaikan karena pengalihan tenaga kerja petani untuk produksi baja. Bencana kelaparan melanda beberapa wilayah hingga akhirnya pemerintah harus impor kebutuhan pangan dari beberapa negara seperti Kanada dan Australia untuk mengurangi bencana kelaparan yang terjadi di

---

<sup>37</sup> “Great Leap Forward”, dalam <http://www.newworldencyclopedia.org>, diunduh pada 13 April 2015.

<sup>38</sup> *Ibid.*

<sup>39</sup> Kyeld Allan Lasser, *Regoinal Policy Of China 1949-1985*, dalam *Journal Of Contemporary Asia Publisher*, 1992, hlm. 55.

<sup>40</sup> “Great Leap Forward”, *op.cit.*

RRC.<sup>41</sup> Bencana kelaparan dan kematian akibat dari kampanye Lompatan Jauh ke Depan disebabkan oleh bencana alam dan sebagian besar karena human error. Pertimbangan yang kurang matang dalam kampanye tersebut seperti ketersediaan SDM yang memiliki pengetahuan tentang mesin dan industri berat, serta ketersediaan modal menjadi faktor yang cukup fatal atas kegagalan kampanye tersebut. Tercatat lebih dari 10 juta penduduk RRC meninggal akibat kelaparan setelah 4 tahun pelaksanaan Lompatan Jauh ke Depan.<sup>42</sup> Biro Statistik Negara RRC menjelaskan bahwa kesibukan membangun komune-komune besar dan pabrik-pabrik yang terkesan cepat untuk mencapai target yang diinginkan dalam Lompatan Jauh ke Depan, mengakibatkan kematian lebih dari 10 juta orang dari 1959 sampai akhir 1962.<sup>43</sup> Salah satu wilayah yang memiliki angka kematian tertinggi akibat kelaparan selama kampanye Lompatan Jauh ke Depan adalah provinsi Henan, wilayah tersebut merupakan wilayah percontohan nasional.<sup>44</sup> Salah satunya adalah dengan didirikannya Komune Rakyat pertama di Henan. Angka kematian yang terjadi di Henan pada 1960 justru lebih besar daripada rata-rata kematian tingkat nasional yakni 26.3 dibandingkan to 25.4 per 1.000 populasi.<sup>45</sup>

Bentuk Komune Rakyat yang digambarkan seperti gambar di atas menunjukkan beberapa ketidakefektifan dengan menempatkan 1000 orang dalam satu komune. Serta memberlakukan sistem yang secara administratif kurang memadai yakni dengan mempekerjakan semua petani dan anggota komune ke semua sektor seperti peningkatan produksi industri yang dicanangkan Mao. Hal tersebut menjadi salah satu penyebab kegagalan Lompatan Jauh ke depan karena kurangnya tenaga ahli dan SDM yang memadai.

---

<sup>41</sup> *Ibid.*

<sup>42</sup> Poltak Partogi Nainggolan, *Reformasi Ekonomi Era Deng Xiaoping: Pasar Bebas dan Kapitalisme Dihidupkan Lagi*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995), hlm. 72.

<sup>43</sup> “Program Mao Zedong Tewaskan Sedikitnya 10 Juta Penduduk”, *Kompas*, 14 September 1984, hlm. 7.

<sup>44</sup> Felix Wemheuer, *Dealing with Responsibility for the Great Leap Famine in the People's Republic of China*, (The China Quarterly 201, 2010), hlm. 185.

<sup>45</sup> *Ibid.*

### 2.3 Revolusi Kebudayaan Rezim Mao Zedong

Keberadaan PKC dalam perjalanan sejarah RRC merupakan salah satu periode yang menggambarkan karir Mao Zedong di RRC. Partai merupakan naungan tertinggi negara yang dipenuhi dengan kekuasaan dan kontrol terhadap rakyat. Sebuah struktur masyarakat yang terorganisir oleh satu lembaga atau organisasi menjadi pilihan yang lebih efektif bagi sebuah negara. Sebuah negara semi diktator, dengan beberapa kebijakan yang mengikat penguasa dan partai. Menjadi lebih menarik lagi yakni dalam sebuah tatanan negara komunis, pemimpin kekuasaan diperoleh dari kalangan proletar.

Kemunculan negara-negara komunis di Asia dan Eropa Timur bahkan Amerika membawa suasana baru bagi komunisme. RRC merupakan negara komunis terbesar di Asia, dan doktrin Marxisme-Leninisme di setiap negara tidak diilhami secara dogmatis. Masing-masing negara mempunyai metode tersendiri seperti halnya di RRC dan Yugoslavia. Setelah Perang Dunia II, salah satu politik luar negeri di era Mao adalah memperluas sikap internasionalis RRC di seluruh negara di dunia. RRC membentuk front persatuan antara negara-negara yang baru memerdekakan diri, terutama dari kalangan borjuasi nasional seperti Indonesia dan India serta negara-negara sosialis lainnya. Salah satu kebijakan politik luar negerinya yakni yang dipelopori oleh Zhou Enlai adalah membentuk negara Non Blok sebagai hasil dari Konferensi Bandung. Keagresifan AS memperluas dominasi neokolonialismenya justru memicu RRC melakukan hal yang sama yakni memperluas sikap internasionalisnya dengan memberikan dukungan terhadap negara-negara lain. Selain itu, sikap revisionis yang mulai menarik perhatian beberapa anggota Komintern seperti yang dilakukan Uni Soviet justru memperkeruh hubungan RRC dan Uni Soviet. Sikap revisionis Uni Soviet yang membiarkan imperialisme sebagai sebuah negosiasi dengan AS, juga ikut memicu kondisi politik dalam PKC. Deng Xiaoping dan Liu Shaoqi yang juga penganut revisionisme mempunyai peluang untuk kembali dalam partai. Dinamika ekonomi dan politik RRC selama beberapa dasawarsa tersebut banyak berpengaruh terhadap kebijakan politik luar dan dalam negeri. Propaganda-propaganda politik dalam negeri yang membawa pengaruh besar terhadap kondisi negara dan partai

pada 1960an mengantarkan RRC pada gelombang revolusi terbesar. Sebuah revolusi yang membawa komunisme RRC menuju transisi baru nantinya, yakni bagian propaganda politik Mao yang disebutnya sebagai Revolusi Kebudayaan.

Sejak September 1962, ketika Ketua Mao menghadiri Sidang Pleno Komite Sentral Partai ke-8, Mao memperingatkan seluruh anggota partai dan seluruh rakyat Cina untuk tidak melupakan kelas dan perjuangan kelas, perjuangan untuk menegakkan ideologi proletar dan membasmi ideologi borjuis di depan budaya yang telah dikembangkan lebih lanjut.<sup>46</sup> Revolusi Kebudayaan dalam masa rezim Mao Zedong merupakan sebuah kampanye terbesar yang terdapat dalam sejarah Cina pasca berdirinya RRC. Revolusi Kebudayaan bukan hanya meliputi kebudayaan namun hampir seluruh aspek kehidupan Cina seperti seni, politik dan pendidikan. Kampanye ini juga merupakan bagian dari pemulihan stabilitas politik Mao Zedong sebagai petinggi partai.

Kebijakan dalam Revolusi Kebudayaan memperluas gerakan *Pengawal Merah* mahasiswa yang ada dan diangkat ke tingkat kampanye massa nasional, tidak hanya mahasiswa tetapi juga massa buruh, petani, tentara, intelektual revolusioner, dan kader revolusioner untuk melaksanakan tugas dengan menulis poster besar berkarakter dan mengundang perdebatan besar. Keputusan memberikan kebebasan berbicara yang luas untuk mengkritik mereka yang berwenang dan melepaskan jutaan orang muda yang telah diindoktrinasi intens dalam pemikiran Maois sejak berdirinya RRC.<sup>47</sup> Unit *Pengawal Merah* dibentuk di seluruh negeri, menjadikan universitas ke dalam kekacauan dan mengancam politisi yang dianggap sebagai antek kapitalis. Mulai 16 Agustus 1966 jutaan *Pengawal Merah* dari seluruh negeri berkumpul di Beijing untuk melihat Ketua Mao. Dari puncak gerbang lapangan Tiananmen, Mao dan Lin Biao tampil di hadapan *Pengawal Merah* yang jumlahnya sekitar 11 juta. Mao memuji tindakan mereka dalam kampanye terakhir untuk mengembangkan sosialisme dan

---

<sup>46</sup> "Hold High the Great Red Banner Mao Tse-tung Thinking Actively Participate in the Great socialist Cultural Revolution", dalam *Peking Review*, hlm. 18, 29 April 1966.

<sup>47</sup> "Cultural Revolution", dalam <http://www.newworldencyclopedia.org>, diunduh pada 13 April 2015.

demokrasi.<sup>48</sup> Revolusi Kebudayaan diwujudkan melalui anarkisme yang dilakukan oleh *Pengawal Merah* terhadap beberapa aspek kehidupan masyarakat RRC. “Sistem pendidikan Cina diberhentikan, sebagian mahasiswa dikirim ke komune pedesaan, dan teknologi kemajuan terhenti sedangkan ideologi diutamakan daripada keahlian.”<sup>49</sup>

Keberadaan Liu Shaoqi sebagai salah satu kepala pemerintahan menyebabkan semakin gencarnya revisionisme dipropagandakan, salah satunya melalui program Tiga Milik Pribadi dan Satu Garansi. Liu Shaoqi mengizinkan rakyat untuk mengerjakan tanah miliknya sendiri serta memiliki usaha kecil untuk dijual ke pasar bebas.<sup>50</sup> Pada dasarnya Revolusi Kebudayaan merupakan kampanye anti kapitalis. Sebuah revolusi yang banyak memakan korban secara fisik, mental serta materi, diskriminasi bagi orang yang dianggap kontrarevolusioner dan sebuah proses isolasi diri RRC dari pengaruh luar terutama negara Barat. Kehidupan di kota tidak terkendali, kegiatan produksi berhenti, dan hampir seluruh kegiatan di RRC lumpuh kecuali penghancuran yang dilakukan *Pengawal Merah*. *Pengawal Merah* merupakan pelaksana terbesar dalam Revolusi Kebudayaan, sebagian besar dari mereka merupakan mahasiswa dan pelajar dari segala penjuru wilayah RRC.

Pada 1978 ketika Deng Xiaoping mengumumkan kebijakan merehabilitasi korban Revolusi Kebudayaan, tercatat sedikitnya 300.000 orang yang menjadi korban tuduhan palsu. Deng Xiaoping sendiri yakin bahwa ada 2,9 juta orang mengalami berbagai macam penganiayaan selama kampanye tersebut.<sup>51</sup> Kegagalan Revolusi Kebudayaan yang menimbulkan banyak kerugian bagi RRC, menjadi salah satu faktor kemunduran bagi Mao Zedong.

---

<sup>48</sup> *Ibid.*

<sup>49</sup> *Ibid.*

<sup>50</sup> Ririn Darini, *Garis Besar Sejarah Cina Era Mao*, Jurusan Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Yogyakarta, 2010, hlm. 49.

<sup>51</sup> *Ibid.*, hlm. 48.

### 2.3.1 Jalannya Revolusi Kebudayaan

Revolusi Cina tidak hanya dijalankan dalam waktu yang singkat, jika dipilah dan digambarkan dalam periodisasi terutama pasca 1949, tahapan perkembangan RRC tampak dalam beberapa kampanye yang dilakukan oleh kepemimpinan Mao. Mulai dari *Landreform*, Gerakan Tiga Anti dan Lima Anti (Tiga Anti meliputi Pencurian, Pemborosan, dan Birokratisme yang dilakukan kader partai terutama yang berkecimpung pada Departemen Keuangan dan Ekonomi sedangkan Lima Anti meliputi Suap-menyuap, Tidak membayar pajak, Pencurian uang negara, menipu kontrak dengan negara dan mencuri informasi milik negara yang dilakukan oleh pengusaha dan perusahaan swasta), Sentralisasi Pajak, Repelita Pertama 1953-1957, Gerakan Seratus Bunga, Nasionalisasi Perusahaan, Komune Rakyat, Lompatan Jauh Ke Depan serta Revolusi Kebudayaan.<sup>52</sup> Fase yang dialami RRC dalam beberapa dekade terkesan radikal dan revolusioner. Beberapa metode yang digunakan terkesan mustahil dan terburu-buru. Hal ini cukup membuktikan keagresifan RRC untuk melampaui Uni Soviet dan negara-negara imperialis di Eropa.

Hubungan RRC dengan Uni Soviet yang semakin memburuk karena sikap revisionis Soviet menjadikan Revolusi Kebudayaan sebagai sebuah perjuangan massa di seluruh dunia untuk menentang sikap tersebut. Kampanye dalam dan luar negeri terus dilakukan untuk menentang penguasaan atas neokolonialisme. Sedangkan di dalam negeri, kampanye anti kanan dan anti imperialis aktif dijalankan. Kampanye yang dilakukan juga meliputi peningkatan produksi dalam beberapa bidang misalnya pertanian dan industri, sebagai bentuk pembuktian kemajuan RRC dalam hal perekonomian. Peningkatan produksi yang ditargetkan untuk melampaui Uni Soviet dan Inggris menjadi sebuah pembuktian RRC. Kampanye yang dikenal dengan Lompatan Jauh ke Depan banyak menimbulkan kerugian bagi RRC baik secara materi dan non materi. Sebuah fase baru menggantikan kegagalan Lompatan Jauh ke Depan dicetuskan, sebuah perombakan besar-besaran dalam bidang kebudayaan, seni, politik dan pendidikan. Krisis ekonomi dan krisis politik yang melanda RRC tahun 1960an

---

<sup>52</sup> *Ibid.*,

karena kelaparan dan kematian hebat yang terjadi di RRC merupakan awal keberlangsungan kampanye Revolusi Kebudayaan.

Sebelum Revolusi Kebudayaan secara resmi dikampanyekan secara menyeluruh, Mao merasakan kekhawatiran akan timbulnya pemberontakan rakyat Cina terhadap partai dan kekuasaannya. Kekhawatiran tersebut diperoleh dari pengalaman Hongaria ketika rezim komunis ditumbangkan. Selain itu pertimbangan akan perebutan kekuasaan oleh rezim baru juga menjadi kekhawatirannya. Februari 1956, penghianatan yang dilakukan Khrushchev melalui kritikan-kritikan terhadap Stalin tentang sistem kolektivisasi yang gagal, juga menjadi rujukannya untuk tetap mengamankan otoritasnya dan partai.<sup>53</sup>

Perubahan arah kebijakan partai terutama dalam bidang ekonomi dimulai dari 1950an, percobaan pembangunan sosialis Cina digencarkan. Tahap industrialisasi yang sedang dijalankan sebagai bentuk pengembangan ekonomi RRC diwujudkan melalui beberapa kebijakan. Juli 1955 dicanangkan sistem pertanian kolektif, bertujuan sebagai pengembangan pertanian yang ditargetkan. Menyusul kemudian pada November 1955 industri serta perdagangan milik swasta harus dinasionalisasikan. Kepemilikan tanah serta usaha yang sifatnya pribadi kemudian dikolektifkan menjadi kepemilikan bersama meskipun belum dilakukan secara serempak.

Selain perubahan arah kebijakan ekonomi, salah satu kebijakan politik yang diambil Mao pada 1956 yakni dikenal dengan Gerakan Seratus Bunga. Secara garis besar gerakan ini untuk kepentingan partai melalui kebebasan yang diberikan kepada masyarakat terutama kaum intelektual terkait kebijakan yang meliputi urusan seni, politik juga ekonomi sebagai bentuk dukungan. Lebih jauh lagi, bentuk dukungan yang dilakukan adalah melalui kritikan untuk pejabat-pejabat partai. Secara tidak langsung, Mao berfikir bahwa bentuk dukungan yang diberikan juga merupakan wujud tingkat kepercayaan masyarakat terhadap partai. Perkembangan Gerakan Seratus Bunga, kampanye anti kanan juga mengiringi serangkaian kebijakan politik yang diambil Mao. Kampanye anti kanan mengidentikkan orang-orang kanan sebagai orang penempuh jalan kapitalis,

---

<sup>53</sup> Frank Dikotter, *loc.cit.*

pendukung semangat revisionis, serta bekas peninggalan Koumintang. Orang-orang tersebut dicap sebagai kontrarevolusioner oleh partai. Selama kampanye anti kanan terdapat 160.000 laki-laki dan perempuan dicap sebagai kontrarevolusioner.<sup>54</sup>

Proses pemulihan atas kedudukan Mao Zedong sebagai pemimpin partai dilakukan melalui serangkaian perbaikan ekonomi setelah kesuksesan Repelita pertama 1953-1957. Industri RRC tumbuh dengan kecepatan yang melebihi 14,7% dari rencana yang ditetapkan. Total output industri RRC meningkat dua kali lipat. RRC juga untuk pertama kalinya memproduksi sejumlah truk, traktor, pesawat jet, dan kapal dagang.<sup>55</sup> Kesuksesan yang ditunjukkan pada Repelita pertama menghantarkan RRC menuju sebuah negara komunis yang berupaya mengembangkan sistem komunal secara serempak di seluruh wilayah RRC. Perwujudan sistem ini kemudian dikenal dengan Komune Rakyat yang diresmikan pada 1958. Kolektivisasi pertanian dibentuk melalui penggabungan pertanian-pertanian kolektif ke dalam unit yang lebih besar. Sebuah sistem administratif secara keseluruhan diterapkan di beberapa wilayah Cina seperti Henan.<sup>56</sup> Setelah wilayah percontohan seperti Henan, wilayah-wilayah lain juga dipersiapkan untuk keberlangsungan Komune Rakyat secara besar-besaran dalam mewujudkan negara komunis yang sesungguhnya. Pada prinsipnya Komune Rakyat menjalankan beberapa fungsi penting yakni:

Pertama, komune menyelenggarakan administrasi di tingkat pedesaan, meliputi administrasi kelahiran, kematian, perkawinan. Kedua, komune juga merupakan unit produksi. Negara memobilisasikan petani untuk menghasilkan bahan makanan untuk penduduk kota dan bahan baku untuk industri di kota. Negara memaksa petani untuk menyerahkan tanah, alat-alat pertanian, dan hewan kepada komune. Petani diberi petunjuk tentang cara mengolah tanah dan diperintahkan untuk menanam lebih rapat dalam kampanye susul menyusul. Ketiga, komune merupakan unit yang menyelenggarakan pendidikan dan kesehatan.<sup>57</sup>

---

<sup>54</sup> Jung Chang, *Angsa-Angsa Liar*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005). hlm 222.

<sup>55</sup> Ririn Darini, *op.cit.*, hlm. 35.

<sup>56</sup> Frank Dikotte, *op.cit.*, hlm. 71-72.

<sup>57</sup> Ririn Darini, *op.cit.*, hlm. 37.

Penemuan baru atas bentuk sebuah kehidupan kolektif bagi keberlangsungan negara komunis melalui Komune Rakyat merombak banyak aspek kehidupan masyarakat Cina sebelumnya. Salah satunya adalah menghilangkan privatisasi ekonomi setiap keluarga di RRC, kemudian dalam satu wilayah administratif tersebut dibagi menjadi beberapa distrik yang menjadi satu-kesatuan di bawah komando pusat yakni partai. Sebaliknya dalam perjalannya, penyeragaman tersebut tidak dapat dilakukan dengan serempak. Pembentukan Komune Rakyat yang ditujukan bagi kehidupan negara komunis merupakan salah satu cerminan sistem ekonomi sosialis atau terpusat. Perbedaan atas sistem ekonomi sosialis terpusat dengan sistem ekonomi liberal (kapitalis) dapat menggambarkan sedikitnya tentang Komune Rakyat Cina secara umum. Perbedaan tersebut di antaranya:

Gambaran perbedaan antara sistem ekonomi sosialis terpusat dengan liberal secara garis besar perbedaan atas kepemilikan alat produksi serta peran pemerintah. Selain itu dalam sistem ekonomi terpusat RRC 1956, dewan negara yang terdapat dalam sistem pemerintahan juga cukup banyak, berbeda dengan tahun setelahnya yang lebih menjadi satu-kesatuan. Berikut pembagian dewan negara pada 1956:<sup>58</sup>

- |                                       |                              |
|---------------------------------------|------------------------------|
| 1. Menteri Dalam negeri               | 25. Menteri Industri Minyak  |
| 2. Menteri Luar Negeri                | 26. Menteri Pertanahan       |
| 3. Menteri Pertahanan                 | 27. Menteri Perumahan        |
| 4. Menteri Kepolisian Distrik         | 28. Menteri Pembangunan Kota |
| 5. Menteri Kejaksaan                  | 29. Menteri Kereta Api       |
| 6. Menteri Pengawasan                 | 30. Menteri Komunikasi       |
| 7. Menteri Keuangan                   | 31. Menteri Pos              |
| 8. Menteri Beras                      | 32. Menteri Pertanian        |
| 9. Menteri Perdagangan                | 33. Menteri Tanah Pertanian  |
| 10. Menteri Pelayanan Kota            | 34. Menteri Kehutanan        |
| 11. Menteri Produksi Air              | 35. Menteri Industri Hutan   |
| 12. Menteri Perdagangan Internasional | 35. Menteri Irigasi          |
| 13. Menteri Industri Emas             | 37. Menteri Tenaga Kerja     |
| 14. Menteri Industri Kimia            | 38. Menteri Kebudayaan       |

<sup>58</sup> Li Shoucu, *Zhongguo Zhengfu Zhidu*, Zhongyang Minzhu, Daxue Press (English Version), Beijing, 1997, hlm. 145, dalam Agus Setiawan, "Pengaruh Modernisasi Ekonomi Era Deng Xiaoping dan Jiang Zemin Terhadap Partai Komunis Cina", *skripsi* tidak diterbitkan, Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, 2004, hlm. 101-102.

15. Menteri Industri Bahan Bangunan
16. Menteri Industri Mesin I
17. Menteri Industri Mesin II
18. Menteri Industri Mesin III
19. Menteri Industri Alat Elektronik
20. Menteri Industri Batu Bara
21. Menteri Industri Tekstil
22. Menteri Industri Ringan
23. Menteri Bahan Makanan
24. Menteri Industri
39. Menteri Pendidikan Tinggi
40. Menteri Pendidikan
41. Menteri Kesehatan
42. Menteri Komite Olahraga
43. Menteri Urusan Suku Bangsa
44. Menteri Urusan Orang Cina
45. Menteri Perencanaan Nasional
46. Menteri Ekonomi Nasional
47. Menteri Teknologi Nasional

Jumlah dewan negara 1956 ada 47 unit. Hal ini juga disesuaikan dengan sistem ekonomi yang berlaku. Sama halnya dengan sistem Komune Rakyat yang dilakukan RRC pada 1958, pengaturan sistem administratif yang terpusat serta kolektivisasi atas lahan pertanian. Selain itu, aspek kehidupan masyarakat seperti pendidikan, tempat tinggal, pekerjaan juga bagian dari sistem administratif yang diatur Komune Rakyat. Secara garis besar tidak ada privatisasi ekonomi dan kehidupan sosial atas masyarakat. Setelah Komune Rakyat terbentuk, Mao juga menuntut peningkatan target produksi pertanian dan industri. Bentuk aplikasi dari keberadaan Komune Rakyat yakni bertujuan untuk mengembangkan ekonomi RRC melalui industrialisasi dengan memanfaatkan tenaga kerja melimpah dan murah. Pada Mei 1958 kampanye Lompatan Jauh ke Depan dilontarkan oleh Mao untuk melancarkan pengembangan industrialisasi cepat.

Perencanaan peningkatan target produksi dilakukan pada produksi baja, besi, padi, gandum dan kapas. Baja adalah salah satu target produksi yang diunggulkan dengan target produksi sekitar 6,2 juta ton sampai 12 juta ton per tahunnya.<sup>59</sup> Hal ini bertujuan untuk mengungguli produksi Uni Soviet bahkan Inggris dalam kurun waktu yang cepat. Produksi beras ditargetkan 500 triliun kilogram per tahunnya,<sup>60</sup> dan pada 1958 produksi padi diperoleh 215 juta ton.<sup>61</sup> Produksi kapas di salah satu provinsi RRC yakni Henan 2,1 juta ton pada 1958-1959, begitu juga produksi gandum yang mencapai 51 juta ton pada 1958.<sup>62</sup>

---

<sup>59</sup> Frank Dikotte, *op.cit.*, hlm. 85.

<sup>60</sup> Jung Chang and Jon Halliday, *Mao The Unknown Story*, (New York: Ancor Book, 2006), hlm. 419-420.

<sup>61</sup> Priyanto Wibowo, *op.cit.*, hlm. 235.

<sup>62</sup> Frank Dikotte, *op.cit.*, hlm. 188.

Selama Lompatan Jauh ke Depan, awalya ekonomi RRC megalami pertumbuhan. Produksi besi meningkat 45 % pada 1958 dan gabungan 30 % selama dua tahun ke depan, tetapi anjlok pada 1961, dan tidak mencapai angka pertumbuhan layaknya hasil pada 1958 sampai pada 1964 .<sup>63</sup>

Keberagaman hasil produksi di beberapa provinsi RRC merupakan bentuk tidak terorganisirnya sistem Komune Rakyat dalam menjalankan kebijakan peningkatan target produksi. Jumlah tenaga kerja, waktu kerja, serta pembagian hasil kerja selama kampanye Lompatan Jauh ke Depan berjalan dengan tidak terorganisir di beberapa wilayah. Menurut Biro Statistik RRC kegagalan ini menyebabkan setidaknya 10 juta orang meninggal selama 1959-1962.<sup>64</sup> Ada beberapa faktor yang menyebabkan kegagalan atas gerakan Lompatan Jauh ke Depan yakni:

1. Tenaga kerja produktif di bidang agraris ditransfer seluruhnya ke bidang industri menyebabkan kurangnya tenaga petani yang menanam tanaman untuk stok bahan pangan;
2. Angka-angka statistik yang dilambungkan dan tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Faktor ini menyebabkan petinggi Beijing mengira bahwa program ini sangat sukses yang selanjutnya menuai bencana yang lebih besar, berupa bencana kelaparan yang terbesar sepanjang sejarah. Empat puluh juta jiwa mati dalam waktu dua tahun;
3. Rakyat yang dipekerjakan masih terlalu awam sehingga baja yang dihasilkan berkualitas rendah;
4. Penggunaan bahan bakar untuk memacu industri begitu besar jumlahnya sehingga mengakibatkan kekurangan bagi bidang lainnya.<sup>65</sup>

Setelah banyak mengalami kerugian yang diderita akibat kampanye Lompatan Jauh ke Depan terutama banyaknya laporan bencana kelaparan dan kematian yang terjadi di provinsi, beberapa pejabat partai seperti Liu Shaoqi kemudian memperlmasalahkan kampanye tersebut dan mulai membahasnya dalam serangkaian acara rapat partai. Sampai pada Januari 1962, dalam sebuah rapat partai yang dilakukan di Beijing, Liu Shaoqi menyampaikan gambaran atas bencana kelaparan yang terjadi di beberapa provinsi diakibatkan oleh pemberlakuan Lompatan Jauh ke Depan. Pernyataan tersebut membuat otoritas

---

<sup>63</sup> *Kematian Akibat kekerasan*, dalam <http://thegreatleapforward.tumblr.com>, diunduh pada 29 Februari 2015.

<sup>64</sup> Frank Dikotte, *loc.cit.*

<sup>65</sup> Ririn Darini, *op.cit.*, hlm. 42.

Mao Zedong berkurang dalam segi dukungan, dan karena beberapa hal sebelumnya Mao akhirnya menanggalkan jabatannya sebagai kepala negara RRC dan digantikan oleh Liu Shaoqi. Turunnya Mao Zedong sebagai pemimpin negara, keberadaannya sendiri masih merupakan pemimpin tertinggi RRC yang disegani rakyat.

Pasca pengunduran diri Mao Zedong dari kepemimpinan negara, Mao yang memfokuskan mengarahkan partai mulai mempersiapkan banyak hal. Salah satunya dengan menggalang dukungan dari rakyat RRC untuk dirinya melalui beberapa artikel yang ditulisnya melalui surat kabar partai. Artikel tersebut memuat tentang penentangannya terhadap salah satu drama di RRC yang menggambarkan bentuk sindiran atas kebijakan Mao sebelumnya yang menyebabkan kelaparan dan kematian sebagian besar rakyatnya. Penguasaan atas media juga merupakan langkah yang ditempuh Mao, *Harian Rakyat*<sup>66</sup> salah satunya.

Mei 1966 Revolusi Kebudayaan resmi diluncurkan oleh ketua Mao setelah beberapa perdebatan yang terjadi dalam anggota partai. Secara struktural, hal ini di bawahi oleh Politbiro dan Komite Pusat.<sup>67</sup> Sebaliknya, meskipun di bawahi oleh struktural partai, Mao juga menyiapkan langkah organisasional dengan membentuk Badan Otoritas Revolusi Kebudayaan di luar komando partai, yang dipimpin Chen Boda.<sup>68</sup> Setelah penguasaan atas media dan otoritas terhadap Revolusi Kebudayaan, langkah berikutnya adalah menyiapkan tentara. Mao berpendapat bahwa dalam sebuah revolusi tanpa tentara rakyat, hal itu tidak akan berjalan, sama halnya dengan keberadaan *Pengawal Merah*. *Pengawal Merah* merupakan organisasi bebas yang terdiri dari mahasiswa di perguruan tinggi dan pelajar sekolah tingkat dua yang dimobilisasi untuk memuja Mao dan mengarahkannya untuk kepentingan Revolusi Kebudayaan.<sup>69</sup> Awalnya organisasi

---

<sup>66</sup> *Harian Rakyat* merupakan koran resmi partai. Kebanyakan media ini memuat terkait propaganda yang dilakukan oleh elite partai, sebagian besar rakyat Cina juga menganggapnya sebagai corong penguasa. (Jung Chang, *op.cit.*, hlm. 308-309).

<sup>67</sup> *Ibid.*

<sup>68</sup> *Ibid.*

<sup>69</sup> “The Cultural Revolution and It’s Aftermath 1966-1976”, dalam <http://nisis.weebly.com>, diunduh pada 19 Mei 2015.

tersebut dibentuk untuk berjuang melawan guru di institusinya, tetapi kemudian dengan cepat berganti peran menjadi garda terdepan dalam revolusi. *Pengawal Merah* diperoleh dari anak usia 12-30 tahun, tapi kebanyakan berasal dari umur belasan tahun. Selain itu *Pengawal Merah* dimanfaatkan Mao untuk menyingkirkan lawan politiknya, hal ini karena organisasi tersebut tidak termasuk dalam struktural partai.<sup>70</sup>

*Pengawal Merah* secara resmi mulai diturunkan pada Agustus 1966. Mereka terdiri dari kalangan terpelajar di antaranya mahasiswa dan siswa. Dan kebanyakan anggotanya berasal dari anak-anak pejabat partai. Sebuah keharusan bagi para kaum terpelajar RRC pada masa Revolusi Kebudayaan untuk ikut bergabung menjalankan revolusi di bawah mandat Mao Zedong secara langsung. Pemuda-pemudi yang ikut tergabung dalam Liga Pemuda Komunis sebelumnya juga melakukan hal yang sama. Pada dasarnya dalam gerakan ini, sebagian besar yang menjadi objek perubahan adalah sektor pendidikan, maka keterlibatan kaum terpelajar menjadi rantai tertinggi dalam kerusuhan yang terjadi selama Revolusi Kebudayaan berlangsung. Peking adalah wilayah yang menjadi sasaran utama, dan dikendalikan langsung oleh Mao melalui otoritas Revolusi Kebudayaan. Secara garis besar Peking merupakan wilayah RRC yang mengalami kerusakan terparah setelah *Pengawal Merah* diturunkan untuk mewujudkan revolusi. Wilayah lain seperti Chengdu, Hunan dan lainnya merupakan wilayah komando yang diberikan dari Peking.

Otoritas Revolusi Kebudayaan yang memberikan wewenang berlebihan terhadap *Pengawal Merah* memberikan dampak yang sangat besar. Bidang pendidikan di dalamnya Revolusi Kebudayaan diarahkan untuk mengkombinasikan dan meyelaraskan perkembangan ekonomi dengan revolusi sosial untuk mengatasi ketergantungan terhadap penguasa.<sup>71</sup> Kebijakan yang berlaku dalam gerakan ini semuanya dituangkan dalam *The Little Red Book*, yang diperuntukkan secara umum terutama *Pengawal Merah*. Keseluruhan isi dari buku ini menjadi panutan bagi para tentara revolusioner Mao. Kekuasaan Mao Zedong dan partai dalam hal

---

<sup>70</sup> *Ibid.*

<sup>71</sup> Poltak Partogi Nainggolan, *op.cit*, hlm. 76-77.

ini tidak terbatas, perintah ketua Mao adalah sebuah keharusan bagi mereka, doktrinasi atas perjuangan kelas adalah landasan mewujudkan revolusi. Teror yang diciptakan untuk memberantas pejabat borjuis reaksioner dan orang-orang yang dianggap sebagai penempuh jalan revisionis merupakan bentuk penghancuran fondasi partai. Hal ini dianggap dapat mengembalikan otoritas Mao. Sebuah slogan yang menggambarkan misi *Pengawal Merah* yakni “Kami bersumpah akan melancarkan perang berdarah melawan siapa pun yang berani menghalangi Revolusi kebudayaan dan siapa pun yang menentang Ketua Mao.”<sup>72</sup>

Kebrutalan *Pengawal Merah* bukan hanya atas dasar loyalitas yang diberikan kepada Mao. Sektor pendidikan yang selama ini menjadi bayang-bayang bagi para kaum terpelajar, institut pendidikan dijadikannya sebagai perevolusioneran atas birokrat-birokratnya. Pada Agustus 1960an, Lin Biao tampil di depan umum ketika diadakanya rapat raksasa di lapangan Tiananmen.<sup>73</sup> Hampir satu juta lebih kaum pemuda menghadiri rapat tersebut. Instruksi yang diberikan langsung oleh Menteri Pertahanan dan Keamanan Lin Biao untuk melancarkan aksi penghancuran 4 kuno, di antaranya adalah ide kuno, kebudayaan kuno, adat-istiadat kuno dan kebiasaan kuno. Penghancuran ini adalah bagian dari pemberontakan terhadap penguasa, revolusi di bidang pendidikan serta penghancuran dunia lama untuk sebuah kemunculan dunia baru serta manusia baru.<sup>74</sup> Proses rekrutmen anggota lebih ditekankan berdasarkan latarbelakang keluarga, keluarga petani, pejabat partai, pegawai pemerintahan adalah bagian yang diutamakan. Bagi orang-orang yang termasuk di luar latarbelakang tersebut akan mendapatkan cap sebagai orang kanan, reaksioner, kontrarevolusi, penempuh jalan revisionis atau kapitalis serta banyak sebutan lagi bagi mereka.

Pemuda-pemuda yang memenuhi persyaratan untuk masuk anggota *Pengawal Merah*, juga akan mendapatkan proses pembuktian dengan melaksanakan beberapa tugas dasar sebagai pengawal Mao. Hal terkecil yang dilakukan masih meliputi lingkup sekolah mereka, berbeda halnya dengan yang

---

<sup>72</sup> Jung Chang, *op.cit.*, hlm. 316.

<sup>73</sup> *Ibid.*, hlm. 317.

<sup>74</sup> *Ibid.*

terjadi di Peking yang sudah diturunkan sampai pada tahap penghancuran turun ke jalan tanpa ada pengawasan secara resmi dan ketat. Sebelumnya, kegiatan pendidikan formal sudah dihentikan karena kesibukan Revolusi Kebudayaan, dan sejak Juni ada peraturan tidak tertulis yang mengharuskan semua siswa tinggal di sekolah selama dua puluh empat jam untuk mengabdikan diri dan melancarkan Revolusi Kebudayaan.<sup>75</sup> Secara keseluruhan teror dan pengrusakan yang dilakukan oleh *Pengawal Merah* digambarkan selama 1966-1968 setelah Revolusi Kebudayaan dilaksanakan. Para intelektual dipukuli, bahkan melakukan bunuh diri atau maeninggal karena mengalami luka-luka dan kelaparan. Selain itu, ribuan orang juga dipenjarakan, bahkan jutaan rakyat Cina dikirim ke desa-desa di pedalaman untuk melakukan kritik diri serta belajar dan bekerja diantara para petani.<sup>76</sup> Kerusakan-kerusakan yang terjadi mencapai pucaknya pada musim panas 1967. Para pekerja yang menentang tindakan pengrusakan dan penghancuran yang dilakukan *Pengawal Merah* dan golongan pelajar terlibat baku tembak hampir di seluruh kota terutama di Beijing dan Guangzhou. Serta pertarungan besar-besaran yang melibatkan antara golongan militan setempat dan *People's Liberation Army* (PLA) di Wuhan yang mengakibatkan hampir lebih dari ribuan demonstran meninggal.<sup>77</sup> Selain melakukan kekerasan dan penghancuran, *Pengawal Merah* juga melakukan propaganda mengenai Revolusi Kebudayaan secara masiv. Propaganda yang dilakukan berupa nyanyian revolusioner, menempelkan poster besar yang menggambarkan Mao, menyebarkan ajaran-ajaran Mao serta mengganti nama-nama jalan di berbagai daerah dengan nama-nama yang revolusioner. Beberapa daerah yang secara masif menjadi sasaran propaganda *Pengawal Merah* yakni seperti Peking, Hangcow, Lhasa, Sining, Tientsin dan Shanghai.<sup>78</sup>

Aktifitas yang ditunjukkan dalam gambar tersebut menunjukkan bentuk loyalitas yang tinggi para pelajar terhadap Mao. Antusias terhadap ajaran Mao

---

<sup>75</sup> *Ibid.*, hlm.322-323.

<sup>76</sup> Spice Stanford, "Introduction to the Cultural Revolution", adapted from Jonathan Spence, *The Search for Modern China*, 2001, dalam <http://spice.stanford.edu>.

<sup>77</sup> *Ibid.*

<sup>78</sup> "Red Guards Destroy the Old and Establish the New" dalam *Peking Review* Vol. 9 No. 36, 2 September 1966.

yang tertuang dalam *Buku Mera Kecil* menjadikan *Pengawal Merah* aktif dalam melancarkan propaganda serta kritik terhadap institusi-institusi pendidikan dan lembaga lainnya yang menjadi sarana revolusi yang diinginkan Mao. Pada dasarnya *Pengawal Merah* tidak terkontrol dan tidak terorganisir dengan baik, namun secara struktural dalam beberapa tempat mereka memiliki badan pengawas yang diperoleh dari anggota senior atau anak pejabat partai yang memiliki jabatan tinggi. Pendistribusian tingkat koordinasi yang dimiliki sama halnya dengan struktur negara tradisional yang terdapat di Cina, yakni:



Bentuk koordinasi tersebut sebagian besar digunakan sebagai penyaluran instruksi atau mandat dari Mao maupun partai untuk mengatur jalannya Revolusi Kebudayaan. Selain *Pengawal Merah*, kalangan militer yakni Tentara Pembebasan Rakyat (TPR) juga merupakan salah satu yang mempunyai peranan penting dalam arena politik RRC masa Mao Zedong.

TPR yang merupakan pasukan militer komunis juga banyak berpengaruh terhadap jalannya Revolusi Kebudayaan di bawah komando Lin Biao. Lin Biao merupakan Menhankam yang ditetapkan setelah pemecatan Peng Dehuai dalam Sidang Pleno ke-8 Komite Sentral VIII pada 2-8 Agustus 1959 sebagai Menhankam sebelumnya.<sup>79</sup> Kampanye terbesar yang pernah ada di Cina sekitar 1966-1969 tersebut dapat diidentifikasi menjadi gerakan terbesar yang melibatkan 3 komponen besar dalam masyarakat yakni *Pengawal Merah*, TPR, dan Komune Rakyat. Peran militer sangat besar sepanjang perjalanan bangsa Cina. Selama teror dan penghancuran yang sudah dilakukan selama Revolusi Kebudayaan, jumlah korban manusia diperkirakan sebesar 729.511 jiwa akibat

<sup>79</sup> Poltak Partogi Nainggolan, *op.cit.*, hlm. 39.

kebrutalan dan keagresifan *Pengawal Merah*.<sup>80</sup> Berikut beberapa foto yang menunjukkan peristiwa selama Revolusi Kebudayaan:

Kekerasan dan kebrutalan *Pengawal Merah* selama Revolusi Kebudayaan mengakibatkan kondisi RRC mengalami kekacauan besar dan tidak terkendali. Bahkan hukuman-hukuman yang diberlakukan selama pemberantasan orang-orang kontrarevolusioner menjadi bentuk kekejaman baru dalam rezim Mao Zedong selama pelaksanaan Revolusi Kebudayaan. Bentuk hukuman yang banyak diterima selama peristiwa tersebut yakni berupa kritik diri di depan umum serta pengiriman paksa ke kamp-kamp pelatihan di pedesaan dengan slogan belajar dari para petani.

### **2.3.2 Implikasi Terhadap Kondisi Politik dan Ekonomi RRC**

Revolusi Kebudayaan yang berkisar antara 1966-1969 merupakan kampanye terbesar yang pernah ada. Tujuan gerakan ini adalah sebagai upaya pembenaran atas politik Mao sebelumnya. Selama dasawarsa sebelumnya banyak kemelut yang terjadi dalam tubuh partai. Begitu pula masalah perekonomian pasang surut RRC yang diakibatkan kampanye Mao. Setelah peluncuran Revolusi Kebudayaan, kewenangan penuh yang dimiliki Mao dan partai menjadi salah satu tidak terkontrolnya stabilitas politik dan ekonomi di RRC. Fokus utama Mao pada masa tersebut adalah untuk menciptakan kerusuhan sebagai bentuk revolusi budaya proletar agung. Perjuangan kelas antara kaum proletar dengan kaum kapitalis dipertaruhkan dalam Revolusi Kebudayaan. Diskriminasi yang dilakukan atas pejabat partai dan pejabat non partai yang keluar dari garis revolusioner Mao, juga dilakukan sebagai upaya penyelamatan keterdesakannya setelah kaum revisionis mendapatkan tempatnya kembali. Seperti Liu Shaoqi yang menduduki kepala pemerintahan, serta Deng Xiaoping yang diangkat kembali menduduki jabatan sebelumnya. Peta politik RRC digambarkan dengan kekuatan tertinggi yakni PKC dengan Mao Zedong sebagai tokoh utama dan TPR sebagai organisasi pendukung. Selain dua kekuatan politik tersebut terdapat pula kekuatan politik

---

<sup>80</sup> Jung Chang, *loc.cit.*

lainnya seperti kelompok revolusioner-radikal seperti halnya Kelompok Empat yang terdiri dari Jiang Qing, Zhang Chungqiao, Wang Hungwen, dan Yao Weyuan. Kelompok pragmatis-realis yang merupakan aliansi antara kekuatan Liu Shaoqi dan Deng Xiaoping serta kelompok moderat yang diwakili oleh kekuatan Zhou Enlai dan Hua Guofeng.<sup>81</sup> Pergolakan politik dalam tubuh partai banyak disebabkan oleh perbedaan garis pemikiran dan perjuangan antara beberapa kelompok yang berlangsung hampir 8 dasawarsa sejak berdirinya PKC. Revolusi Kebudayaan merupakan salah satu fase terbesar yang menggambarkan pergolakan politik antara beberapa kekuatan politik RRC yang berujung dengan tersingkirnya kelompok pragmatis-realis. Upaya penyingkiran lawan-lawan politiknya tersebut juga merupakan salah satu tujuan Mao, selain dari upaya-upaya perjuangan kelas yang terjadi di RRC selama masa Revolusi Kebudayaan. Pecahnya kekuatan politik RRC juga diiringi oleh kekacauan lain yang diakibatkan oleh kerusuhan selama Revolusi Kebudayaan.

Penghancuran-penghancuran yang dilakukan melalui *Pengawal Merah* dan otoritas Revolusi Kebudayaan banyak menimbulkan kerugian bagi negara RRC. Hal ini meliputi kerugian dalam kehidupan sosial, ekonomi dan politik RRC. Ditinjau dari sisi kehidupan sosial, setelah didirikannya Komune Rakyat, kehidupan negara komunis yang diinginkan belum bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini dikarenakan kesiapan yang belum matang yang dimiliki oleh pemerintahan RRC dalam hal pengolahan sistem administrasi meliputi target produksi dan distribusi kebutuhan atas Komune Rakyat. Memiliki tenaga kerja murah yang melimpah ternyata tidak dapat menjamin keberhasilan sistem tersebut, namun dibutuhkan kecakapan dan kemampuan yang dimiliki oleh Sumber Daya Manusia (SDM). Selama berlangsungnya Revolusi Kebudayaan, kehidupan sosial masyarakat Cina tidak terkendali. Teror yang diberikan *Pengawal Merah* menyebabkan trauma dan ketakutan masyarakat. Bidang pendidikan menjadi salah satu sektor yang mengalami ketidakproduktifan. Pembaruan yang dilakukan dalam bidang pendidikan dengan menekankan ideologi serta meningkatkan perannya terhadap produksi di daerah pedesaan.

---

<sup>81</sup> Poltak Partogi Nainggolan, *op.cit.*, hlm. 31.

Sektor industri maupun pendidikan, semuanya dialihkan kepada perkembangan pedesaan.

Ditinjau dari segi politik, Revolusi kebudayaan tidak memberi kemenangan yang mutlak kepada golongan Maois. Kepemimpinan yang muncul pada akhir kampanye masih merupakan suatu koalisi campuran dari kepentingan-kepentingan yang berbeda. Revolusi Kebudayaan mengakibatkan kira-kira separuh dari 55 elit politik sebelum 1966 dipecat atau diturunkan jabatannya.<sup>82</sup> Diangkatnya sejumlah besar pimpinan politik baru pada jabatan-jabatan yang lebih tinggi, periode Revolusi Kebudayaan jelas merupakan suatu periode mobilitas besar-besaran. Tokoh-tokoh militer paling banyak mendapat keuntungan berupa kedudukan dalam Komite Sentral dan sebagian besar posisi-posisi penting pada tingkat propinsi. Pengaruh militer dalam kampanye tersebut hampir menguasai keseluruhan aspek perjalanan revolusi budaya tersebut, karena pada dasarnya perpolitikan pasca Revolusi Kebudayaan mengalami perputaran peran dari supremasi sipil ke dominasi kalangan militer.

Kemunculan-kemunculan aktor baru dalam perpolitikan di negara RRC pasca Revolusi Kebudayaan semakin mempersempit peluang Mao untuk mendapatkan kewenangan penuh atas partai. Namun demikian Mao masih menjadi pujaan rakyat dan kawan seperjuangannya sebagai seorang ideolog Marxis sepanjang sejarah Cina. Lin Biao adalah salah satu aktor politik yang tampak cemerlang dalam partai pasca Revolusi Kebudayaan dan dianggap dapat mengancam posisi Mao Zedong sebagai pemimpin tertinggi partai. Selain itu Liu Shaoqi dan Deng Xiaoping memperoleh pemulihan setelah disingkirkan ketika Revolusi Kebudayaan berjalan. Dominasi kaum pragmatis dan revisionis terjadi setelah akhirnya Revolusi Kebudayaan gagal dalam perjalanannya, dan bahkan mengakibatkan kerugian besar bagi RRC.

Kekuatan terbesar RRC pada 1970an adalah TPR dan PKC. Dominasi militer dan keberadaan partai adalah dua hal yang dimiliki Cina setelah kegagalan Revolusi Kebudayaan. Keberadaan Lin Biao sebagai seorang panglima militer, karena mampu mengendalikan TPR mengakibatkan perseteruannya dengan Mao

---

<sup>82</sup> Ririn Darini, *op.cit.*, 54-55.

Zedong memuncak ketika Lin Biao berusaha melakukan kudeta yang akhirnya juga mengalami kegagalan. Mao berusaha mengembalikan kedudukannya dengan turun ke desa-desa dengan dibantu oleh rekannya Zhou Enlai sehingga pengaruh keduanya semakin kuat baik dalam pemerintahan maupun partai.

Selain mempengaruhi kondisi politik RRC, Revolusi Kebudayaan juga membawa pengaruh besar terhadap perekonomian nasional. Misalnya, produksi industri mengalami penurunan pada 1967 hingga akhirnya pada 1969 dapat distabilkan kembali. Banyaknya kerusakan yang terjadi selama Revolusi Kebudayaan terhadap sarana publik, begitu juga dengan pabrik-pabrik yang sedang dikembangkan, mengakibatkan kemacetan produksi bahkan pengangguran yang mencapai angka cukup tinggi. Jika ditinjau secara keseluruhan, bukan hanya dari segi pengadaan usaha (pabrik), tetapi sekolah-sekolah, bangunan kuno dan peninggalan bersejarah lainnya mengalami penghancuran total. Imbas yang diperoleh adalah kemunduran di bidang pendidikan serta kehilangan warisan budaya dan seni Cina terutama hal-hal yang berhubungan dengan warisan tulisan. Hubungan dengan negara luar terutama Barat, selama Revolusi Kebudayaan diberlakukan politik isolasasi sama halnya dengan Jepang terdahulu. Sebaliknya pada 1969 sampai 1973 adalah masa transisi. Mao Zedong dan Zhou Enlai yang berperan penting atas politik luar negeri RRC, bersepakat atas keterbukaan pada Barat. Salah satu unsur dari keterbukaan tersebut adalah dengan menjalankan normalisasi hubungan RRC dengan lebih dari 100 negara, dan mendapatkan pengakuan dari PBB atas negara RRC pada Oktober 1971.<sup>83</sup>

Secara garis besar, kondisi ekonomi pasca Revolusi Kebudayaan mengalami kemunduran dalam pertumbuhan industri juga pertanian. Meskipun bidang pertanian tidak terlalu banyak mengalami penurunan, hal ini masih berpengaruh terhadap perekonomian RRC. Setelah produksi industri dapat distabilkan, RRC mulai memperbaiki beberapa hal terkait kebijakan ekonomi dengan berniat melakukan modernisasi. Zhou Enlai adalah salah satu yang mengusulkan gagasan modernisasi tersebut sehingga pada akhirnya diwujudkan pada masa Reformasi Ekonomi di bawah kepemimpinan baru Deng Xiaoping

---

<sup>83</sup> MLM Revolutionary Study Group, *op.cit.*, hlm. 56

sepeninggal Mao Zedong. Mengenai kondisi politik tahun-tahun setelah Revolusi Kebudayaan, elit partai yang sebelumnya mengalami pengasingan dipulihkan kembali kedudukannya seperti Deng Xiaoping diperbolehkan kembali menjadi wakil Perdana Menteri dan sebagai anggota Politbiro pada 1973, setelah Kongres Partai ke-10.<sup>84</sup> Begitu pula Zhou Enlai yang mampu menjadi orang kedua setelah Mao Zedong sebagai wakil ketua. Revolusi Kebudayaan juga menjadi mobilisasi massa terbesar abad 20 di bawah kepemimpinan Mao dengan *Pengawal Merah*-nya.

---

<sup>84</sup> Andriati Ariastuti, "Pergolakan Politik Di Cina Tahun 1978-1989", *Skripsi* tidak diterbitkan, Jurusan Ilmu Sejarah Universitas Jember 1998, hlm. 36.

## BAB 3

### PKC DALAM REFORMASI EKONOMI RRC REZIM DENG XIAOPING

#### 3.1 Kepemimpinan Deng Xiaoping dalam PKC

Partai Komunis Cina mengalami pergantian kepemimpinan selama beberapa generasi dimulai dari Chen Duxiu sampai pada Deng Xiaoping yang kepemimpinan resminya berakhir pada 1989. Deng Xiaoping merupakan salah satu pemimpin terkemuka dalam sejarah kepemimpinan PKC. Seorang pemimpin yang tergolong dalam pola pemimpin pragmatis-realis dan ahli ekonomi yang dimiliki oleh RRC. Berada di Perancis selama kurang lebih 5 tahun terhitung sejak kedatangannya pada 1920, Deng mengawali karirnya dengan bergabung dengan *Chinese Communist Youth* pada 1922 dan pada 1925 Deng bergabung dengan partai.<sup>1</sup> Bergabungnya Deng dengan partai merupakan bantuan dan dukungan dari Zhou Enlai yang juga menjadi rekannya selama berada di Perancis. Karirnya dalam partai dimulai sebagai Ketua Sekretariat Komite Sentral dan anggota Politbiro yang termasuk dalam struktural kepengurusan PKC berdasarkan

---

<sup>1</sup> Nora Wang, "Deng Xiaoping: The Years in France", dalam *The China Quarterly*, Vol. 92, Desember 1982, hlm. 698.

Kongres PKC VII, September 1956 dan Mei 1958.<sup>2</sup> Deng menjadi anggota Politbiro pada kepengurusan berdasarkan Kongres PKC X 1973 dan Komite Tetap Politbiro bersama Mao Zedong, Zhou Enlai, Lin Biao dan beberapa anggota lain dengan Mao Zedong yang juga menjabat sebagai ketua partai.

Peranan Deng Xiaoping semakin terlihat dalam kepemimpinannya sebagai pemimpin tertinggi PKC setelah Mao meninggal pada 1976. Pada tahun yang sama Zhou Enlai juga meninggal akibat penyakit kanker yang dideritanya. Sepeninggal Mao, tampuk kepemimpinan partai masih dipegang oleh Hua Guofeng yang ditunjuk langsung oleh Mao. Sementara itu Deng yang direhabilitasi setelah Revolusi Kebudayaan diangkat sebagai Perdana Menteri (PM) Senior. Kedekatannya dengan Zhou Enlai terutama dalam usaha perbaikan ekonomi negara dalam mewujudkan Empat Modernisasi, menguatkan niat Zhou untuk menjadikan Deng sebagai penggantinya menduduki kursi PM Utama. Sebaliknya setelah PM Zhou meninggal, Deng justru dipecat sebagai PM Senior dan Hua Guofeng menggantikan posisi PM.<sup>3</sup> Pertimbangan politik yang dilakukan Mao dengan menunjuk Hua Guofeng sebagai penerusnya dengan tujuan menjaga stabilitas politik RRC serta menghindari perebutan kekuasaan oleh kelompok radikal dengan kelompok pragmatis. Keputusan tersebut menjadikan Kelompok Empat yang dikenal dengan *Gang Four*<sup>4</sup> melancarkan aksi kudeta dengan menganggap golongannya sebagai penerus sah Mao. Kelompok ini terdiri dari Zhang Chungqiao, Yao Wenyuan, dan Jiang Qing yang duduk dalam Komite Sentral PKC serta Wang Hungwen.<sup>5</sup> Pada akhirnya kelompok ini dipecat dari PKC pada Sidang Pleno Ke-3 Kongres Komite Sentral PKC X pada 1977. Dalam waktu yang sama Hua Guofeng resmi ditetapkan sebagai ketua partai serta Ketua

---

<sup>2</sup> Indarwati Ariestiany, “Keterkaitan Partai Komunis Cina dengan Pemerintah Cina”, *skripsi* tidak diterbitkan, Jurusan Sastra Asia Timur Program Studi Cina Fakultas Sastra Universitas Indonesia, 1996.

<sup>3</sup> Poltak Partogi Nainggolan, *Reformasi Ekonomi RRC Era Deng Xiaoping: Pasar Bebas dan Kapitalisme dihidupkan Kembali*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1995), hlm. 46.

<sup>4</sup> *Gang Four* atau yang juga dikenal dengan Kelompok Empat merupakan kelompok radikal pembela Mao Zedong atas kebijakan ekstremnya untuk mencanangkan Revolusi Kebudayaan pada 1960-1970an. Terrence Cheng, *Anak-anak Langit*, Penerjemah Isma B. Koesalamwardi, (Jakarta: Serambi, 2002), hlm. 448.

<sup>5</sup> Poltak Partogi Nainggolan *op.cit.*, hlm. 41-42.

Komisi Militer Komite Sentral Partai dan Deng Xiaoping sebagai Wakil Ketua I partai, Wakil Ketua Komisi Militer Komite Sentral partai, Wakil PM serta Kepala Staf Umum.<sup>6</sup>

Menduduki beberapa peranan penting dalam hirarki partai dan negara, terlebih dengan Reformasi Ekonomi yang digagasnya menjadikan Deng sebagai salah satu senior yang dihormati oleh beberapa golongan. Secara resmi Reformasi Ekonomi dilaksanakan pada 1978 sampai pada 1990an. Gagasan Empat Modernisasi yang dilontarkan dalam Reformasi Ekonomi oleh Deng di antaranya adalah modernisasi bidang pertanian, modernisasi bidang industri, modernisasi ilmu pengetahuan dan teknologi, serta modernisasi pertahanan nasional. Kepemimpinan Deng dalam PKC menggambarkan model politik Deng sebagai seorang yang pragmatis. Selain itu Deng merupakan pemimpin yang toleran terhadap liberalisme dan mampu mengendalikan hegemoni politik dalam PKC dan menginginkan kelonggaran kontrol politik atas perekonomian RRC.<sup>7</sup> Sebagai seorang yang berasal dari kalangan militer, Deng banyak mempunyai pengaruh dalam TPR. Kenaikan Deng kembali dalam politik RRC juga merupakan dukungan yang diberikan oleh senior-senior di TPR. Keterampilannya dalam menjalin komunikasi dan negosiasi dengan kelompok lain menjadikan Deng mampu mengendalikan stabilitas politik RRC hampir selama 2 dasawarsa setelah Reformasi Ekonomi dilaksanakan.

Situasi politik RRC pada 1980an memunculkan faksi-faksi dalam partai. Setelah Reformasi Ekonomi dilaksanakan, lambat laun perekonomian RRC mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini ditandai dengan dibukanya pasar bebas berskala global, serta peningkatan persaingan antar individu untuk meningkatkan perekonomian. Pelaksanaan Reformasi Ekonomi yang relatif cepat juga mengundang sebagian reaksi dari berbagai kalangan seperti halnya mahasiswa. Keterbukaan ekonomi yang berlangsung juga menuntut adanya keterbukaan dalam hal urusan politik. Reaksi tersebut juga didasari atas pecahnya

---

<sup>6</sup> *Ibid.* hlm. 48.

<sup>7</sup> David Shambaugh, "Deng Xiaoping: The Politician", dalam *The China Quarterly* No. 135 September 1993, hlm. 457.

negara Uni Soviet, dan timbulnya proses demokratisasi yang disadari oleh masyarakat RRC.<sup>8</sup> Kondisi lain yang ditimbulkan yakni dalam internal PKC muncul perbedaan pendapat antara kelompok reformis dengan kelompok konservatif dan militer. Kelompok reformis berpendapat bahwa Reformasi Ekonomi harus dilakukan secara sistematis dan cepat untuk mencapai target yang diinginkan terutama dalam peningkatan ekonomi negara serta dalam hal reformasi struktural dalam partai. Sebaliknya kelompok konservatif dan militer memilih lebih berhati-hati dalam melaksanakan Reformasi Ekonomi dan tetap mengutamakan kontrol partai. Untuk menyikapi hal ini, Deng memilih berada di antara keduanya untuk menjaga stabilitas politik RRC dengan tetap mengutamakan pelaksanaan Reformasi Ekonomi.<sup>9</sup> Dengan kata lain, pada suatu waktu Deng mendukung kebijakan ekonomi liberal dan dalam kebijakan lain Deng berada di belakang pihak kelompok konservatif.<sup>10</sup>

Secara garis besar perilaku politik Deng digambarkan dalam beberapa faktor, di antaranya model kerja yang mengutamakan urusan administratif, agenda politik, strategi dan taktik kekuasaan, sumber dan penggunaan kekuasaan, interaksi dengan para kolega, kendali atas para bawahan dan yang akan menjadi penggantinya serta metode dalam membuat keputusan dan implementasi politik.<sup>11</sup> Perilaku politik yang dimiliki Deng berorientasi terhadap ciri kepemimpinan pragmatis-realis. Beberapa faktor tersebut menjadi gambaran perjalanan karir Deng Xiaoping terutama selama kepemimpinannya dalam PKC. Bahkan di luar kepemimpinan resminya, Deng Xiaoping juga merupakan pemimpin yang menempatkan posisinya di belakang layar perpolitikan RRC.

---

<sup>8</sup> A. Dahana, “Partai Komunis Cina dan Dunia yang Berubah”, dalam Umar Suryadi Bakri (Editor), *Pasca Deng Xiaoping: Cina, Quo Vadis?*, (Jakarta: Sinar Harapan: 1996), hlm. 11-15.

<sup>9</sup> Cristine Trisanti Seta, “Konflik Faksionalisme dalam PKC Tahun 1980-1989”, *Skrripsi* tidak diterbitkan, Jurusan Ilmu Politik Program Studi Perbandingan Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 1996, hlm 130-133.

<sup>10</sup> George Black dan Robin Munro, *Black Hands Of Beijing*, (New York: John Wiley & Sons, 1993), hlm. 154-158.

<sup>11</sup> David Shambaugh, *op.cit.*, hlm. 458-460.

### 3.1.1 Reformasi Ekonomi RRC 1978

Berakhirnya Revolusi Kebudayaan merupakan keberlangsungan kondisi ekonomi dan politik yang baru bagi RRC. Rezim kekuasaan yang sebelumnya dikenal dengan kepemimpinan kediktatoran demokratik rakyat yang dibawa oleh Mao Zedong ke dalam keberlangsungan RRC selama 1949-1976. Sepeninggal Mao RRC mengalami modernisasi dalam berbagai bidang yang termaktub dalam Reformasi Ekonomi pada 1978. Deng Xiaoping merupakan tokoh yang membawahi pelaksanaan Reformasi Ekonomi tersebut, dengan bantuan dari beberapa tokoh pragmatis lainnya seperti halnya Chen Yun. Chen Yun merupakan tokoh perancang ekonomi RRC terkemuka pada 1959 yang tergabung dalam kelompok konservatif.<sup>12</sup> Berbeda halnya dengan tokoh kelompok konservatif lainnya, Chen Yun lebih memikirkan kemajuan perekonomian RRC dan memilih berkompromi dengan upaya modernisasi yang dilakukan oleh Deng Xiaoping. Sebagai tokoh senior, Chen merupakan penganut ekonomi Marxis sejati. Teorinya yang terkenal yakni teori sangkar burung. Teori tersebut menjelaskan bahwa teori perencanaan ekonomi dapat diumpamakan sebagai sangkar, sedangkan pasar sebagai perilaku burung yang bergerak bebas secara terbatas. Hal ini membuktikan bahwa Chen juga lebih bersikap hati-hati dalam melaksanakan Reformasi Ekonomi, dengan tetap mempertimbangkan kontrol partai atas pasar-pasar global yang dibuka untuk luar.

Landasan awal pembaruan di RRC merupakan hasil dari Kongres Rakyat Nasional (KRN) ke-4, Sidang Pleno ke-3 Kongres PKC ke II pada 18-23 Februari 1978. Hasil tersebut merumuskan tentang pelaksanaan Empat Modernisasi yang meliputi modernisasi pertanian, modernisasi industri, modernisasi ilmu pengetahuan dan teknologi serta modernisasi pertahanan nasional. Modernisasi dalam pertanian meliputi perluasan kepemilikan lahan secara pribadi oleh petani. Hal ini memungkinkan petani dapat mengembangkan lahan pertaniannya dalam rangka meningkatkan perekonomian mereka. Hal tersebut meliputi pengelolaan hasil produksi, cara kerja serta sistem bagi hasil. Sistem yang dilakukan yakni

---

<sup>12</sup> Pascal L Mahendra, *Isu Sukses Kepemimpinan: Indonesia Pasca Soeharto, Cina Pasca Deng Xiaoping*, (Jakarta: PT Golden Terayon Press, 1995), hlm. 4-5.

dengan cara sistem tanggung jawab produksi, yang menjadikan pendapatan petani ditentukan oleh jenis dan kualitas pekerjaan yang dihasilkan. Pada perkembangannya sistem tanggungjawab tersebut menunjukkan perkembangan yang cukup mengesankan dengan ditandai kenaikan sektor pertanian sebesar 6,6% setahun dan pada 1982 sebesar 12%.<sup>13</sup> Modernisasi industri dilakukan dengan mengadakan sistem desentralisasi dan pemberian wewenang yang lebih besar langsung pada tiap-tiap perusahaan milik negara terutama pada bidang perencanaan, bidang pemasaran, bidang pendanaan, dan ketanagakerjaan. Selain itu juga dibuka pasar-pasar global setelah RRC melakukan politik pintu terbuka.

Modernisasi selanjutnya adalah modernisasi dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini berhubungan dengan pendidikan. Modernisasi tersebut meliputi rencana pembangunan pusat-pusat ilmiah modern dan meyempurnakan sistem penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi secara nasional. Dengan langkah ini, RRC berusaha menempatkan dirinya sejajar dengan bangsa-bangsa yang telah maju dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini terdapat dalam Naskah Rencana Nasional dalam Konferensi Nasional Ilmu Pengetahuan pada Maret 1987 di Peking. Selama konferensi tersebut dalam pidatonya, Hua dan Deng keduanya membicarakan tentang semangat untuk mencapai rencana modernisasi tersebut.<sup>14</sup> Untuk mencapai perkembangan yang diinginkan pada bidang yang menjadi prioritas tertinggi seperti sumber energi, komputer, laser, teknologi luar angkasa, tenaga fisika dan ilmu genetika, dilakukan program pelatihan penelitian ilmiah untuk 800.000 pekerja di Cina.<sup>15</sup> Kebijakan lain yang diupayakan dalam modernisasi pendidikan berkaitan dengan sistem pendidikan RRC yang terbagi dalam *General Education* (GEN) dan *Vacational Technical* (VT) *Education*. Pada 1985 4 jenis sekolah VT pada sekolah menengah atas terdiri dari *secondary vocational school* (SVT) dengan banyaknya pendidikan birokrasi, *skilled workers school* (SWS) dengan banyaknya kementerian ketanagakerjaan dan afiliasi lokal, *secondary teacher training school* (TT) dengan

---

<sup>13</sup> Poltak Partogi Nainggolan, *op.cit.*, hlm. 144.

<sup>14</sup> Jonathan D. Spence, *The Search For Modern China*, (New York: W.W. Norton & Company, 1990), hlm. 654-656.

<sup>15</sup> *Ibid.*

banyaknya pendidikan birokrasi dan *secondary technical school* (STS) dengan banyaknya kementerian lain, departemen dan perusahaan. Sekolah VT tersebut merupakan sistem pendidikan di RRC yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan tenaga kerja muda dalam industri. Berikut data pendaftaran sekolah menengah atas di RRC pada 1980-1989 dan beberapa gambar aktivitas yang dilakukan dalam *Vacational School*:

**Tabel 3.1**  
**Pendaftaran pada Sekolah Menengah Atas di Cina pada 1980-1993 (dalam ribuan)**

No.	Tahun	GEN	STS	TT	SWS	SVS
1.	1980	9698	761	282	700	319
2.	1985	7411	1013	558	742	2143
3.	1989	7161	1493	685	1267	2363
4.	1993	6569	2098	722	1739	3064

Sumber: *State Education Commission* (1994), *Educational Statistics Yearbook of China 1993* (Beijing, China: People's Education Press), *Ministry of Education* (1998), *Educational Statistics Yearbook of China 1997* (Beijing, China: People's Education Press) dalam Mun C. Tsang, "Education And National Development In China Since 1949: Oscillating Policies And Enduring Dilemmas", *China Review* 2000, hlm. 10.

Gambar-gambar tersebut menunjukkan kegiatan dalam *Vacational School* yang meliputi keterampilan ilmu komputer, ahli masak sampai pada ilmu marketing. Program kegiatan yang terdapat dalam *Vacational School* tersebut sebagai rangka dalam meningkatkan tenaga kerja muda yang ahli dan produktif. Seperti yang ditunjukkan pada gambar di atas, sektor perdagangan merupakan salah satu yang diunggulkan dalam sistem *Vacational School* yang mencerminkan budaya RRC. Selain itu juga terdapat program pertukaran pelajar yang ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan pelajar Cina tentang perkembangan ilmu pengetahuan

yang ada di Amerika. Berikut beberapa bidang mata pelajaran untuk program mahasiswa Cina di Amerika pada 1978-1979:

**Tabel 3.2**  
**Bidang Mata Pelajaran dalam Program Pengiriman Mahasiswa Cina di Amerika Serikat pada 1978-1979**

No.	Bidang	Mahasiswa (Jumlah)
1.	Mathematics	30
2.	Physics	58
3.	Chemistry	30
4.	Mechanics	10
5.	Material Sciences & Technology	15
6.	Astronomy & Astrophysics	6
7.	Meteorology	7
8.	Life Sciences	25
9.	Medical Sciences	29
10.	Radioelectronics	50
11.	Computer Sciences & Engineering	45
12.	Control Engineering	15
13.	Aeronautical Engineering	15
14.	Space Technology	15
15.	Nuclear Engineering	10
16.	Construction Technology	10
17.	Mechanical Engineering	8
18.	Metallurgical Engineering	10
19.	Chemical Engineering	10
20.	Agricultural Sciences	11
21.	Other Subject	24
Jumlah		433

Sumber: Jonathan D. Spence, *The Search For Modern China*, (New York: W.W. Norton & Company, 1990), hlm. 655.

Pada 1978 sebagai permulaan sekitar 480 pelajar RRC dikirimkan ke 28 negara untuk belajar, dan sebagai bentuk normalisasi hubungan dengan AS, pada akhir 1978 RRC mengirimkan lebih banyak jumlah daftar dari permintaan dalam pelatihan teknis kepada komite AS.<sup>16</sup> Hal tersebut membuktikan bahwa beberapa bidang ilmu pengetahuan menjadi prioritas negara dalam rangka modernisasi ilmu pengetahuan dan teknologi guna meningkatkan tenaga ahli di RRC. Di sisi lain ilmu pengetahuan dan teknologi mewakili hubungan RRC dan AS dan memiliki peranan penting bukan hanya dalam kehidupan sosial, budaya dan

<sup>16</sup> *Ibid.*, 656.

hubungan ekonomi tapi juga meningkatkan pemahaman politik antara kedua negara tersebut.<sup>17</sup>

Selain ilmu fisika dan ilmu sains lainnya, ilmu pengetahuan komputer dan teknis mesin, teknik ilmu penerbangan, teknologi luar angkasa serta teknik nuklir menjadi salah satu prioritas RRC terutama dalam mengembangkan industri dan pertahanan nasional. Sebagai bagian dari proses reformasi dalam mengejar ketertinggalan akan negara Barat, pengiriman pelajar ke beberapa negara merupakan program yang diorientasikan pada pelaksanaan reformasi terutama dalam mengembangkan kemajuan teknologi serta meningkatkan jumlah tenaga ahli profesional.

Untuk modernisasi dalam bidang pertahanan nasional RRC memusatkan terhadap pengadaan peralatan dan persenjataan yang diproduksi sendiri dengan pemusatan pada teknologi negara Barat. Selain itu juga terdapat 4 area yang menjadi perencanaan utama yakni modernisasi angkatan darat, meningkatkan kualitas angkatan udara, meningkatkan kualitas angkatan laut dan rencana strategis persenjataan. Salah satu unsur terpenting dalam pelaksanaan program Empat Modernisasi yakni profesionalisme birokrasi. Hal ini menuntut pemisahan fungsi antara partai dan pemerintah. Peran Deng Xiaoping ditunjukkan dengan keberadaannya di antara dua kelompok dalam koalisi pemerintahannya. Deng memfokuskan pembangunan sosialisme pada peningkatan ekonomi sebagai prasyarat utama mencapai sosialisme.<sup>18</sup> Hal tersebut yang menjadikan Deng memprioritaskan pelaksanaan Reformasi Ekonomi dengan tetap menjaga stabilitas politik RRC.

Politik pintu terbuka yang dilakukan RRC bukan saja membuka pasar global serta peran asing tanpa pertimbangan. Untuk memacu semangat persaingan yang timbul dalam masyarakat, Deng memberikan keleluasaan untuk masyarakat RRC dalam meningkatkan produksi berdasarkan kuantitas kerja. Untuk memacu

---

<sup>17</sup> Leo A. Orleans, "Sciens, Elitism and Economic Readjusment" dalam *Join Economic Committe* 13 Agustus 1982, *China Under Fourth Modernization Part 1*, (Washington: U.S Government, 1982), hlm. 476.

<sup>18</sup> Maurice Meisner, *Mao's China and After: A History Of The People's Republik*, (New York: The Free Press, 1988), hlm. 17.

laju modernisasi, pemerintah juga membutuhkan antusias serta peran masyarakat dalam meningkatkan produksi. Hal tersebut yang nantinya dapat menjadikan RRC mampu bersaing dengan pihak luar. Selain dorongan moral, Deng juga menekankan insentif material sebagai bagian dari proses modernisasi. Berbeda dengan Mao Zedong yang hanya menekankan dorongan moral serta doktrin ideologi, menurut Deng masyarakat juga perlu didorong dengan insentif material untuk memacu semangat persaingan. Politik pintu terbuka merupakan salah satu komitmen dan konsistensi Deng Xiaoping. Salah satu bentuk politik pintu terbuka tersebut dengan dibukanya Special Economic Zone (SEZ's) atas usulan Deng, merupakan kebijakan di mana setiap daerah yang telah diberikan otonomi khusus dari pemerintah dapat mengundang atau mengelola modal asing. Wilayah yang menjadi percontohan pelaksanaan SEZ's yakni Shenzhen pada 1979.<sup>19</sup> Wilayah lain yang juga dibuka untuk pelaksanaan kebijakan tersebut yakni Shuhai, Shantou dan Xianmen. Xi Zhongxun dan Yang Sangkung yang merupakan pemimpin Provinsi Guangdong diberikan tanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan tersebut dan memperoleh dukungan penuh dari Deng Xiaoping.

### 3.1.2 Kondisi Perekonomian RRC Pasca Reformasi Ekonomi 1978

Reformasi Ekonomi yang berlangsung sejak 1978, membawa banyak perubahan terhadap kondisi perekonomian RRC. Pelaksanaan Reformasi Ekonomi yang didasarkan pada keterbukaan ekonomi terhadap negara luar, membuka peluang RRC mengembangkan potensi wilayah-wilayah RRC terutama yang berbatasan langsung dengan wilayah negara lain. SEZ's merupakan salah satu kebijakan yang mendukung pelaksanaan keterbukaan ekonomi tersebut. Selain mengundang modal asing di wilayah RRC, hal lain yang juga dilakukan untuk memperlancar jalannya Reformasi Ekonomi yakni penghapusan Komune Rakyat, penghapusan monopoli negara serta liberalisasi usaha dan manajemen.<sup>20</sup> Kekacauan yang terjadi akibat Revolusi Kebudayaan, membuat Deng melakukan beberapa

---

<sup>19</sup> Barry Naughton, "Deng Xiaoping: The Economist", dalam *The China Quarterly* No. 135 September 1993, hlm. 508-510.

<sup>20</sup> Poltak Partogi Nainggolan, *op.cit.*, hlm. 140-163.

pembenahan sistem dalam negeri seperti penghapusan Komune Rakyat yang memberlakukan kontrol penuh dari partai atas kebutuhan masyarakat, dan digantikan dengan sistem pemerintah administratif setempat. Hal ini dianggap lebih efektif, serta dapat memacu kreatifitas serta persaingan antar individu untuk ikut serta memajukan perekonomian RRC.

Reformasi struktur pedesaan terbesar selain penghapusan Komune Rakyat yakni penghapusan monopoli negara. Salah satunya pembelian hasil panen dengan sistem monopoli negara dihapus yang terdapat dalam keputusan pemerintah RRC pada Januari 1985.<sup>21</sup> Sebelumnya dalam sistem monopoli negara, pengalokasian barang dan faktor-faktor produksi tidak melalui mekanisme harga atau kekuatan pasar melainkan melalui jalur administrasi yang melibatkan birokrasi. Bahkan perekonomian nasional yang didasarkan pada prinsip kepemilikan umum atas semua perusahaan dan alat produksi juga melalui perencanaan pusat. Hal tersebut yang kemudian menjadi salah satu penyebab kelambatan dalam pertumbuhan perekonomian RRC terutama pada sektor pertanian dan industri. Pemerintah pusat tidak akan mampu menangani semua persoalan, tantangan dan potensi daerah. Sentralisasi seperti itu tentu akan menghambat kemajuan serta persoalan dan hambatan yang dihadapi masyarakat di daerah tidak dapat diselesaikan oleh negara. Selain itu setiap daerah memiliki potensi yang berbeda sehingga penerapan sentralisasi dengan mencanangkan program yang seragam menjadi kurang efektif. Untuk itu liberalisasi usaha dan manajemen perlu dilaksanakan dalam rangka mendukung pelaksanaan Reformasi Ekonomi terutama pengembangan pertanian dan industri. Rencana tersebut tertuang dalam rancangan kerja pemerintah yang disampaikan PM Zhao Ziyang dalam KRN pada 30 November 1981 yang meliputi:<sup>22</sup>

1. Pemerintah ingin mempercepat pembangunan pertanian dengan menggunakan kebijakan yang tepat dan pemikiran yang ilmiah.

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 144.

<sup>22</sup> *Economic Reajusment and Reform*, “ Premier Zhao Ziyang’s Report on the Work of the Government to the National Peoples’s Congress, November 30 1981”, (Beijing:Beijing Reviev, 1982), hlm 9-10.

2. Pemerintah memberikan perhatian terhadap pembangunan industri barang-barang konsumsi dan mengatur orientasi pembangunan industri berat.
3. Pemerintah meningkatkan rasio penggunaan energi dan transportasi.
4. Pemerintah mengadakan transformasi teknik setahap dalam unit-unit kunci, dan menjalankan penggunaan yang maksimal terhadap perusahaan-perusahaan yang ada.
5. Pemerintah melakukan konsolidasi di segala bidang dan penstrukturan kembali perusahaan-perusahaan menurut kelompoknya.
6. Pemerintah meningkatkan dana-dana pembangunan dan mempergunakannya secara hemat, melalui perbaikan metode persyaratan, akumulasi dan pengeluaran.
7. Pemerintah tetap melaksanakan kebijakan pintu terbuka dan meningkatkan kemampuan untuk berdikari.
8. Pemerintah dengan aktif melakukan reformasi sistem ekonomi negara dan memperlihatkan inisiatif dalam setiap hal yang berkaitan dengan usaha ini.
9. Pemerintah berupaya mempertinggi taraf keilmuan dan kebudayaan seluruh rakyat pekerja dan mengorganisasi kemampuan untuk menjalankan proyek-proyek penelitian ilmiah yang penting.
10. Pemerintah berusaha mewujudkan konsep *segalanya ditujukan untuk rakyat* dan memberikan perhatian menyeluruh terhadap produksi, pembangunan, dan penghidupan rakyat.

Pembaruan-pembaruan dilakukan dengan berbagai cara untuk mendukung jalannya rancangan kerja pemerintah terutama dalam mendukung pengembangan ekonomi di daerah pedesaan. Cara intensif yang digunakan yakni adanya pembaruan sistem manajemen, pemakaian ilmu dan teknologi yang canggih, pembaruan di bidang keuangan, peningkatan pentingnya peranan bank, rasionalisasi produksi, aplikasi disiplin pekerja yang lebih baik, implementasi cara pembayaran upah yang lebih baik dan sebagainya.<sup>23</sup> Pembaruan serta rasionalisasi ekonomi yang dilakukan Deng terbukti dengan keberhasilan yang dicapai dalam usaha peningkatan industri pedesaan. Industri pedesaan tersebut meliputi industri pertanian, rumah tangga dan industri skala kecil baik yang tergabung dalam perusahaan milik negara, kolektif, individual dan jenis lainnya. Berikut rincian perkembangan hasil produksi industri pedesaan dan perkotaan pada 1978-1990:

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 15.

**Tabel 3.3**  
**Indeks Harga Nilai Bruto Hasil Produksi Menurut Tingkat dan Tipe**  
**Kepemilikan pada 1978-1990**

No.	Year	(100 Juta Yuan)			
		Excluding Village and Below	Township and above	City co-operative and individual	Village and below
1.	1978	4,067.10	4,067.10	-	169.90
2.	1979	4,483.30	4,483.30	-	198.00
3.	1980	4,896.70	4,895.89	0.81	257.56
4.	1981	5,120.02	5,118.12	1.90	279.76
5.	1982	5,506.26	5,502.86	3.40	304.96
6.	1983	6,087.56	6,080.06	7.50	372.88
7.	1984	7,042.20	7,027.39	14.81	575.10
8.	1985	8,755.65	8,722.26	33.39	960.82
9.	1986	9,849.13	9,799.44	49.69	1,345.13
10.	1987	11,909.37	11,828.79	80.58	1,903.62
11.	1988	15,398.84	15,291.09	107.75	2,825.74
12.	1989	18,485.15	18,345.42	139.73	3,531.91
13.	1990	19,862.36	19,701.0	161.77	4,061.55

Sumber: Robert Michael Field, "China's Industrial Performance Since 1978", dalam Robert F. Ash and Y.Y Kueh (Editor), *The Chinese Economy Under Deng Xiaoping*, (New York: Oxford University Press, 1996), hlm. 114.

Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa dengan adanya industri pedesaan dan industri perkotaan dengan tingkat serta kepemilikan yang berbeda menunjukkan permulaan yang sukses. Permulaan tersebut mampu menunjang perkembangan atas pembaruan lain yang dilakukan RRC terutama pada wilayah pedesaan.

Perkembangan lainnya ditunjukkan dalam bidang pertanian seperti sistem tanggung jawab, petani mampu meningkatkan kualitas kerja dan produksinya dengan hasil yang diperoleh. Sistem kerja di luar komune ternyata terbukti lebih efektif dengan peningkatan sebesar 6,6% dalam setahun.<sup>24</sup> Selain itu terhitung pada 1982 dalam hal produksi, sektor pertanian memperoleh kenaikan sebesar 12% dibandingkan tahun sebelumnya yakni sebesar 161 juta Ton.<sup>25</sup> Hal tersebut digambarkan dengan produksi gandum yang mengalami kenaikan sebesar 14,7% yakni menjadi sebesar 68,4 juta Ton, dan produksi kapas meningkat 21,3% yakni

<sup>24</sup> Poltak Partogi Nainggolan, *op.cit.*, hlm. 142-144.

<sup>25</sup> *Ibid.*

sebesar 3,6 juta Ton. Produksi pertanian lainnya seperti kacang kedelai, jagung dan lain-lain sangat besar sehingga dapat dialihkan menjadi komoditas ekspor.<sup>26</sup> Keberhasilan lain juga dicapai dengan kemampuan RRC dalam mengurangi impor berasnya dari Amerika Serikat sebesar 3,8 juta Ton.<sup>27</sup> Keinginan Mao Zedong ketika merencanakan Repelita kedua adalah agar dapat menyamai Rusia dan Inggris setelah 15 tahun. Deng juga sama, kepastian peningkatan produksi pertanian menjadikan pemerintah RRC optimis akan berhasil memenuhi keinginannya untuk meningkatkan nilai hasil tahunan pada 1984, menjadi empat kali lipat dalam kurun waktu 15 tahun mendatang. Secara garis besar perolehan produksi pertanian RRC baik secara perencanaan yang terdapat dalam Repelita keenam (1981-1985) dan Repelita ketujuh (1986-1990) beserta rata-rata perolehan digambarkan dalam tabel berikut:<sup>28</sup>

**Tabel 3.4**  
**Pertumbuhan Produksi Pertanian Pada 1980an**

No.	Produksi Pertanian	Angka rata-rata perolehan dari jumlah keseluruhan dalam persentase (%)			
		Repelita 6 (1981-1985)	Repelita 7 (1986-1990)	1981-1990	Catatan Repelita Terbaik sebelumnya
1.	Beras	3.4	3.3	3.4	4.2 (1966-1970)
2.	Kapas	8.9	1.6	5.3	4.7 (1953-1957)
3.	Gula	15.8	3.6	9.5	9.4 (1953-1957)
4.	Daging Babi	7.9	6.6	7.3	
5.	Daging Babi, Daging Sapi dan Daging Domba	7.9	7.4	7.6	8.6 (1976-1980)
6.	Produksi Tanaman Air	9.4	11.9	10.6	13.3 (1953-1957)

Sumber: Buku Tahunan Statistik Cina 1991, (*Beijing Statistical Publishing House*, 1991), hlm. 346-348, 357 dan 363.

Rata-rata kenaikan produksi pertanian antara Repelita keenam dan Repelita ketujuh memiliki keseimbangan dalam beberapa produksi seperti beras, daging babi, sapi dan domba. Begitu pula rata-rata hasil produksi dari 1981-1990

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> Robert F. Ash, "Agricultural Development In China Since 1978", dalam Robert F. Ash dan Y.Y. Kueh (Editor), *The Chinese Economy Under Deng Xiaoping*, (New York: Oxford University Press, 1996), hlm. 58.

tidak jauh berbeda dengan catatan Repelita terbaik sebelumnya, sedangkan peningkatan terlihat dari produksi kapas dan gula. Jumlah peningkatan produksi terus diusahakan oleh pemerintah RRC untuk mencapai target produksi yang diinginkan agar dapat mengurangi nilai impor pada negara lain, dan dapat menyuplai nilai ekspor seperti gandum dan kacang kedelai.

Selain upaya peningkatan produksi pertanian, pemerintah RRC juga mengupayakan produksi industri dalam skala besar yang juga merupakan bagian dari program Empat Modernisasi. Produksi industri yang dikembangkan bukan hanya meliputi industri berat saja melainkan industri rumahan juga ikut andil dalam rencana reformasi di bidang industri. Upaya pemerintah RRC untuk mengikutsertakan peran rumah tangga dianggap efektif dan menguntungkan untuk ikut meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tingkat persaingan yang tinggi antar individu diharapkan dapat tumbuh seiring dengan kemajuan perekonomian, meskipun akan terjadi perbedaan kekayaan individu serta kehidupan desa dan kota. Dengan berusaha menyeimbangkan hal tersebut melalui rencana peningkatan perekonomian di desa terlebih dahulu, baru kemudian setelah industri pedesaan dapat diandalkan dalam hal peningkatan produksi, rencana selanjutnya yakni pengembangan industri perkotaan.<sup>29</sup>

Ekonomi pedesaan yang berbasis pada peningkatan produksi pertanian ikut memacu keinginan pemerintah RRC untuk melakukan modernisasi dalam bidang industri. Pada akhir 1970an, industri RRC dalam kondisi di ambang kehancuran. Jumlah rata-rata perkembangannya tidak menentu, meskipun sejak 1949 pernah mengalami peningkatan dalam ketenagakerjaan dan modal. Selain itu dalam beberapa dasawarsa sebelumnya, terjadi berbagai peristiwa yang juga banyak merugikan pemerintah RRC dalam pengadaan modal. Kerugian yang diakibatkan oleh kegagalan Lompatan Jauh ke Depan sampai pada Revolusi Kebudayaan yang menyebabkan ketidakproduktifan bagi RRC. Kondisi pertumbuhan ekonomi sebelum Reformasi Ekonomi dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi RRC selama 1957-1979 baik dalam produksi maupun pertanian yang terdapat dalam tabel berikut:

---

<sup>29</sup> Robert Michael Field, *op.cit.*, hlm. 88.

**Tabel 3.5**  
**Pertumbuhan Ekonomi RRC Pada 1957-1979**  
**(Rata-rata pertumbuhan dalam persen (%))**

No.	Tahun	Produksi Pertanian	Produksi Industri	GNP
1.	1957-1970	1.8	9.3	5.1
2.	1966-1969	0.0	4.7	2.5
3.	1969-1973	6.1	13.1	10.1
4.	1974-1975	2.1	7.3	5.1
5.	1966-1976	2.8	8.0	5.7
6.	1977	-2.7	14.3	8.2
7.	1978	8.3	13.4	11.6
8.	1979	8.6	8.5	11.9

Sumber: A. Hasnan habib, *Kapita Selekt: Strategi dan Hubungan Internasional*, (Jakarta: CSIS, 1990), hlm. 251.

Pada 1957 pertumbuhan industri mencapai rata-rata tertinggi setelah keberhasilan Repelita pertama yang mencapai 9.3%. 1966-1969 merupakan tahun Revolusi Kebudayaan dilaksanakan, pada perjalannya revolusi tersebut justru menimbulkan ketidakproduktifan terutama mengenai produksi pertanian karena kegiatan-kegiatan politik yang dilakukan Mao dan *Pengawal Merah* yang banyak melibatkan petani. Pada Repelita kelima (1976-1980), pada akhir tahun Repelita dalam produksi pertanian mengalami peningkatan yang cukup signifikan yakni sekitar 8.3 %. Sedangkan produksi industri mengalami produksi yang cukup tinggi pada 1977 dan 1978 sebagai bentuk realisasi dari pelaksanaan modernisasi di bidang industri melalui politik pintu terbuka dan pasar bebas. GNP RRC dari 1977-1979 mengalami peningkatan yang stabil yang ditunjang dengan produksi industri yang tinggi dari tahun-tahun sebelumnya.

Pada 1978, pimpinan partai mengesahkan perubahan strategi politik dalam mengatasi masalah ekonomi. Pada Desember, Sidang Pleno ke 3 dalam Komite Sentral Partai ke-11, mereka menandatangani penyederhanaan administrasi ekonomi untuk mengubah wewenang daerah dan mengelola dana perusahaan industri dalam meningkatkan laju perkembangan ekonomi.<sup>30</sup> Dalam 3 sampai 4 tahun setelahnya pemerintah melakukan sejumlah percobaan dan reformasi dalam

<sup>30</sup> *Ibid.*

skala kecil seperti di Sichuan dan kemudian menyebar secara cepat ke seluruh kota. Reformasi tersebut kemudian memberikan dampak yang sangat besar di wilayah pedesaan, di mana komune dihapuskan, pasar bebas didirikan, serta dikembangkannya industri pedesaan.<sup>31</sup> Industri yang ada di RRC pada dasarnya meliputi pertambangan, produksi atau manufaktur dan pembangkit tenaga listrik serta perusahaan-perusahaan yang sama sejak 1950an. Perwujudan industri dikembangkan lebih jauh dan berkembang menjadi bagian-bagian yang mampu meningkatkan daya produksi RRC. Prinsip utama atas pengembangan ekonomi melalui asas kapitalisme juga diatur dalam undang-undang RRC dibatasi serta dilaksanakan secara terstruktur yakni melalui kontrol organ-organ administrasi negara, kepemimpinan dilaksanakan oleh sektor negara dalam perekonomian dan pengawasan oleh massa dari pekerja.<sup>32</sup> Hal tersebut membuktikan bahwa perindustrian dapat berkembang dalam rangka peningkatan ekonomi negara dengan aturan yang jelas dan memberikan keuntungan bagi negara, termasuk jenis perusahaan yang dikembangkan dalam rangka perluasan industri dan percepatan pertumbuhan ekonomi.

Klasifikasi perusahaan didasarkan menurut jenis kepemilikan dan cabang industrinya, karena terjadi perubahan dalam sistem klasifikasi dan seringkali mengalami kegagalan dalam mengenali secara tegas mengakibatkan data nilai produksi pada 1980an tidak jelas.<sup>33</sup> Untuk jenis kepemilikan sebelum 1980, hanya negara dan perusahaan milik bersama yang beroperasi. Namun kemudian perusahaan individu ikut tergabung ke dalamnya dan dapat bekerjasama dengan negara. Untuk cabang industri pada 1985 melakukan perubahan cabang industri yang mulanya hanya meliputi 15 cabang pada 1950an kemudian menjadi 40 cabang. Hal tersebut didasarkan pada sistem baru yang mengikuti undang-undang industri standar internasional. Industri produksi tersebut meliputi pertambangan, barang industri ringan, pengolahan bahan mentah, pabrik yang menghasilkan

---

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> Konstitusi RRC Bab 1 pasal 10.

<sup>33</sup> Robert Michael Field, *op.cit.*, hlm. 89

produksi metal, mesin dan barang elektronik.<sup>34</sup> Berikut laporan indeks harga untuk nilai bruto hasil industri dari 40 cabang industri pada 1988 dan beberapa gambar produksi industri seperti Tembaga:<sup>35</sup>

**Tabel 3.6**  
**Laporan Indeks Harga Untuk Nilai Bruto Hasil Industri Dari 40 Cabang Industri Pada 1988.**

No.	Cabang Industri	Nilai Konstan pada 1980 dalam Yuan (Yuan=100)	
		Negara	Lain-lain
	Industri Ringan	127.26	109.74
	Alat Pertanian	136.33	112.66
	Alat Industri	107.70	105.42
	Industri Berat:	137.46	118.44
	Bahan Mentah	150.24	144.27
	Manufaktur	120.97	111.57
1.	Batu Bara	147.90	124.90
2.	Minyak Tanah	165.83	
3.	Logam Besi	148.72	118.74
4.	Logam Non Besi	152.48	139.86
5.	Tambang Non Logam	138.86	112.49
6.	Garam	112.61	131.71
7.	Tambang Lainnya	100.00	120.00
8.	Kayu	255.22	190.51
9.	Penyedia Air umum	132.70	119.05
10.	Pabrik Makanan	147.04	123.56
11.	Pabrik Minuman	159.96	128.04
12.	Pabrik Tembakau	151.97	132.55
13.	Pabrik Makanan Ternak	131.18	121.21
14.	Pabrik Tekstil	120.10	112.95
15.	Pakaian	110.29	101.52
16.	Barang-Barang dari Kulit dan Bulu Binatang	157.70	116.50
17.	Pengolahan Kayu	173.75	129.38
18.	Pabrik Perkakas Rumah/Furnitur	111.02	107.88
19.	Pabrik Kertas	157.60	114.82
20.	Percetakan	126.74	109.54
21.	Kebudayaan dan Barang Olaraga	119.00	105.41
22.	Seni dan Keahlian	122.89	106.09
23.	Pembangkit Tenaga Mesin	125.19	152.41
24.	Pengolahan Minyak Tanah	136.35	144.07
25.	Batu arang dan Batu Bara	176.52	124.32

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 91-92.

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm. 97-98.

26.	Industri Bahan Kimia	144.57	119.58
27.	Produk Farmasi	108.14	103.67
28.	Serat Bahan Kimia	94.93	90.47
29.	Barang Karet	108.22	102.94
30.	Barang Plastik	140.89	123.47
31.	Bahan Bangunan	159.37	133.67
32.	Peleburan Logam Besi	163.64	150.27
33.	Peleburan Logam non Besi	153.43	134.50
34.	Produk Logam	129.18	109.81
35.	Mesin Pembangunan	119.13	106.07
36.	Peralatan Transportasi	115.96	118.28
37.	Peralatan Listrik	123.15	106.09
38.	Peralatan Elektronik	89.60	84.48
40.	Perkakas dan Meteran	104.27	97.27
41.	Lain-lain	161.68	108.59

Sumber: Biro Statistik Negara RRC 1988, (indeks diperoleh dari kalkulasi data harga mutakhir dan harga tetap pada 1980).

Usaha peningkatan produksi industri terus dilakukan sepanjang 1980-1990an dengan melibatkan pihak-pihak seperti negara, perusahaan individu, perusahaan kolektif dan lain-lain. Terbukti pada 1980an pertumbuhan rata-rata produksi industri mencapai 12.6% per tahun. Pertumbuhan ekonomi meningkat tinggi pada 1985 yakni dari 4.3% menjadi 21.7% dan menurun menjadi 11.4% pada 1986, kemudian pada 1988 menjadi 20.8%. Ketidakstabilan terjadi terus menerus sampai akhir 1980an dan mengakibatkan penurunan yang cukup drastis yakni rata-rata pertumbuhan ekonomi RRC terutama dalam bidang industri menjadi 8.5% pada 1989 dan 7.8% pada 1990.<sup>36</sup> Selain itu sebagian besar produk ekspor RRC berupa bahan makanan yang mencapai 30%, 25% tekstil dan pakaian jadi, 15% minyak mentah dan 30% sisanya berupa komoditas lain.<sup>37</sup> Peningkatan nilai ekspor tersebut sebagai bentuk ukuran keberhasilan selama Reformasi Ekonomi berjalan dan dapat membantu pelaksanaan pembangunan infrastruktur di RRC. Produk-produk yang diimpor oleh RRC terdiri dari peralatan transportasi, mesin, besi baja, dan bahan-bahan kimia.

### 3.1.3 Peranan Kaum Pragmatis dalam Reformasi Ekonomi

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm. 100.

<sup>37</sup> Poltak Partogi Nainggolan, *op.cit.*, hlm. 159.

Pada akhir kepemimpinan Mao Zedong, peta politik RRC dapat digambarkan dengan tiga keberadaan kelompok yakni Maois, Reformis dan Militer.<sup>38</sup> Ketiga kelompok tersebut dapat dikelompokkan lagi ke dalam dua kelompok yakni kelompok radikal-revolusioner dengan kelompok pragmatis-realis. Kelompok radikal revolusioner terdiri dari Maois dan sebagian anggota militer. Pada 1970an Mao memecat pejabat partai lama dan menggantinya dengan orang-orang yang berasal dari militer. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk pembersihan orang-orang kanan seperti Deng Xiaoping dan Liu Shauqi serta memberi dukungan pada pejabat militer yang moderat. Sepeninggal Mao, Kelompok Empat yang mengklaim dirinya sebagai penerus Mao aktif melancarkan aksi kudeta kepemimpinan partai ketika Hua Guofeng baru menjabat sebagai pimpinan partai. Aksi tersebut dapat dihentikan atas kerjasama Hu dengan Deng dan mengakibatkan Zhang Chungqiao, Wang Hungwen, Yao Wenyuan dan Jiang Qing dipecat dari keanggotaan partai. Pemecatan dan pengadilan yang dilakukan bagi keempat tokoh radikal tersebut menjadikan kelompok pragmatis-realis semakin berkuasa dalam perpolitikan RRC.

Kelompok pragmatis-realis merupakan kelompok yang kemudian dikategorikan sebagai kelompok reformis yang banyak berperan dalam pelaksanaan Reformasi Ekonomi periode 1979-1989. Tokoh reformis tersebut di antaranya seperti Hu Yaobang, Zhao Ziyang, Fang Lizhi, Hu Qili, Hu Jiwei, Wang Zhen, Zu Houze, Wu Jianxian, Bao Tong dan lainnya. Kedua tokoh yakni

---

<sup>38</sup> Faksionalisme dalam PKC bukan hanya terjadi dalam kepemimpinan partai pada 1980an. Sejak PKC berdiri perseteruan antara faksi sudah terjadi. Sama halnya ketika kepemimpinan Mao, tiga kelompok dominan yakni Maois, Reformis dan Militer. Maois merupakan para pejabat atau anggota partai yang setia mengikuti ajaran dan bimbingan Mao Zedong, sedangkan kelompok reformis yang dimotori Deng Xiaoping merupakan kelompok yang aktif dalam mereformasi RRC terutama dalam hal meningkatkan perekonomian RRC berbasis kapitalisme. Militer merupakan salah satu basis kekuatan tertinggi RRC terutama yang berasal dari TPR. Kebanyakan petinggi militer adalah orang-orang konservatif yang berpegang teguh dengan aturan-aturan lama dan merupakan koalisi terbesar Mao Zedong. Di luar ketiga kelompok tersebut, terdapat pula kelompok moderat yang di dalamnya juga terdapat orang-orang militer. Kelompok moderat lebih berhati-hati dalam memutuskan sesuatu hal yang bersangkutan dengan keberlangsungan partai serta negara. Mereka yang termasuk dalam kelompok tersebut di antaranya Zhou Enlai dan Hua Guofeng. Lihat, Poltak Partogi Nainggolan, *op.cit.*, hlm. 31-52.

Zhao Ziyang dan Hu Yaobang merupakan pelaksana aktif atas reformasi yang terjadi di RRC dalam rangka meningkatkan perekonomian negara. Keduanya termasuk ke dalam tokoh yang secara radikal melakukan reformasi dan aktif mendukung reformasi secara keseluruhan dan cepat bagi RRC. Secara garis besar peranan kelompok reformis dalam pelaksanaan Reformasi Ekonomi meliputi kebijakan perluasan wilayah SEZ's, kebijakan mengenai pemisahan kebijakan ekonomi dan administrasi, pelaksanaan ekonomi pasar dalam rangka mengejar ketertinggalan atas negara kapitalis, serta mendukung kebijakan politik pintu terbuka Deng Xiaoping.

Pada Februari 1980 Sidang Pleno 5 Kongres XI menghasilkan keputusan berupa menghapus jabatan ketua partai dan menghidupkan lagi jabatan sekretariat jenderal (sekjen) partai.<sup>39</sup> Setelah pemberlakuan keputusan tersebut Hu Yaobang kemudian diangkat sebagai Sekjen partai.<sup>40</sup> Hu merupakan sosok yang juga cenderung liberalis, terbukti ketika Sekjen PKC tersebut mendukung perkembangan reformasi tanpa batasan ideologi. Dukungan tersebut juga diberikannya pada kebebasan dalam seni dan budaya yang berkembang menjadi unjuk rasa dan demonstrasi. Dalam hal ini Hu merupakan sosok yang ikut serta mendukung adanya reformasi politik dalam tubuh PKC, salah satunya yakni dengan adanya peremajaan kader. Adanya usulan pergantian pengurus partai dengan anggota yang masih muda dan berpotensi menjadikan pengurus lama yang terdiri dari petinggi militer senior kurang setuju. Bagi anggota lama, reformasi harus dilaksanakan secara perlahan dan tetap mengandalkan partai sebagai pusat kontrol, dan ideologi sebagai landasan dalam melaksanakan reformasi.

---

<sup>39</sup> I Wibowo, *Belajar dari Cina Bagaimana Merebut Peluang dalam Era Globalisasi*, (Jakarta: Kompas, 2007), hlm. 221-222.

<sup>40</sup> Pada tahun yang sama tepatnya 29 Februari rehabilitasi Liu Shauqi yang dianggap sebagai penjahat negara pada Revolusi Kebudayaan sebagai penempuh jalan kapitalis dan Deng disebut-sebut sebagai pejalan kapitalis kedua setelah Liu. Peristiwa lain yang terjadi pada tahun tersebut yakni pada November diadakan pengadilan atas kesalahan-kesalahan Jiang Qing atas pemberontakan yang dilakukannya bersama Kelompok Empat. *Ibid.*

Pada KRN VI pada Juni 1983 Zhao Ziyang diangkat sebagai PM dan Hua Guofeng yang semula juga memiliki kekuasaan sudah kehilangan semua jabatan pemimpinnya baik dalam negara maupun partai.<sup>41</sup> Selama kepemimpinan Hu Yaobang, Zhou banyak memberikan dukungan terhadap reformasi yang dilaksanakan di RRC, termasuk di dalamnya yakni adanya Reformasi Gengshen dan pelaksanaan pemilu lokal. Sekjen Hu maupun PM Zhou mendukung pelaksanaan reformasi dan pemilu tersebut. Keterlibatan keduanya dalam beberapa hal membuat mereka memiliki pemikiran yang sama mengenai reformasi, meskipun dalam beberapa hal terdapat perbedaan. Perbedaan tersebut misalnya terdapat pada pendapat Hu dan Zhou mengenai kebijakan ekonomi desentralisasi dan sentralisasi. Sebaliknya keduanya mendukung penuh kebijakan untuk melanjutkan dan memperluas wilayah SEZ's. Pada dasarnya peran Zhao terhadap pelaksanaan Reformasi Ekonomi digambarkan pada rancangan kerja pemerintah yang disampaikan pada parlemen KRN di bulan November 1981 yang berupa 10 petunjuk pembangunan ekonomi RRC.

Kedua jabatan penting yang disandang oleh Hu Yaobang dan Zhao Ziyang mampu menjadikan keduanya berperan aktif dan dominan atas terlaksananya reformasi di RRC, dan tentunya atas dukungan dari Deng Xiaoping sebagai seorang senior yang berkuasa dan berpengaruh. Dominasi kelompok reformis dalam pelaksanaan Reformasi Ekonomi karena keterlibatan kelompok tersebut dalam memformulasikan serta mendukung kebijakan yang sifatnya bertujuan untuk mengembangkan reformasi. Dapat dikatakan bahwa punggawa kelompok reformis adalah Hu Yaobang dan Zhao Ziyang. Perpaduan keduanya sebagai orang yang memegang jabatan tertinggi di RRC dan PKC mampu mendukung Reformasi Ekonomi yang diprakarsai Deng Xiaoping. Meskipun pada akhirnya kedua punggawa tersebut dipecat oleh Deng karena keradikalannya terutama dalam mendukung berkembangnya demokrasi di RRC.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> *Ibid.*

<sup>42</sup> June Teufel Dreyer, "The People Liberation Army and Power Struggle of 1989", *Problem of Communism* Vol. 38 No. 5, September-Oktober 1989, hlm. 41-48.

### 3.2 Deng Xiaoping Berkuasa dalam Pemerintahan

Pemisahan kekuasaan dalam pemerintahan dan partai pada prinsipnya secara tegas terjadi setelah berakhirnya rezim Mao Zedong. Awalnya kekuasaan yang dimiliki baik pemerintah maupun partai dimiliki oleh sebagian besar orang yang menjabat dalam pemerintahan dan partai. Tanpa adanya batas pemisah yang jelas menjadi salah satu pemicu timbulnya pergulatan antar faksi yang ada dalam partai. Setelah 1978, Reformasi Ekonomi membawa dampak yang besar bagi RRC. Dampak tersebut bukan hanya meliputi perekonomian negara, namun memunculkan reformasi-reformasi lain terutama perihal politik dalam PKC. Salah satunya mengenai keanggotaan dalam partai, sistem kepemimpinan yakni dihapuskannya ketua dan digantikan dengan sekjen. Sampai pada praksis ideologi yang menurut Deng tidak dapat dilaksanakan secara dogmatis dan kaku namun justru harus mengalir dan fleksibel. Seperti ungkapan yang dikemukakan Deng, “Tidak peduli kucing itu hitam atau putih, selama ia dapat menangkap tikus, ia adalah kucing-kucing yang baik”.<sup>43</sup> Tikus yang dimaksudkan Deng diibaratkan sebagai RRC yang makmur dan kuat. Deng juga meminta masyarakat RRC menunjukkan sikap kritis dan kreatif dalam mempraktikkan ideologi Marxisme.<sup>44</sup> Untuk itu masyarakat juga diharapkan untuk tidak menjadikan teori-teori yang dikemukakan Marx menjadi sebuah dogma, namun perlu menyesuaikannya kembali dengan kehidupan masyarakat.

Sebagai seorang yang juga berkuasa dalam pemerintahan, Deng Xiaoping merupakan generasi kedua dalam kepemimpinan RRC setelah Mao Zedong. Deng kemudian digantikan oleh Jiang Zemin sebagai generasi ketiga dalam kepemimpinan RRC.<sup>45</sup> Sistem kepemimpinan yang diberlakukan pasca Deng Xiaoping yakni tradisi alih kepemimpinan nasional dimana presiden RRC juga merangkap sebagai sekjen partai. Hal tersebut juga berlaku pada awal kepemimpinan RRC yang dipegang oleh Mao Zedong. Pada dasarnya proses

---

<sup>43</sup> Liu Heung Shing, *China After Mao: Seek Truth From Facts*, (Beijing: Penguin Books, 1983), hlm. 48.

<sup>44</sup> Poltak Partogi Nainggolan, *op.cit.*, hlm. 82.

<sup>45</sup> “Pergantian Pucuk Kepemimpinan RRT”, Dokumentasi dari Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, Asia Tenggara dan Pasifik, 2012-2015.

peralihan kepemimpinan di RRC berjalan secara rahasia, tertutup dan keputusan akhir dipegang secara kolektif oleh senior dan elit politik partai.<sup>46</sup> Keberadaan Deng dalam pemerintahan bahkan di luar jabatan resmi tetap menjadikannya sebagai sosok yang ikut mempunyai kekuasaan atas keputusan yang dibuat oleh negara maupun partai. Bahkan setelah jabatannya berakhir, Deng telah mempersiapkan penggantinya untuk meneruskan kepemimpinan dalam perpolitikan RRC. Beberapa orang yang menjadi kepercayaan Deng untuk meneruskan kepemimpinannya yakni Hu Yaobang, Zhao Ziyang, Li Peng, dan Jiang Zemin. Keempatnya memiliki pertimbangan masing-masing menurut Deng, tetapi Jiang Zemin dianggap lebih cocok dan mampu untuk mendapatkan dukungan dari Deng Xiaoping untuk menggantikannya. Pertimbangan Deng lebih mengunggulkan Jiang Zemin yakni karena loyalitas yang dimilikinya jauh lebih besar daripada kandidat lainnya. Pada dasarnya Jiang bukan merupakan calon yang memenuhi kriteria Deng terutama dalam hal kemampuan, bagi Deng kekurangan Jiang adalah karena tidak memiliki jiwa pemimpin yang berani, kurang inisiatif dan terkesan hati-hati. Lebih dari kekurangan tersebut, Jiang memiliki loyalitas yang tinggi.<sup>47</sup> Sementara Li Peng memiliki cacat politik karena keterlibatannya atas penumpasan gerakan prodemokrasi pada Peristiwa Tiananmen 1989, dan Zhao serta Hu sudah dikeluarkan terlebih dahulu dari partai karena keradikalannya membawa RRC ke jalan kapitalisme dan liberalisme.

Karir politik Deng Xiaoping dalam pemerintahan dimulai sebagai wakil PM yang diangkat pada 1952. Pada 1959 dan 1965 Deng masih menjabat sebagai wakil PM juga menjabat sebagai anggota Politbiro pada saat pengangkatannya.<sup>48</sup> Selain itu Deng juga merupakan pemimpin RRC generasi kedua. Pada prinsipnya semua kekuasaan dalam RRC merupakan milik rakyat. Hal ini kemudian digambarkan dengan organ-organ negara dalam beberapa tingkatan sebagai

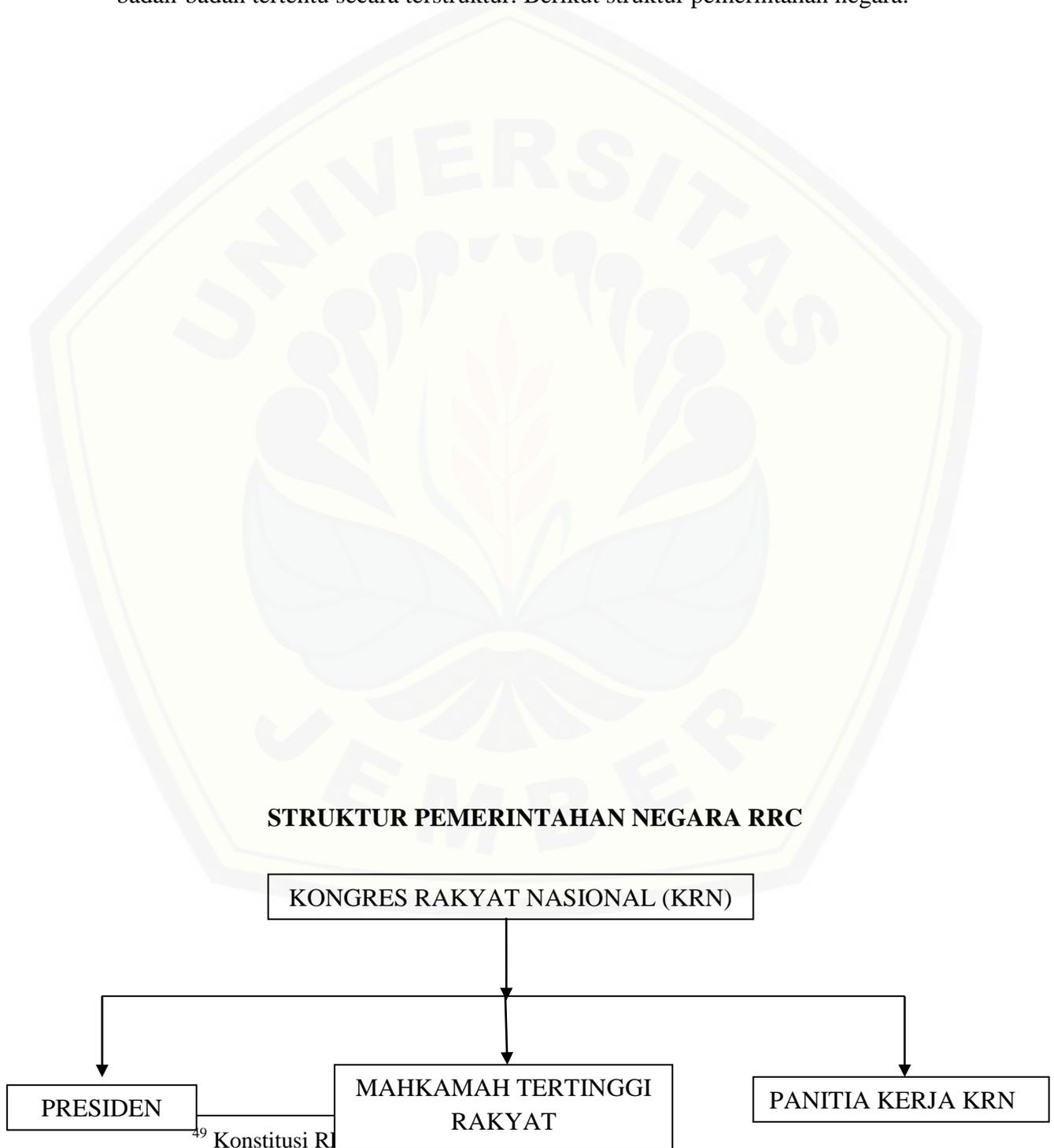
---

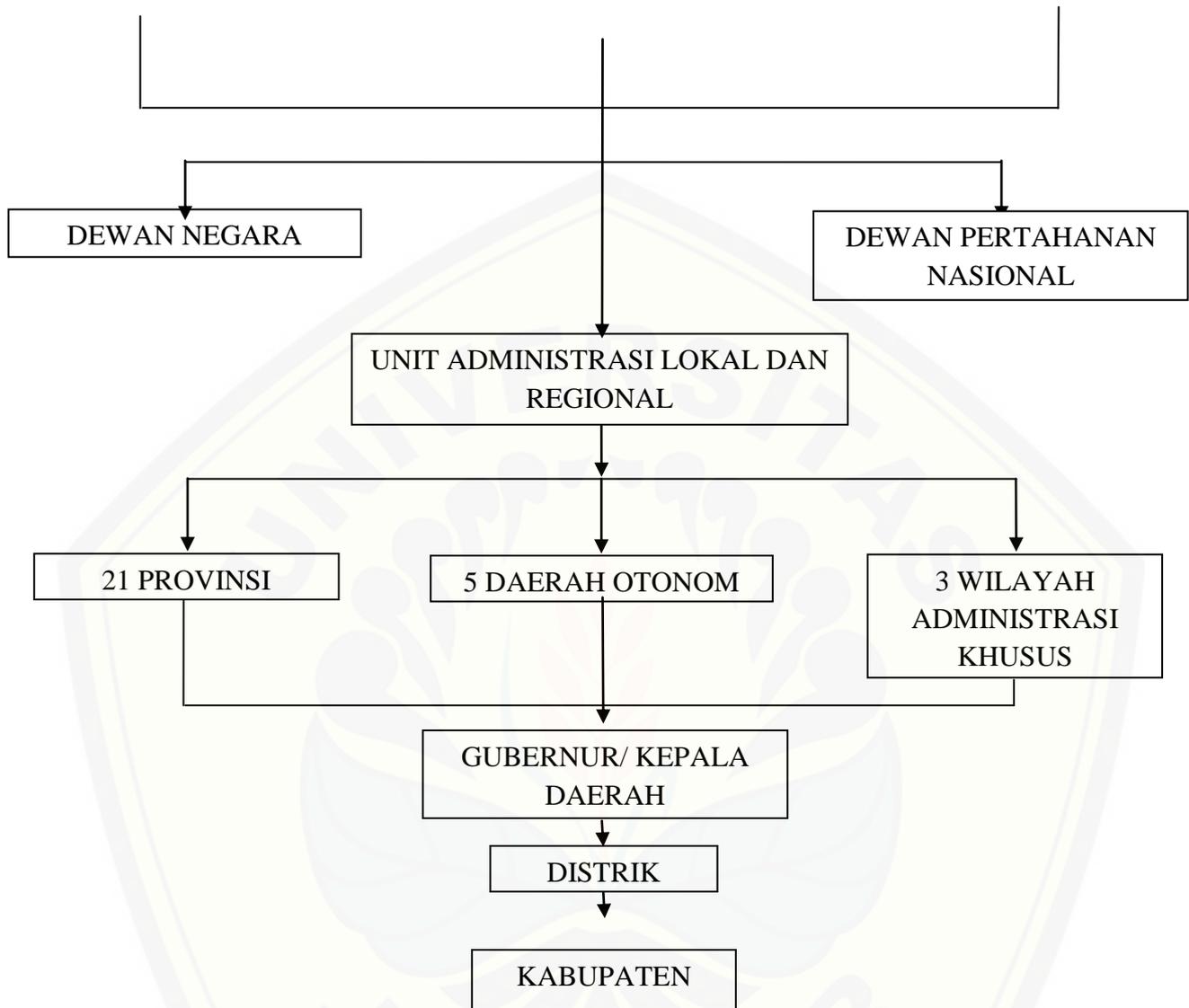
<sup>46</sup> *Ibid.*

<sup>47</sup> Umar Suryadi Bakry, "Siapa Calon Pengganti Deng?", dalam Umar Suryadi Bakry, *Pasca Deng Xiaoping: Cina Quo Vadis*, (Jakarta: PT Sinar Harapan, 1996), hlm. 43-47.

<sup>48</sup> Cristine Trisanti Seta, *op.cit.*, hlm. 164.

bentuk kekuasaan yang dijalankan oleh rakyat.<sup>49</sup> Struktur pemerintahan di bawah ini menunjukkan bahwa RRC mengusung kediktatoran demokrasi rakyat menempatkan posisi rakyatnya sebagai kekuasaan tertinggi melalui KRN. Serta distribusi yang berasal dari pusat ke tingkat lokal ditata sedemikian rupa melalui badan-badan tertentu secara terstruktur. Berikut struktur pemerintahan negara:





Gambar 3.7

Sumber: Jurgen Domes, *The Government and Politics of the PRC: A Times Of Transition*, (Colorado: Westview Press, 1985), hlm. 96.

Pada KRN ke-4 yang berlangsung 13-17 Januari 1975 dan KRN ke-5 pada 26 Februari-5 Maret 1978 menghasilkan keputusan bahwa kedudukan Kepala Negara dan Wakil Kepala Negara dihapuskan dalam konstitusi 1975 dan 1978, keputusan tersebut dilakukan berdasarkan anjuran Mao Zedong pada 1970.<sup>50</sup> Dalam periode tersebut yang bertugas sebagai Kepala Negara atau Presiden

<sup>50</sup> Roderick MacFarquhar, *The Politics of China 1949-1989*, (New York: Cambridge University Press, 1994), hlm. 479.

adalah Ketua KRN, yakni pada 1975 Zhu De dan pada 1978 Ye Jianying yang juga merupakan anggota Politbiro saat pengangkatan. Pada 1983 Li Xiannian dipilih sebagai Kepala Negara dengan Ulanhu sebagai Wakil Kepala Negara, Li Peng sebagai Ketua KRN dan pada posisi Dewan Negara diisi oleh Zhao Ziyang yang menjabat sebagai Perdana Menteri.<sup>51</sup> Pada 1988 jabatan Kepala Negara disandang oleh Yang Shangkun yang juga merupakan anggota Politbiro pada saat pengangkatannya, dengan Wang Zhen sebagai Wakil Kepala Negara, Wan Li sebagai Ketua KRN dan Li Peng menjabat sebagai Perdana Menteri. Sedangkan Deng Xiaoping menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri pada 1978 dan mengundurkan diri pada September 1980. Posisi dalam pemerintahan pada 1983-1988 lebih didominasi oleh kelompok konservatif dan militer, dan Deng lebih memilih menjadi pemimpin di balik layar daripada berada pada posisi jabatan resmi dengan dan memberi dukungan kelompok reformis untuk melancarkan pelaksanaan Reformasi Ekonomi.

Secara resmi Deng Xiaoping menanggalkan semua jabatannya pada akhir 1980an. Namun demikian karena beberapa alasan salah satu di antaranya yakni kebutuhan akan reformasi dan politik pintu terbuka, Deng kembali menunjukkan kepemimpinannya ke permukaan. Hal tersebut ditunjukkan dalam Sidang Tahunan KRN akhir Maret 1992 untuk meyakinkan para wakil rakyat betapa penting dan mendesaknya reformasi untuk dipercepat.<sup>52</sup> Model kepemimpinan Deng menempatkan kepentingan dan kebutuhan negara pada posisi utama. Pentingnya reformasi dilakukan merupakan salah satu upaya untuk memperbaiki serta meningkatkan kondisi perekonomian negara adalah prioritas utama. Hal tersebut yang selalu dikemukakan oleh Deng kepada para koalisinya. Deng mampu menempatkan posisinya di antara kedua kelompok dan mampu mengimbangi keduanya untuk tetap menjaga keberlangsungan reformasi serta keberadaan partai sebagai kekuatan utama. Selain konsisten melaksanakan Reformasi Ekonomi secara radikal, Deng juga tetap menjaga otoritas dan ideologi

---

<sup>51</sup> *Ibid.*

<sup>52</sup> Umar Suryadi Bakri, *op.cit.*, hlm. 48-53.

partai sesuai dengan kondisi yang dihadapi oleh RRC. Kemampuan tersebut yang menjadikan Deng dapat diterima oleh kedua kelompok tersebut.

Pada masa Revolusi Kebudayaan, politik menjadi poin utama yang diposisikan sebagai pengatur kehidupan RRC dalam segala sisi. Keputusan maupun kebijakan baik yang berhubungan dengan ekonomi maupun politik yang dibuat harus berdasarkan atas perangkat ideologis. Kemudian Deng Xioping muncul dan menggantikan tujuan nasional menjadi pembangunan ekonomi dan ideologi baru yang disebut dengan melihat kebenaran dari kenyataan-kenyataan.<sup>53</sup> Model kepemimpinan Deng yang menempatkan pembangunan ekonomi sebagai prioritas tersebut membawanya sebagai seorang yang sangat diperhitungkan bagi keberadaan RRC masa setelahnya. Salah satu peran besar Deng lainnya setelah keluar dalam jabatan resminya adalah ketika penyelesaian demonstrasi Tiananmen pada 1989. Hanya dengan kekuatan TPR dan kekerasan militer, demonstrasi menuntut keterbukaan ekonomi harus diiringi dengan keterbukaan politik yang dilakukan oleh mahasiswa dapat dihentikan, dan kewibawaan partai masih dapat dipertahankan.<sup>54</sup> Hal tersebut menjadikan RRC menjadi pusat perhatian serta mendapat kecaman dari dunia untuk beberapa saat atas tindak kekerasan terbesar dalam abad 20 setelah Indonesia. Kekerasan militer yang dilakukan terhadap demonstran 1989 yakni dengan dibunuhnya ratusan ribu demonstran yang sebagian besar terdiri dari mahasiswa.<sup>55</sup> Menurut salah satu sumber terpercaya yakni *Hongkong Publishing House* dalam “A Cronicle of the Chinese Democratic Uprising melaporkan pada 4 Juni 1989 2.600 orang dibunuh, 5 Juni tercatat 5.000 orang yang dibunuh dan pada 6 Juni sekitar 6000 lebih orang yang dibunuh serta 30.000 orang terluka. Salah satu mahasiswa pimpinan demonstran yakni Wu’er Kaixi menyatakan:

“ Saat ini saya tidak bisa memastikan berapa banyak orang yang sudah dibunuh, tetapi saya dapat memberitahumu berapa banyak orang yang

---

<sup>53</sup> Rene L. Pattiradjawane, “Partai Komunis Cina Menghadapi Badai”, dalam Umar Suryadi Bakri (Editor), *Pasca Deng Xiaoping: Cina Quo Vadis?*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), hlm. 1-5.

<sup>54</sup> A. Dahana, *loc.cit.*

<sup>55</sup> Jean Philippe Beja, “China Since Tiananmen: The Massacres Long Shadow”, dalam *Jurnal of Democracy* Vol. 20 No. 3 2009, hlm. 1.

sudah dibunuh di lapangan Tiananmen yakni paling sedikit ribuan orang. Boleh dikatakan keseluruhan angka kematian tanpa saya melebih-lebihkan yakni sekitar 10.000 orang. Ini hanya perkiraan kasar”.<sup>56</sup>

Deng berpendapat tindakan tersebut bertujuan memperoleh kedamaian dan stabilitas partai selama 20 tahun ke depan setelah 4 Juni 1989 yang dikenal dengan Peristiwa Tiananmen.<sup>57</sup>

Sebagai salah satu tetua yang memiliki peranan penting dalam pengambilan keputusan di RRC, Deng termasuk ke dalam 8 politisi senior yang berpengaruh. Saat usianya 80 tahun, Deng masih memiliki wewenang dan mampu menengahi perseteruan antara kelompok reformis dan konservatif. Sistem politik RRC sama dengan sistem politik di Asia pada umumnya. Untuk mencegah terjadinya gejolak politik yang dapat mengganggu stabilitas nasional, para pemimpin selalu melakukan kompromi dan menjaga kepentingan masing-masing beserta kelompoknya.<sup>58</sup> Bahkan istilah pensiun bukan didasarkan pada posisi jabatan yang ditanggalkan atau batas usia, tetapi lebih kepada peran personal serta keberadaannya bagi partai. Kepentingan utama bagi Deng tetap pada pembangunan ekonomi, serta mempertahankan kedudukan partai. Prinsip dan semangat reformasinya yang selalu membawa Deng mampu berkuasa di RRC dalam waktu yang cukup lama. Sistem politik serta keberadaan partai yang tidak menguntungkan bagi RRC seiring dengan runtuhnya rezim-rezim komunis totaliter di bekas jajahan Uni Soviet dan Eropa Timur. Kondisi tersebut menimbulkan gerakan-gerakan prodemokrasi bermunculan seiring dengan terjadinya peristiwa Tiananmen 1989, menjadikan RRC untuk terus melanjutkan Reformasi Ekonomi dengan pembaruan-pembaruan lain dalam partai.

### 3.3 Pergulatan Politik Internal PKC Rezim Deng Xiaoping

---

<sup>56</sup> Peter Li, Steven Mark, and Marjorie H. Li, *Culture and Politics in China*, (New Brunswick: Transaction Inc., 1991), hlm.35 dalam Albert Chang, “Revisiting the Tiananmen Square Incident: A Distorted Image from Both Sides of the Lens”, *Stanford Journal of East Asian Affairs*, 20 April 2005, hlm. 11.

<sup>57</sup> Jean Philippe Beja, *loc.cit.*

<sup>58</sup> *Ibid.*

Keberadaan PKC merupakan sebuah wadah kreatifitas politik RRC untuk menunjukkan sosialisme serta komunisme di Asia terus berkembang dan mencapai kejayaan. Tokoh-tokoh politik sepanjang sejarah RRC seperti Chen Duxiu, Mao Zedong, Zhou Enlai, Deng Xiaoping serta tokoh lain adalah bagian tidak terpisahkan bagi perkembangan PKC. Setiap kepemimpinan memiliki ciri khas tersendiri, seperti Mao Zedong yang merupakan seorang pemimpin kolektif dengan mengutamakan kultus individu, Zhou Enlai seorang moderat yang cukup toleran terhadap liberalisme, serta Deng Xiaoping seorang yang pragmatis-realis dan mendukung penuh RRC menuju ekonomi berasaskan pasar bebas. Keberagaman tersebut yang kemudian menjadi warna tersendiri bagi perpolitikan PKC. Keberadaan partai tunggal dalam sebuah negara layaknya PKC memungkinkan terjadinya persoalan-persoalan internal dalam perkembangannya. Hal tersebut digambarkan dengan munculnya faksi-faksi dalam partai. Faksi merupakan kelompok yang terdapat dalam sebuah partai yang cenderung memicu perpecahan dalam partai politik. Sama halnya dengan PKC, sebagai partai tunggal yang berdiri di RRC, terdapat beberapa kelompok yang berkuasa dalam partai dan cenderung dominan. Secara garis besar kelompok tersebut dapat dibagi menjadi Kelompok radikal-revolusioner, kelompok pragmatis-realis dan kelompok moderat.

Kelompok radikal-revolusioner terdiri atas Maois seperti Kelompok Empat yang dikenal dengan keradikalannya dalam mempertahankan keberadaan Maois serta ajaran Maoisme.<sup>59</sup> Kelompok tersebut terdiri atas Zhang Cungqiao, Wang Hungwen, Yao Wenyuan, dan Jiang Qing. Keterlibatan Kelompok Empat dalam Revolusi Kebudayaan merupakan salah satu yang terbesar selama kepemimpinan Mao, dan ikut bertanggung jawab setelah Revolusi Kebudayaan usai. Salah satu pemberontakan terbesar yang dilakukan oleh kelompok ini yakni setelah kematian Mao. Rencana kudeta pada kepemimpinan Hu Yaobang justru menjadikan keempat anggotanya dipecat dari partai serta diadili secara hukum.

Kelompok pragmatis-realis bagian dari kelompok yang banyak belajar di luar negeri sebelumnya, seperti Deng Xiaoping dan Zhou Enlai yang pernah

---

<sup>59</sup> Poltak Partogi Nainggolan, *op.cit.*, hlm. 41-44.

belajar di Perancis dan mengenal komunisme. Kelompok tersebut pada dasarnya cenderung lebih liberal dan realistis dalam menjalankan pemerintahan dan partai. Hal itu terbukti dengan keterlibatan kelompok pragmatis-realis yang mendukung penuh serta pelaksana aktif atas beberapa reformasi yang terjadi di RRC pada 1980an. Kecenderungan terhadap negara Barat diperoleh selama keberadaannya di Eropa. Hal ini yang membedakan pemikiran Mao Zedong yang didasarkan dengan kondisi RRC dan Deng Xiaoping melihat ke luar selain kondisi RRC sendiri.

Kelompok moderat sama halnya, kelompok ini berada di antara keduanya. Zhou Enlai yang merupakan kawan semasa Deng Xiaoping di Perancis, Zhou lebih cenderung moderat dan ragu-ragu mengenai pemahaman liberal secara penuh untuk RRC. Kondisi tersebut yang menjadikan Zhou berada pada kedua belah pihak yakni Mao dan Deng. Prioritas Zhou adalah perkembangan RRC menjadi sebuah negara yang maju dengan tetap mengusung PKC sebagai komando politik.

Perseteruan yang terjadi dalam tubuh partai layaknya sebuah tradisi yang berkembang dalam masyarakat. Konflik internal dalam PKC sudah ada sejak partai tersebut didirikan. Kondisi tersebut digambarkan dengan perbedaan pendapat serta pemikiran kelompok kader tua dan kader muda. Kader-kader tua cenderung konservatif dalam memandang beberapa hal, dan kader muda terkesan hiperaktif dan radikal. Gambaran perbedaan tersebut juga ada pada masa setelahnya yang dicerminkan pada kepemimpinan Mao Zedong dan Deng Xiaoping. Pada masa kepemimpinan Deng Xiaoping, faksi yang terdapat di dalamnya yakni kelompok reformis serta kelompok konservatif dan militer. Perseteruan keduanya meliputi perbedaan pandangan ideologi, pandangan ekonomi serta kebijakan-kebijakan politik lainnya. Secara garis besar gambaran perbedaan pandangan ideologi dan ekonomi antara kelompok tersebut sebagai berikut:<sup>60</sup>

1. Reformasi Gengshen dan Pelaksanaan Pemilu Lokal pada 1980.

Reformasi Gengshen dan pemilu lokal merupakan ide yang diprakarsai oleh Deng Xiaoping, ide tersebut ditujukan Deng sebagai alat pemersatu koalisi Deng

---

<sup>60</sup> June Teufel Dreyer, *loc.cit.*

untuk menyingkirkan Hua Guofeng. Kelompok reformis mendukung pelaksanaan reformasi dan pemilu lokal. Tokoh: Zhao Ziyang dan HU Yaobang. Respon yang sama ditunjukkan oleh kelompok konservatif dan militer yang ikut mendukung pelaksanaan reformasi dan pemilu lokal.

## 2. Karya Bai Hua “Cinta Tak Terbalas” pada 1981.

Bai Hua merupakan seorang penulis yang juga merupakan anggota departemen politik People’s Liberation Army (PLA) di wilayah Wuhan pada kepemimpinan Mao Zedong. Karya Bai Hua yang berjudul “Cinta Tak Terbalas” menggambarkan keputusan atas patriotisme seorang pelukis tua yang mengalami kondisi kesalahpahaman dan tuduhan palsu pada pemerintahan Mao Zedong ketika ia kembali dari AS. Kelompok reformis memberikan dukungan pada karya tersebut sebagai salah satu bentuk kebebasan dalam seni dan budaya. Tetapi karena tekanan yang dilakukan oleh kelompok konservatif dan militer yang menggugat karya tersebut, kelompok reformis terpaksa menarik dukungannya. Tokoh reformis yang ikut mendukung karya tersebut yakni Hu Yaobang. Kelompok konservatif dan militer menggugat karya tersebut karena menganggapnya sebagai hasil pengaruh paham borjuis liberal. Deng Xiaoping juga mengkritik karya tersebut dan menuduh kader partai kehilangan semangat ideologisnya.

## 3. Kejahatan Ekonomi dan Korupsi dalam Partai pada 1981.

Pemberlakuan politik pintu terbuka yang dilakukan oleh Deng Xiaoping merupakan salah satu upaya dalam mensukseskan jalannya Reformasi Ekonomi. Kebijakan tersebut merupakan salah satu upaya meningkatkan penanaman modal asing di RRC. Selain memperoleh kemajuan di bidang ekonomi, kejahatan ekonomi dan korupsi juga terjadi dalam partai sebagai bentuk pengaruh dari Barat. Kelompok reformis seperti Zhao Ziyang dan Hu Yaobang mengecam munculnya kejahatan ekonomi dan korupsi oleh kader partai. Chen Yun sebagai perwakilan dari kelompok konservatif dan militer justru mengkritik kelompok reformis atas munculnya korupsi, dan menganggap SEZ’s sebagai penyebab korupsi. Deng juga menyesalkan terjadinya korupsi dikalangan kader partai, tetapi ia tetap konsisten mendukung pelaksanaan reformasi lebih lanjut.

4. Peremajaan Kader dan Pembentukan Dewan Penasehat Pusat pada 1981-1982.

Peremajaan kader dan pembentukan Dewan Penasehat Pusat merupakan gagasan yang diberikan oleh Deng Xiaoping. Pada kasus tersebut kelompok reformis tidak memberikan pendapat yang menimbulkan perbedaan pendapat dengan kelompok konservatif. Kelompok konservatif dan militer justru menunjukkan respon kuat yang rata-rata anggotanya menolak meninggalkan posisinya di PKC seperti Li Xiannian, Peng Zhen, dan Chen Yun.

5. Reformasi Struktur Organisasi Partai: Pembentukan Kepemimpinan Kolektif pada 1982.

Reformasi Ekonomi yang dilakukan RRC mempengaruhi kondisi organisasi dan perkembangan politik partai. Hal tersebut juga ditunjukkan dengan adanya reformasi struktur organisasi partai yakni dengan adanya pembentukan kepemimpinan kolektif. Reformasi ini didukung oleh Deng Xiaoping dan kedua kelompok dalam koalisi pemerintahannya dengan Li Xiannian, Chen Yun dan Ye Jiating sebagai perwakilan dari kelompok konservatif dan militer. Dalam reformasi tersebut, Hu Yaobang ditunjuk menjadi Sekjen.

6. Pengesahan UUD 1982.

Dalam pengesahan UUD 1982 kelompok konservatif mendukung penolakan sistem komune. Sistem komune yang awalnya mengatur urusan administratif rakyat RRC secara terpusat dihapuskan pada kepemimpinan Deng Xiaoping dan terdapat dalam UUD 1982. Kelompok konservatif dan militer lebih bersikap dengan memberi batasan terhadap hak sipil warganegara terutama setelah penghapusan komune. Secara keseluruhan Deng Xiaoping mendukung pelaksanaan UUD 1982.

7. Perluasan wilayah dengan fasilitas ekonomi khusus (Special Economic Zones) pada 1984-1985.

Kebijakan SEZ's yang menjadikan Shenzhen sebagai wilayah percontohan, sebagai tindak lanjut dilakukan perluasan wilayah dengan fasilitas SEZ's setelah keberhasilan mengesahkan yang ditunjukkan SEZ Shenzhen. Kelompok reformis seperti Zhao Ziyang, Hu Yaobang dan Wang Zhen mendukung pelaksanaan

SEZ's harus dilanjutkan dan diperluas wilayahnya. Meskipun sebelumnya terdapat perbedaan pendapat antara Zhao Ziyang dan Hu Yaobang dalam kebijakan ekonomi desentralisasi-sentralisasi, namun keduanya sepakat perihal perluasan wilayah SEZ's. Sikap skeptis justru ditunjukkan oleh kelompok konservatif dan militer seperti Chen Yun, Hu Qiaomu dan Deng Liqun atas pelaksanaan SEZ's. Ketika muncul masalah di Shenzhen, kelompok ini kembali menuduh dibukanya SEZ's sebagai penyebab korupsi dan kemerosotan moral kader partai seperti yang terjadi pada 1981. Posisi kelompok reformis diperkuat oleh dukungan Deng yang juga menghendaki pelaksanaan dan pengembangan SEZ's. Sebagai bentuk usaha Deng menyeimbangkan kedua kelompok, ketika muncul masalah di Shenzhen yang merupakan proyek percontohan SEZ's, Deng terpaksa memperlambat pengembangan SEZ's antara lain dengan menunda kontrak dengan pihak asing.

8. Kelanjutan kampanye anti polusi spritual pada 1984.

Kampanye anti polusi spritual meliputi persoalan korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, penyelundupan dan lainnya. Polusi spritual merupakan salah satu dampak kebijakan politik pintu terbuka. Kampanye tersebut dilaksanakan untuk membenahi moral kader dari ancaman polusi spritual. Kelompok konservatif dan militer melakukan kampanye antara lain dengan mengkritik SEZ's yang diprakarsai oleh Chen Yun, Deng Liqun dan Wang Zhen. Kelompok reformis menentang kegiatan kampanye yang dinilai melampaui batas menurut Zhao Ziyang dan Hu Yaobang. Untuk itu Deng merasa perlu meyiapkan institusi-institusi hukum disamping mempertinggi pengawasan disiplin.<sup>61</sup> Pada dasarnya Deng mendukung kampanye, tetapi karena khawatir reformasi terhambat kampanye dihentikan.

9. Gerakan anti kiri dan konsolidasi partai pada 1984.

Gerakan anti kiri dan konsolidasi partai dilaksanakan oleh kelompok reformis, salah satu gerakan yang dilakukan yakni dengan cara pembenahan PKC. Berbeda halnya dengan kelompok konservatif dan militer yang tidak terlalu

---

<sup>61</sup> Poltak Partogi Nainggolan, *op.cit*, hlm. 94.

antusias dalam gerakan tersebut. Gerakan tersebut merupakan bagian dari kebijakan dua perjuangan yang diterapkan Deng Xiaoping.

#### 10. Kontroversi paham Marxisme pada 1985.

Paham Marxisme merupakan landasan utama ideologi PKC. Seiring dengan perkembangan yang diperoleh terutama selama Reformasi Ekonomi, RRC banyak mengalami perubahan ekonomi dan politik yang mempengaruhi keberadaan PKC. Reformasi Ekonomi yang mengarah pada kebijakan ekonomi kapitalis menimbulkan kontroversi akan keberadaan ideologi Marxisme bagi keberlangsungan negara dan partai. Dalam permasalahan tersebut kelompok reformis mendukung alternatif paham selain Marxisme, sebaliknya kelompok konservatif menentang alternatif paham selain Marxisme. Dalam berusaha menengahi keduanya, Deng memberi toleransi kepemilikan dan usaha pribadi, tetapi menegaskan kapitalisme tidak dapat menguasai RRC.

#### 11. Paham Liberalisme Borjuis pada 1984-1985.

Perkembangan reformasi RRC yang mempengaruhi hampir keseluruhan aspek kehidupan negara termasuk permasalahan ideologi, menimbulkan perdebatan bagi kedua kelompok mengenai keberadaan paham Liberalisme Borjuis. Kelompok konservatif dan militer menganggap diskusi dan pengembangan reformasi menuju pada berkembangnya paham Liberalisme Borjuis. Tidak adanya batasan ideologi dalam mengembangkan reformasi menjadi salah satu argumen kelompok konservatif dan militer menentang berkembangnya paham tersebut. Sebaliknya, kelompok reformis memberikan dukungan terhadap pengembangan reformasi tanpa adanya batasan ideologi. Sebagai pemegang otoritas tertinggi atas Reformasi Ekonomi, Deng Xiaoping tidak melarang diskusi dan pendekatan ideologi terhadap reformasi asalkan tidak menghambat reformasi di bidang ekonomi.

#### 12. Usul TPR mengenai pembenahan reformasi pada 1985.

TPR mengusulkan pembenahan mengenai asas pelaksanaan reformasi harus didasarkan pada Empat Prinsip Utama. Empat Prinsip Utama yang meliputi RRC tetap negara sosialis, Diktatur demokratik rakyat, Keunggulan PKC dan Maoisme tetap merupakan ideologi negara, diterima sebagai pegangan partai dan negara.

Kelompok reformis tidak memberikan pendapatnya mengenai permasalahan tersebut. Usul TPR yang merupakan pendapat dari kelompok konservatif dan militer menganggap reformasi telah menyimpang dari Empat Prinsip Utama. Deng menganggap sikap tersebut justru sebagai tindakan menyimpang, karenanya Deng memutuskan memensiunkan pemimpin militer TPR dan PKC yang dianggap menyimpang.

13. Kebebasan dalam seni dan budaya yang berkembang menjadi unjuk rasa dan demonstrasi pada 1985.

Kebebasan dalam seni dan budaya yang terjadi selama reformasi berkembang menjadi unjuk rasa dan demonstrasi pada 1985 sebagai permulaan yang berujung pada demonstrasi menuntut keterbukaan politik pada Peristiwa Tiananmen 1989. Menurut kelompok konservatif dan militer, kebebasan tersebut merupakan salah satu dampak politik pintu terbuka yang termasuk dalam polusi spritual dan dianggap mengancam RRC. Diskusi dan pengembangan reformasi juga dianggap telah menjurus pada berkembangnya paham Liberalisme Borjuis. Deng Liqun merupakan salah satu anggota kelompok konservatif dan militer yang ikut menentang berkembangnya paham tersebut, dipecat dari jabatannya sebagai ketua Departemen Propaganda PKC oleh Deng karena kritiknya terhadap kebijakan pintu terbuka. Kelompok reformis yang diwakili oleh Hu Yaobang dan Zhu Houze tetap memberikan dukungan terhadap pengembangan reformasi tanpa adanya batasan ideologi.

14. Pertemuan pemimpin PKC di Beidahe pada 1986.

Pada pertemuan pemimpin PKC di Beidahe 1986 kelompok reformis yang diwakili oleh Hu Yaobang mengusulkan pemisahan kebijakan ekonomi dan administrasi, perbaikan struktur dan institusi. Berbeda dengan kelompok konservatif dan militer yang diwakili Peng Zhen, mengusulkan untuk membenahi moral kader, memberantas Liberalisme Borjuis dan menolak perubahan Empat Prinsip Utama. Sebagai penengah antara kedua kelompok, Deng mendukung usul pemisahan pengambilan keputusan ekonomi dan administrasi tetapi mengingatkan mengenai Liberalisme Borjuis.

15. Demonstrasi pelajar dan mahasiswa pada 1986.

Pada 1986, pelajar dan mahasiswa Beijing melakukan demonstrasi yang menuntut pembenahan inflasi, korupsi dan birokratisasi, serta diadakannya pemilu yang demokratis. Inflasi yang terjadi pada 1986 sebagai dampak dari politik pintu terbuka dan dampak politik spritual lainnya memicu demonstrasi pelajar dan mahasiswa. Pada permasalahan tersebut, terdapat tokoh pendukung pelaksanaan demonstrasi dari kelompok reformis seperti Fang Lizhi, akibatnya Hu Yaobang dipecat dari jabatannya sebagai sekjen PKC dan digantikan oleh Zhao Ziyang. Pemecatan tersebut karena Hu Yaobang dianggap lunak dalam menghadapi demonstran. Kelompok konservatif dan militer seperti Wang Zhen, Peng Zhen, Hu Qiaomu, Bo Yibo dan Deng Liqun justru mengambil tindakan represif dalam menghadapi demonstran. Sebagai salah satu orang yang merupakan pimpinan militer dan partai, Deng mendukung tindakan kontrol dan tekanan terhadap orang-orang yang dianggapnya mengganggu jalannya reformasi.

#### 16. Pelaksanaan Reformasi Ekonomi pada 1986.

Sebagai bentuk dukungannya terhadap pelaksanaan dan perkembangan Reformasi Ekonomi, kelompok reformis yang diwakili Zhao Ziyang menginginkan reformasi radikal di mana pasar menjadi mekanisme utama perekonomian yang dilengkapi dengan regulasi peraturan. Kelompok konservatif dan militer yang diwakili Chen Yun memiliki pandangan berbeda mengenai hal tersebut, reformasi perlu dilakukan secara perlahan tanpa meninggalkan unsur perencanaan pusat sebagai dasar dan pasar sebagai pelengkap. Pelaksanaan Refomasi Ekonomi merupakan prioritas utama bagi Deng Xiaoping, untuk itu Deng mendukung pelaksanaan ekonomi pasar tanpa meninggalkan tugas pengawasan oleh partai, terutama dalam bidang politik.

#### 17. Kongres PKC ke-13 pada 1987.

Pada Kongres PKC ke-13 1987 merupakan gambaran posisi kekuasaan kelompok reformis dan kelompok konservatif dan militer. Pada kongres tersebut kelompok reformis memperoleh posisi lebih baik dengan disetujuinya rencana reformasi yang diajukan. Selain itu, Zhao Ziyang resmi dilantik sebagai sekjen PKC menggantikan Hu Yaobang. Pada saat yang sama Li Peng yang berasal dari kelompok konservatif dan militer ditunjuk sebagai PM menggantikan Zhao.

Keputusan tersebut sebagai upaya dalam membuat keseimbangan antara kedua faksi dan meredam keradikalan kelompok reformis.

18. Teori “Tahap Awal Sosialisme/Primary Stage of Socialism” pada 1987.

Ide Zhao Ziyang mengenai Teori “Tahap Awal Sosialisme/Primary Stage of Socialism” yang merupakan doktrin mengenai pembangunan ekonomi RRC harus berpatokan pada Empat Prinsip Utama, Reformasi Ekonomi, dan kebijakan politik pintu terbuka. Ide tersebut didukung oleh kelompok reformis dan pelaksanaan ekonomi pasar harus dilakukan untuk mengejar ketinggalan dari negara kapitalis. Sebaliknya, kelompok konservatif dan militer tidak setuju atas pelaksanaan ekonomi pasar tanpa batasan. Meskipun setuju terhadap pelaksanaan Reformasi Ekonomi, kelompok tersebut berpendapat kontrol dan pengawasan dari pusat tidak boleh dilepaskan. Secara umum Deng tidak mendukung salah satu kelompok dalam masalah tersebut. Namun Deng tetap menegaskan bahwa pelaksanaan Refomasi Ekonomi adalah hal terpenting yang tidak boleh dikesampingkan.

19. Konsep Neo-Otoritarianisme pada 1987-1988.

Konsep Neo-Otoritarianisme merupakan konsep yang dicetuskan oleh Zhao Ziyang sebagai cara mencapai kepemimpinan yang kuat pada tahap awal pembentukan masyarakat sosialis. Konsep tersebut juga didukung oleh anggota kelompok reformis lain seperti Chen Yizi, Wu Jiaxiang, dan Bao Tong. Penolakan atas tersebut dilakukan oleh kelompok konservatif dan militer yang dimotori oleh Chen Yun dengan anggapan bahwa Neo-Otoritarianisme adalah pengembangan paham Liberalisme Borjuis. Deng tidak memberi pendapat tegas mengenai masalah tersebut, pada kenyataannya konsep tersebut tidak pernah terlaksana sampai terjadinya Peristiwa Tiananmen 1989.

20. Kongres Rakyat Nasional ke-7 pada 1988.

Pada KRN ke-7 1988 kelompok reformis menekankan pentingnya reformasi dengan memperluas bidang kajian dan melakukan reformasi struktural. Seiring perkembangan reformasi yang berdampak terhadap partai dan sektor lainnya, menurut kelompok tersebut beberapa poin tadi perlu ditekankan lagi pelaksanaannya. Di sisi lain menekankan pelaksanaan sosialis dengan petunjuk atasan dan menjaga kestabilan ekonomi sebelum menjalankan reformasi juga

ditekankan oleh kelompok konservatif dan militer yang diwakili Chen Yun. Deng berpendapat bahwa reformasi di bidang ideologis dapat dilakukan selama tidak mengganggu jalannya Reformasi Ekonomi yang bermuara pada Empat Modernisasi.

21. Situasi ekonomi suram, kinerja perekonomian menurun, angka pengangguran meningkat dan urbanisasi gelap meningkat pada 1988.

Situasi pada 1988 yang menunjukkan ekonomi RRC dalam kondisi kurang baik, kinerja perekonomian menurun serta angka pengangguran dan urbanisasi gelap meningkat menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Dalam kondisi tersebut, kelompok reformis cenderung melakukan pembenahan struktural dalam perusahaan dan desentralisasi ekonomi. Zhao Ziyang juga mengusulkan pelaksanaan deregulasi harga. Pelaksanaan deregulasi harga tersebut awalnya didukung oleh Deng. Tetapi karena kegagalan program tersebut, Deng menarik dukungan dan memberi kendali ekonomi pada kelompok konservatif. Sikap yang ditunjukkan kelompok konservatif dan militer yang diwakili Li Peng yakni dengan mendukung pertumbuhan ekonomi secara perlahan-lahan dengan mengutamakan stabilitas dan desentralisasi.

22. Demonstrasi Pelajar dan Mahasiswa di Tiananmen Beijing pada 1988.

Demonstrasi yang berujung pada Peristiwa Tiananmen 1989 merupakan salah satu bentuk protes terbesar setelah Reformasi Ekonomi dilaksanakan. Tuntutan akan keterbukaan politik akibat berkembangnya liberalisme selama kebijakan politik pintu terbuka, menjadikan Deng mengambil tindakan represif untuk tetap memelihara keutuhan RRC. Meskipun hal tersebut berarti menghentikan secara temporer kegiatan reformasi yang tengah berlangsung. Kelompok konservatif dan militer mendukung Deng agar mengerahkan TPR untuk menghentikan para demonstran. Zhao Ziyang dibebastugaskan dari kedudukannya sebagai sekjen PKC, dan dituduh menggerakkan pemberontak kontra-revolusioner karena kecenderungannya yang mengambil tindakan lunak pada demonstran.

Permasalahan yang terdapat dalam tubuh partai selama kepemimpinan Deng meliputi perselisihan pendapat antara dua kelompok yang terdapat dalam pemerintahan koalisinya. Permasalahan krusial yang meliputi pemerintahan Deng

tersebut berkaitan dengan jalannya Reformasi Ekonomi di RRC. Reformasi yang dijalankan RRC dalam rangka membenahi serta mengembangkan tingkat perekonomian negara, menimbulkan perubahan-perubahan dalam segi kehidupan negara yang lainnya. Perubahan tersebut di antaranya tuntutan masyarakat yang mulai menginginkan adanya keterbukaan politik dalam tubuh partai. Protes-protes bermunculan dari beberapa kalangan masyarakat seperti para pelajar dan mahasiswa yang melakukan demonstrasi dan berujung pada Peristiwa Tiananmen 1989.

Perbedaan pendapat antara kelompok reformis dengan kelompok konservatif dan militer dalam menentukan arah kebijakan partai dan negara menjadikan Deng bersikap sebagai penengah yang bijaksana dan adil. Kecenderungan Deng terhadap kedua kelompok tersebut meliputi hal-hal yang berkaitan dengan dukungan penuh terhadap pengembangan Reformasi Ekonomi serta keberadaan partai sebagai kontrol kekuasaan.<sup>62</sup> Konflik yang terdapat dalam tubuh partai antara dua faksi lebih banyak dikemukakan menurut pandangan ideologi masing-masing. Permasalahan sudut pandang ideologi menurut keduanya memiliki pemaknaan serta realisasi yang sangat berbeda. Kelompok reformis menganggap bahwa ideologi Marxisme mampu disandingkan dengan paham alternatif lain yang dianggap mampu menjadi pedoman bagi perkembangan RRC. Kelompok konservatif dan militer menganggap bahwa ideologi Marxisme merupakan ideologi pokok dan wajib digunakan sebagai landasan serta partai yang memposisikan diri sebagai kontrol kekuasaan. Kelompok reformis menunjukkan antusiasme yang tinggi atas pelaksanaan Reformasi Ekonomi. Pandangan kelompok tersebut terhadap pembaruan dalam bidang ekonomi harus dilakukan secara radikal salah satunya dengan membuka diri terhadap asing. Bukan saja kerjasama ekonomi, namun juga ikut mempelajari serta mempertimbangkan paham-paham lain yang mampu diterapkan di RRC. Bahkan untuk memperkuat Reformasi Ekonomi yang sedang berjalan, kelompok reformis seperti Zhao Ziyang dan Hu Yaobang mendukung adanya keterbukaan politik yang berujung pada berkembangnya liberalisme.

---

<sup>62</sup> *Ibid.*

Sebaliknya, kelompok konservatif dan militer lebih mempertahankan Empat Prinsip Utama yang meliputi RRC tetap negara sosialis, diktatur demokratik rakyat, keunggulan PKC dan Maoisme tetap merupakan ideologi negara, diterima sebagai pegangan partai dan negara. Mempertahankan prinsip tersebut merupakan bagian dari bentuk penolakan terhadap berkembangnya paham lain selain Marxisme. Secara tidak langsung kelompok ini juga menunjukkan bentuk penolakannya terhadap kebijakan politik pintu terbuka terutama mengenai penanaman modal asing di RRC. Anggapan yang diberikan terkait persoalan tersebut yakni kekhawatiran akan berkembangnya polusi spiritual di kalangan kader partai, yang justru akan mengancam keberlangsungan partai dan negara.

### **3.3.1 Dinamika Pergulatan Politik Internal PKC**

Kondisi internal partai yang menunjukkan adanya perbedaan pandangan ideologi dan arah kebijakan partai serta kebijakan ekonomi selama Reformasi Ekonomi, memberi gambaran mengenai sisi kepemimpinan Deng Xiaoping. Dalam kondisi tersebut menunjukkan bahwa selama pergulatan internal berlangsung, kedua kelompok saling mengutarakan pandangan masing-masing dan pada satu waktu keduanya bertolak belakang dan tidak menemui kesepakatan. Di antara kedua kelompok tersebut, Deng memposisikan diri sebagai pemimpin yang bijaksana dan memberi dukungan kepada kedua kelompok. Perbedaan pandangan atau pendapat dari kedua kelompok ditunjukkan dalam beberapa hal seperti pengambilan keputusan pada Kongres Partai, Kongres Rakyat Nasional serta pemberlakuan kebijakan pada rapat-rapat tertentu dalam partai.

Pada pertemuan pemimpin di Beidahe pada 1986 kelompok reformis mengusulkan adanya pemisahan kebijakan ekonomi dan administrasi untuk mendukung pelaksanaan Reformasi Ekonomi, serta perbaikan struktur dan institusi. Dalam hal ini kelompok konservatif berpikir mengenai hal lain yakni perlunya pembenahan moral kader untuk memberantas borjuisme liberal serta menolak perubahan dalam Empat Prinsip Utama. Dalam kasus ini, Deng Xiaoping memberikan dukungan terhadap kelompok reformis untuk menjalankan

kebijakan pemisahan ekonomi dan administrasi tersebut, namun juga mengingatkan mengenai borjuisme liberal yang dapat mengancam partai. Deng Xiaoping memberikan dukungan terhadap kelompok reformis dalam pelaksanaan Reformasi Ekonomi, tetapi Deng juga menerima Empat Prinsip Utama sebagai pertimbangan dalam pelaksanaan reformasi untuk memperoleh dukungan dari kelompok konservatif dan militer.

Kongres Partai ke-11 yang berlangsung pada 12-18 Agustus 1977 menghasilkan pemecatan terhadap Kelompok Empat setelah meninggalnya Mao Zedong dan pemulihan kembali atas jabatan Deng Xiaoping sebagai Wakil Perdana Menteri. Pada Kongres tersebut menunjukkan menegaskan posisi kelompok pragmatis-realis yang ditandai dengan kembalinya Deng Xiaoping, dalam waktu yang sama Deng menghimpun dukungan dari militer dan Hua Guofeng yang menjabat sebagai ketua partai untuk melancarkan modernisasi RRC. 1978-1988 Kelompok konservatif dan militer lebih dominan daripada kelompok reformis dalam jabatan pemerintahan.

Pada Kongres Partai ke-12 Sidang Pleno ke-6 pada pertemuan tersebut menghasilkan resolusi mengenai usaha untuk mempercepat laju produksi dan perkembangan ideologi negara dengan meningkatkan rentetan reformasi yang dilakukan, pelaksanaan politik pintu terbuka dan membangun sosialisme dengan karakteristik RRC.<sup>63</sup> Selain itu pada Sidang Pleno pertama Hu Yaobang menyampaikan rencana tahun berikutnya seperti Repelita ketujuh, sedangkan Chen Yun menyampaikan mengenai kerjasama antara pejabat senior dengan pejabat junior serta pergantian pejabat senior dengan pejabat yang masih junior. Pada pertemuan tersebut, penyampaian keduanya memiliki perbedaan, Hu Yaobang yang mewakili kelompok reformis memfokuskan pada urusan perkembangan ekonomi negara melalui Reformasi Ekonomi, sedangkan Chen Yun selain pertimbangan mengenai pembangunan ekonomi, reformasi dalam internal partai juga dibutuhkan untuk menunjang perkembangan partai. Pada Kongres Partai tersebut menghasilkan terpilihnya Hu Yaobang sebagai sekjen partai dan baik orang-orang reformis maupun konservatif militer menjabat dalam

---

<sup>63</sup> *Beijing Review*, 12 April 2014.

Komisi Kerja Politbiro. Kondisi tersebut menggambarkan posisi kedua kelompok berada pada taraf yang sama, namun kelompok reformis lebih dominan dengan Hu Yaobang yang menjabat sebagai sekjen partai.

Kongres ke-13 pada 25 Oktober-1 November 1987 terjadi perubahan dalam kursi kepemimpinan resmi PKC, hal ini digambarkan dengan pengunduran diri Deng Xiaoping dan beberapa pimpinan dari generasi kedua lainnya dari jabatan resmi dalam partai dan digantikan oleh dominasi kepemimpinan dari generasi ketiga seperti Zhao Ziyang. Pada dasarnya kondisi tersebut tidak menghilangkan posisi pimpinan tertinggi yang dimiliki Deng baik dalam partai maupun negara. Sidang Pleno ke-1 yang dilaksanakan pada 2 November 1987 menghasilkan terpilihnya Zhao Ziyang sebagai sekjen partai menggantikan Hu Yaobang, Chen Yun sebagai ketua Komisi Penasehat Pusat dan Li Peng sebagai PM. Naiknya Zhao Ziyang sebagai sekjen merupakan dominasi baru kelompok reformis setelah pengunduran diri Hu Yaobang dan tidak lama setelahnya, pada Sidang Pleno ke-4 23-24 Juni 1989, Zhao Ziyang mendapat kritikan keras dari PM Li Peng mengenai sikapnya terkait Peristiwa Tiananmen 1989 karena ikut mendukung para demonstran dalam melakukan demokrasi politik di RRC. Karena sikap tersebut Zhao Ziyang dipecat dari jabatannya sebagai sekjen partai, anggota Komisi Kerja Politbiro, anggota Politbiro dan wakil kepala Komisi Militer.<sup>64</sup> Peristiwa Tianamen 1989 menjadikan posisi kelompok militer dan konservatif lebih dominan karena peran TPR dalam meredam para demonstran dalam peristiwa tersebut untuk mengembalikan otoritas partai.

Untuk mengatasi persoalan dalam internal partai terutama mengenai pergulatan kedua faksi, sikap politik yang ditempuh oleh Deng Xiaoping dalam menangani pergulatan politik internal dalam partai yakni berkompromi dengan kedua kelompok tersebut. Pada satu sisi, Deng menaruh harapan pada orang-orang kepercayaannya seperti Hu Yaobang dan Zhao Ziyang yang merupakan kelompok reformis untuk mampu mendukungnya dalam pelaksanaan Reformasi Ekonomi.

---

<sup>64</sup>[https://en.wikipedia.org/wiki/13th\\_Central\\_Committee\\_of\\_the\\_Communist\\_Party\\_of\\_China](https://en.wikipedia.org/wiki/13th_Central_Committee_of_the_Communist_Party_of_China), diunduh pada 1 November 2015.

Di sisi lain Deng memilih berkompromi dengan kelompok konservatif dan militer terutama mengenai pelaksanaan Reformasi Ekonomi dengan tetap mempertimbangkan Empat Prinsip Utama sebagai pedoman. Pada perjalannya, dukungan Deng terhadap kelompok reformis untuk dapat melanjutkan pelaksanaan reformasi terhenti karena pemecatan Hu dan Zhao yang dilakukan oleh desakan kelompok konservatif dan militer terhadap kedua pimpinan reformis tersebut, karena tindakannya dianggap menimbulkan efek negatif bagi keberadaan partai.

Kebijakan-kebijakan partai yang dilakukan dalam rangka mengatasi persoalan internal tersebut meliputi reformasi struktural yang dilakukan dalam Kongres Partai ke-12 dan Kongres Partai ke-13, pembentukan lembaga-lembaga baru yang dapat menunjang kinerja partai seperti Komisi Penasehat Nasional dan Komisi Investigasi Disiplin Nasional, pembenahan etika dan moral para kader serta mengingatkan akan keberadaan liberlisme yang dapat berdampak pada partai. Serta tindakan tegas seperti pemecatan terhadap kader yang dianggap menyalahi asas partai dan membahayakan partai seperti yang dilakukan kelompok reformis dalam mendukung demokrasi politik secara terang-terangan oleh Hu Yaobang dan Zhao Ziyang. Dan Deng Liqun yang juga sempat dipecat dari jabatannya sebagai Kepala Departemen Propaganda PKC karena kritiknya terhadap kebijakan politik pintu terbuka Deng Xiaoping.

### **3.3.1.1 Kebijakan dalam Kepemimpinan Deng Xiaoping**

Pemerintahan Deng Xiaoping merupakan salah satu pemerintahan RRC yang mengutamakan kemajuan di bidang ekonomi serta kestabilan politik dengan tetap memprioritaskan tingkat kesejahteraan dan perekonomian negara yang maju. Alasan Deng mengusung Refomasi Ekonomi RRC adalah bentuk pembenahan perekonomian negara yang mengalami keterpurukan selama beberapa dasawarsa akibat dari Revolusi Kebudayaan serta kebijakan-kebijakan lain semasa kepemimpinan Mao Zedong. Kebijakan yang dijalankan selama pemerintahan

Deng diprioritaskan pada perkembangan perekonomian negara dengan mekanisme ekonomi pasar serta keterbukaan terhadap negara luar. Secara garis besar kebijakan Deng digambarkan dalam program Empat Modernisasi yakni meliputi modernisasi dalam bidang pertanian, modernisasi dalam bidang industri, modernisasi dalam ilmu pengetahuan dan teknologi serta modernisasi dalam bidang pertahanan nasional.<sup>65</sup>

Pembaruan yang dilakukan Deng terhadap keempat bidang tersebut dilakukan secara bertahap dan pasti. Modernisasi yang dilakukan dalam bidang pertanian dan industri dilakukan Deng dengan sistem pengembangan industri pedesaan terlebih dahulu dan kemudian disusul dengan pengembangan industri perkotaan. Kebijakan tersebut didasarkan atas kondisi RRC yang sebagian besar wilayahnya berupa wilayah pertanian serta pandangan bahwa petani merupakan basis utama dalam sosialisme RRC yang juga diterapkan oleh Mao Zedong. Pertimbangan lainnya yakni keyakinan bahwa industri pedesaan dapat menyokong perekonomian negara terutama wilayah pedesaan sehingga perkembangan desa dan kota dapat berjalanimbang dan meminimalisir jarak keduanya. Pengembangan kedua bidang tersebut juga didukung dengan kebijakan ekonomi pasar yang diimbangi dengan daya saing petani serta kebijakan yang diperbarui oleh negara baik dalam hal produksi maupun distribusi. Kepemilikan pribadi oleh petani serta kehendak ekonomi pasar memacu kinerja petani dalam meningkatkan produksi pertanian serta ketersediaan pangan. Sejak 1981 Gross National Product (GNP) RRC tumbuh mencapai rata-rata 9.98% dalam setahun. Hal tersebut merupakan pencapaian yang sangat tinggi dibandingkan dengan negara lain.<sup>66</sup> Pengenalan ekonomi pasar ke daerah pedesaan, di mana produksi pertanian tidak lagi ditentukan dengan target yang ditetapkan oleh pemerintah melainkan ditentukan oleh harga permintaan pasar. Antara 1979-1984 sektor pertanian RRC

---

<sup>65</sup> Jonathan D. Spence, *op.cit.* hlm. 653-659.

<sup>66</sup> “Fenomena Perkembangan Ekonomi Republik Rakyat Cina” dalam *Kompas*, Rabu 1 Maret 1989, hlm. IV.

mencapai pertumbuhan 7.89% setahun seperti yang tertera pada tabel 3.3. Hal tersebut juga merupakan pencapaian tertinggi setelah Perang Dunia Kedua.<sup>67</sup>

Meningkatnya pendapatan petani merupakan salah satu faktor yang mendorong pertumbuhan industri pedesaan. Sebaliknya dengan pertumbuhan yang mencapai tingkat tinggi pada sektor industri pedesaan justru menjadikan banyak petani beralih mata pencaharian. Seperti yang dikemukakan oleh majalah *Far Eastern Economic Review* bahwa pada 1982-1987 sekitar 68 juta petani di daerah pedesaan mengalihkan mata pencahariannya ke pabrik atau pekerjaan lain yang tidak termasuk dalam bidang pertanian. Ini menunjukkan bahwa laju pertumbuhan kerja di bidang non-pertanian mencapai sekitar rata-rata 21% dalam setahun.<sup>68</sup> Pada 1984-1987 sektor industri pedesaan mencapai laju rata-rata 37,7% setahun, empat kali lipat dari laju pertumbuhan sektor industri pemerintah yang terdapat pada tabel 3.2. Bahkan sumbangan terbesar dalam pertumbuhan produksi di bidang industri RRC diperoleh dari industri pedesaan.<sup>69</sup> Hal ini membuktikan keberhasilan yang dapat dicapai selama kepemimpinan Deng dengan program Empat Modernisasi mampu mencapai titik tertentu dengan memberlakukan ekonomi pasar. Selain memacu semangat bersaing masyarakat RRC, keuntungan lain yang diperoleh dari kebijakan tersebut yakni membuka peluang hubungan antara RRC dengan negara lain seperti Amerika Serikat, Taiwan, Singapura, Jepang bahkan Uni Soviet. Hubungan ekonomi yang dijalin antara RRC dengan negara-negara tersebut mampu meningkatkan ekonomi nasional melalui reformasi yang dijalankan.

Kebijakan dalam kepemimpinan Deng pada dasarnya berpondasi pada perkembangan perekonomian negara dan keberadaan partai. Upaya untuk merangsang perkembangan ekonomi salah satunya didukung dengan peghapusan Komune Rakyat. Penghapusan Komune Rakyat digantikan dengan program pembagian yang jelas dilakukan melalui sistem tanggung jawab serta kepemilikan pribadi yang diatur sedemikian rupa. Dalam sistem tanggung jawab, setiap

---

<sup>67</sup> *Ibid.*

<sup>68</sup> *Ibid.*

<sup>69</sup> *Ibid.*

keluarga petani tidak lagi bekerja sama dalam sebuah komune, melainkan melakukan perjanjian-perjanjian dengan pemerintahan administratif setempat untuk mengerjakan sebidang tanah dan mendapatkan keuntungan langsung.<sup>70</sup> Sistem pertanian baru tersebut memperbolehkan setiap satuan keluarga petani mengolah sendiri tanahnya, di bawah pengambilan keputusan masing-masing sehingga tampak ada penghapusan kebijakan kolektivisasi di pedesaan yang telah berlangsung. Perubahan lainnya adalah dihapuskannya monopoli negara, yang diawali dengan pengumuman pemerintahan pada 1 Januari 1985 bahwa pemerintahan RRC menegaskan kembali keputusan untuk menghapus pembelian hasil panen dengan sistem monopoli oleh negara. Penghapusan monopoli negara berarti memberlakukan mekanisme pasar. Pada awalnya, banyak kalangan yang khawatir dengan kebijakan baru tersebut, mengingat perekonomian pasar RRC belum melembaga.<sup>71</sup> Meskipun hal tersebut menyebabkan terjadinya kesenjangan antara rakyat miskin dan kaya dan ketimpangan antara sektor industri dan pertanian, namun demikian mampu diatasi dengan pengembangan industri pedesaan terlebih dahulu dengan mengandalkan ekonomi pasar.

Selain kebijakan-kebijakan yang diperuntukkan dalam hal peningkatan produksi baik pertanian maupun industri, peranan bantuan asing juga menjadi dukungan bagi jalannya reformasi. Menurut Deng, kebijakan-kebijakan sebelum 1978 dianggap konservatif dan mengakibatkan pembangunan negara tersendat. Untuk itu kemudian Deng lebih memfokuskan perhatiannya terhadap pembangunan ekonomi negara. Secara tegas dirinya mengungkapkan sebuah pernyataan dalam *Renmin Ribao*<sup>72</sup> pada 6 dan 26 Oktober 1984 bahwa “Sudah terlalu lama RRC mengalami stagnasi, berhenti membangun, karena menutup diri

---

<sup>70</sup> Rico Sanjaya, Syaiful M., dan Iskandar Syah, “Peranan Deng Xiaoping dalam Reformasi Cina Tahun 1978”, dalam *Jurnal Pendidikan dan Penelitian Sejarah Universitas Negeri Lampung*, Vol. 3 No.1 2015.

<sup>71</sup> A. Zaenurrofik, *China Naga Raksasa Asia : rahasia sukses China menguasai dunia*, (Yogyakarta: Garasi, 2008), hlm. 53

<sup>72</sup> *Renmin Ribao* atau yang juga dikenal dengan *Harian Rakyat* merupakan koran resmi milik Partai Komunis Cina yang menyuarakan pandangan dan kepentingan partai. Terrence Cheng, *op.cit.* , hlm. 447.

terhadap dunia luar. RRC tidak dapat berkembang, kalau mengucilkan diri dari bagian dunia luar.”<sup>73</sup>

Seperti yang telah diketahui bahwa sebuah bangsa yang telah memajukan negaranya terutama dalam bidang ekonomi tidak akan berhasil tanpa melakukan kerjasama dengan negara lain. Hal tersebut membuktikan bahwa setiap negara mampu melakukan kerjasama dengan pihak luar dalam rangka memajukan negaranya dengan syarat dan ketentuan tertentu dan menguntungkan bagi negaranya. Birma dan Albania merupakan dua negara sosialis yang menarik untuk dijadikan studi komparatif dengan RRC.<sup>74</sup> Birma merupakan salah satu negara di Asia yang juga dikenal dengan sosialisme-religiusnya karena mampu menjadikan agama Budha sebagai acuan dalam memahami ideologinya. Negara tersebut menutup diri terhadap dunia luar dalam jangka waktu yang cukup lama. Hal ini menjadikan Birma mengalami keterlambatan dalam menerima kemajuan yang sudah dimiliki oleh negara-negara lain. Namun demikian, menyadari hal tersebut, pemerintah Birma setahap demi setahap mulai membuka diri serta merintis kerjasama ekonomi dengan negara-negara lain.<sup>75</sup>

Albania merupakan salah satu negara di Eropa yang menerapkan ideologi komunis secara ortodoks, mengisolasi negaranya dalam banyak hal. Kondisi tersebut disebabkan oleh kekhawatiran negara akan dominasi asing dan pencemaran nilai luar atas kemurnian ajaran komunismenya.<sup>76</sup> Bahkan pada tahap lain pemerintah negara Albania menolak melakukan kerjasama dengan negara blok sosialis lainnya seperti Uni Soviet dan RRC serta negara kapitalis. Proses isolasi diri yang dilakukan Albania terhadap negara tetangganya dilakukan sejak 1946, sedangkan konstitusi baru yang disahkan pada 1975 melarang pemerintah menerima bantuan asing dan pinjaman dari negara kapitalis.<sup>77</sup> Pada perkembangannya, negara terbelakang tersebut kemudian justru terpaksa

---

<sup>73</sup> “Pernyataan Deng pada *Renmin Ribao*”, dalam *Kompas* 25 Agustus 1985, hlm. 8.

<sup>74</sup> Poltak Partogi Nainggolan, *op.cit*, hlm. 89.

<sup>75</sup> *Ibid.*

<sup>76</sup> *Ibid.*

<sup>77</sup> *Ibid.*

berdagang dengan Italia, Jerman Barat, Yugoslavia dan negara lainnya dalam rangka menambah pendapatan negara serta mencukupi kebutuhan rakyatnya.<sup>78</sup>

Sama halnya dengan kedua negara tersebut, RRC di bawah pemerintahan Deng Xiaoping memberlakukan politik pintu terbuka dalam rangka menerima bantuan asing dan membuka penanaman modal asing di RRC. Pemikiran Deng akan pencapaian yang perlu diperoleh RRC serta keterbelakangan yang harus ditinggalkan mampu dicapai melalui kerjasama serta keterbukaan terhadap negara luar. Pemikiran tersebut ternyata sejalan dengan pejabat penasihat kebijakan luar negeri Huan Xiang yang memberikan pandangannya di *The China Daily* pada awal Maret 1984 sebagai berikut:

“RRC akan menjadi negara paling terbelakang di Asia, apabila tidak segera mengembangkan teknologi majunya. Andaikata target kita adalah setingkat dengan Barat, maka pada akhir abad ini, negara-negara Barat akan jauh lebih maju lagi, sementara RRC akan tetap tertinggal 15 sampai 20 tahun di belakangnya. Sedangkan ketentuan kita adalah terdaftar sebagai negara maju dalam permulaan abad yang akan datang”<sup>79</sup>

Kondisi tersebut yang menjadikan RRC mampu memberlakukan politik pintu terbuka sebagai awal pembenahan perekonomian negara. Kendala utama yang dihadapi RRC berkaitan dengan usaha modernisasi negaranya adalah kelangkaan modal dan teknologi canggih.<sup>80</sup> Untuk itu, upaya atau program Empat Modernisasi yang dicetuskan Deng mengharuskan RRC untuk menerima bantuan Asing berupa pengadaan modal dalam bentuk investasi yang dilakukan di wilayah RRC. Misalnya SEZ's yang menjadikan beberapa wilayah di RRC sebagai wilayah ekonomi khusus yang menerima investasi asing dengan menetapkan syarat dan ketentuan terhadap penanaman modal asing, penerimaan kredit dan teknologi asing. Salah satunya yakni melalui undang-undang baru yang dibuat pada Juli 1979, yang mengatur tentang usaha bersama dalam membentuk

---

<sup>78</sup> “Albania sepeninggal Hoxha”, dalam *Kompas* 16 April 1985, hlm. 4.

<sup>79</sup> “Teknologi Maju, Keterbelakangan dan Kemajuan Ekonomi”, dalam *Kompas* 11 Agustus 1984, hlm. 5.

<sup>80</sup> Joce Kallgren, “The Turmoil of Modernization” dalam *Asia Survey* Vol. XXIV No. 1, (University of California, Januari 1984), hlm. 60.

gabungan antara modal pemerintah dan modal asing.<sup>81</sup> RRC nantinya tidak perlu mengalami politik ketergantungan terhadap negara-negara maju dalam upaya memajukan perekonomian negaranya. Undang-undang baru tersebut dibuat secara rinci dan detail yang memudahkan pemerintah RRC dalam mengawasi penyelenggaraan usaha bersama mulai dari segi pembagian laba, pembayaran pajak, alokasi sumber-sumber dan tenaga buruh. Berikut peta dan profil wilayah yang menjadi wilayah SEZ's yang memiliki otonomi khusus dalam rangka meningkatkan perekonomian negara melalui modal asing untuk meningkatkan ekspor dan pembangunan nasional RRC

**Tabel 3.7**  
**Profil Wilayah SEZ's RRC**

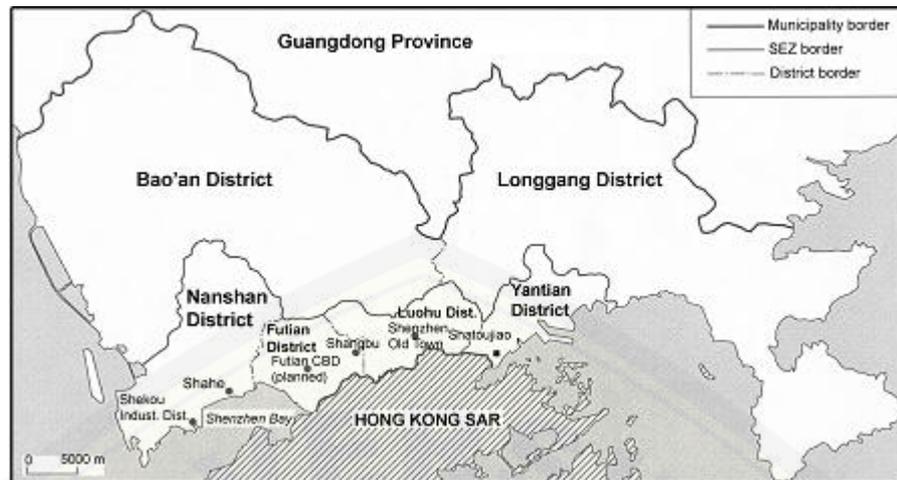
No.	Tahun	SEZ's	Provinsi	Luas Geografis
1.	1979	Shenzhen	Guangdong	316 km <sup>2</sup>
2.	1979	Zuhai	Guangdong	121 km <sup>2</sup>
3.	1979	Shantou	Guangdong	234 km <sup>2</sup>
4.	1979	Xiamen	Fujian	130 km <sup>2</sup>
5.	1984	Hainan	Hainan	-

Sumber: Marini L. Tantri, "Trajectories of China's Integration with The World Economy through SEZ's: A Study on Shenzhen SEZ", *The Working Papers 261*, (Bangalore: The institute for Social and Economic Change, 2011), hlm. 3.

Di antara lima wilayah ekonomi khusus tersebut Shenzhen merupakan wilayah yang menunjukkan keberhasilan tinggi sejak dibuka pada 1979. Beberapa faktor penting yang mempengaruhi pertumbuhan SEZ Shenzhen yakni secara geografis berdekatan dengan Hongkong, penerima jumlah modal asing terbesar dan tersedianya buruh migran murah.<sup>82</sup> Peningkatan yang mengesankan ditunjukkan SEZ Shenzhen mulai dari 1979-1994 dengan menunjukkan pertumbuhan GNP rata-rata 15,6 % tiap tahunnya. Berikut peta wilayah SEZ Shenzhen dan pertumbuhan ekonomi SEZ Shenzhen:

<sup>81</sup> Poltak Partogi Nainggolan, *op.cit.*, hlm. 94-95.

<sup>82</sup> Zai Liang "Foreign Investment, Economic Growth, and Temporary Migration: The Case of Shenzhen Special Economic Zone China", *Development and Society* Vol 28 No. 1 Juni 1999, hlm. 115-117.



Gambar 3.9 Peta Wilayah SEZ Shenzhen

Sumber: Mee Kam Ng dan Wing Shing Tang, "The Role of Planning in the Development of Shenzhen, China: Rhetoric and Realities", *Eurasian Geography and Economic*, 45, No.3, 2004, hlm. 191.

**Tabel 3.8**  
**Pertumbuhan Ekonomi Shenzhen (Nilai Bruto Hasil Produksi)**  
**Pada 1979-1994 (dalam jutaan yuan 1990)**

No.	Tahun	GVIO (Gross Value Industrial Output)	Industry Ringan	Industri Berat
1.	1979	83.40	73.79	9.61
2.	1980	124.39 (49.15%)	108.40	15.99
3.	1981	312.30 (151.11%)	294.51	17.79
4.	1982	454.35 (45.49%)	403.10	51.25
5.	1983	889.12 (95.69%)	719.70	169.42
6.	1984	2013.95 (126.51%)	1611.07	402.88
7.	1985	3188.32 (58.31%)	2616.73	571.59
8.	1986	4276.58 (34.13%)	3474.88	801.70
9.	1987	6866.04 (60.55%)	5477.86	1388.18
10.	1988	10612.74 (54.57%)	8177.17	2435.57
11.	1989	14014.86 (32.06%)	10107.67	3907.19
12.	1990	19526.26 (39.33%)	14113.73	5412.53
13.	1991	26546.75 (35.95%)	18434.49	8112.26
14.	1992	37138.00 (39.90%)	24269.19	12868.21
15.	1993	51768.00 (39.39%)	34202.00	17566.00
16.	1994	71697.27 (38.50%)	43480.03	28217.26

Sumber: Handbook of Shenzhen Statistic 1994 dalam Zai Liang, *op.cit.*, hlm. 121.

Secara geografis, letak Shenzhen yang berdekatan dengan wilayah Hongkong menjadi salah satu pusat kegiatan perekonomian internasional menjadi salah satu faktor banyaknya investasi asing ke RRC. Dalam rangka mengundang investasi asing, pemerintah membuka wilayah pantai utara hingga pantai selatan

RRC bagi dunia luar dengan pelimpahan hak otonomi yang luas.<sup>83</sup> Sebagian besar investasi asing yang masuk ke RRC ditanamkan dalam proyek-proyek produksi patungan di kawasan SEZ's. Selain itu juga terdapat sekitar 27 perusahaan minyak asing yang melakukan kerjasama modal dalam eksplorasi dan eksploitasi minyak bumi dan gas alam di RRC.<sup>84</sup> Kondisi lain yang menunjukkan bentuk kerjasama tersebut yakni mengenai penyerapan tenaga kerja yang diperoleh dari masyarakat lokal, dan kebanyakan terdiri dari buruh migran murah seperti yang ada di wilayah Shenzhen. Hal tersebut membantu meningkatkan kehidupan masyarakat Shenzhen terutama dalam mengatasi ketersediaan lapangan pekerjaan seiring dengan meningkatnya jumlah populasi wilayah tersebut setelah SEZ Shenzhen dibuka.

Perkembangan ekonomi Shenzhen yang pesat menunjukkan keberhasilan akan kebijakan politik pintu terbuka terutama mengenai penanaman modal asing. Kerjasama ekonomi RRC yang semakin luas dengan negara lain terutama wilayah terdekat seperti Hongkong menjadi keuntungan bagi RRC. Salah satunya adalah peningkatan investasi asing terutama mengenai proyek SEZ Shenzhen. Berikut daftar investasi asing di Shenzhen pada 1986-1993:

**Tabel 3.9**  
**Investasi Asing di Shenzhen Menurut Asal Negara Pada 1986-1993**  
**(Jutaan Dolar US)**

No.	Tahun	Negara					
		Hongkong	Taiwan	Jepang	AS	Perancis	Belanda
1.	1986	386.87	70.09	25.60	4.99	-	-
2.	1987	256.32	92.91	31.01	11.94	-	-
3.	1988	281.98	3.16	145.67	2.94	5.01	-
4.	1989	287.29	10.06	100.04	11.43	33.99	-
5.	1990	262.91	3.71	172.57	40.11	11.12	3.37
6.	1991	323.75	2.16	142.65	69.63	16.68	8.19
7.	1992	461.34	4.75	158.06	20.29	32.25	6.33
8.	1993	924.55	45.32	208.22	145.31	31.52	35.11

Sumber: Statistical Yearbook of Shenzhen 1994 dalam Zai Liang, *op.cit.*, hlm. 119.

<sup>83</sup> Poltak Partogi Nainggolan, *op.cit.*, 152.

<sup>84</sup> *Ibid.*, hlm. 153.

Di sisi lain pemerintah dapat mempelajari sistem pengelolaan maupun teknologi canggih yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan asing dalam proses produksi.<sup>85</sup> Konstitusi RRC pasal 10 yang dikemukakan sebelumnya juga menyatakan bahwa pelaksanaan yang berhubungan dengan industri dan perdagangan kapitalis dikontrol oleh organ-organ administrasi negara. Langkah efektif lain yang ditempuh oleh pemerintah RRC yakni mengatur modal yang telah terbentuk supaya terakumulasi di dalam negeri dan tidak mengalir ke luar negeri.<sup>86</sup> Langkah tersebut dilakukan dengan menentukan pengeluaran modal untuk proyek-proyek penting dan meminta negara eksportir untuk membeli komoditas RRC ketika terjadi defisit dalam neraca perdagangan. Dengan cara ini pemerintah RRC dapat menanggulangi kerugian yang dialami sewaktu-waktu. Menurut Direktur Penanaman Modal Asing Komisi Penanaman Modal Asing RRC pada 1981, penanaman modal asing di RRC mencapai US\$ 1.22 Milyar.<sup>87</sup> Sebagian besar dari investasi tersebut ditujukan pada wilayah ekonomi khusus yang disebut dengan SEZ's. Berikut daftar negara dan jumlah investasi asing di RRC selama 1980an:

**Tabel 3.10**  
**Daftar Negara, Bidang/Produksi dan Jumlah Investasi Asing di RRC 1980an dan 1990an**

No.	Negara	Bidang/ Produksi	Jumlah Investasi (US\$)
1.	Jepang (NKK Marubeni).	Kilang minyak di perusahaan Tienjin, proyek Shenzhen.	±4,3 Miliar
2.	Amerika Serikat (Mc Donnell Douglas, Boeing, General Electric)	Pesawat terbang, sistem kendali radar, teknologi penerbangan, proyek Shenzhen.	±4,7 Miliar
3.	Eropa Barat (VW)	Pabrik penghasil mobil penumpang model mutakhir (Santiana).	±220 Juta
4.	Spanyol	Kilang Minyak.	±300 Juta

<sup>85</sup> Budi S. Satari, "Pola Pemikiran Organisasi Ekonomi dan Penanaman Modal Asing di RRC", *Analisa*, Tahun X No. 4, (Jakarta: CSIS, April 1981), hlm. 320-322.

<sup>86</sup> Poltak Partogi Nainggolan, *loc.cit.*

<sup>87</sup> Erhard Louven, "RRC dan Masyarakat Eropa: Hubungan Politik dan Ekonomi", (*terj.*), *Analisa*, Tahun XII No. 12, (Jakarta: CSIS, Desember 1983), hlm. 1123-1124.

5.	Singapura (pengusaha)	Hotel, minyak bumi, penyulingan minyak, jasa penerbangan, perkapalan.	±450 Juta
6.	Belanda	Proyek Shenzhen.	
7.	Hongkong	Proyek Shenzhen.	
8.	Malaysia (Hong Leon Group)	Industri Perhotelan.	±48 Juta
9.	Perancis	Proyek Shenzhen.	
10.	Taiwan (Pengusaha)	-	±1,3 Miliar

Sumber: Ibid., hlm. 152-159.

Sektor yang banyak memperoleh penanaman modal asing meliputi kilang minyak, industri perhotelan, penerbangan, alat transportasi serta proyek-proyek Shenzhen. Lebih dari 27 perusahaan minyak asing melakukan kerjasama dalam eksplorasi dan eksploitasi minyak bumi dan gas alam di RRC, seperti Jepang, Spanyol dan Singapura. Industri perhotelan dan penerbangan juga menjadi salah satu sektor yang banyak diminati seperti kerjasama yang dilakukan oleh AS, Singapura dan Malaysia di RRC. Industri lain yang memperoleh penanaman modal asing yang cukup potensial adalah proyek yang berada di wilayah SEZ Shenzhen. Sampai akhir 1983 RRC telah menjalin hubungan dagang dengan 190 negara dan kawasan, serta menandatangani persetujuan dagang dengan 95 negara dan organisasi Masyarakat Ekonomi Eropa.<sup>88</sup> Keterbukaan dengan menerima modal asing yang ditanamkan di RRC dalam berbagai sektor merupakan salah satu faktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi RRC.

Dukungan lain dalam rangka pengadaan modal bagi perekonomian RRC diperoleh dari para Cina perantauan yang ada di negara lain. Bantuan yang diberikan oleh Cina perantauan berupa devisa dan penanaman modal cukup membantu perolehan modal bagi jalannya modernisasi negara. Peranan penting lainnya diperoleh dari peran swasta dan pasar. Menurut Deng perlunya mendorong pengembangan pertanian swasta atau kepemilikan pribadi, perdagangan swasta, kompetisi upah berdasarkan produksi dan desentralisasi ekonomi dapat meningkatkan hasil maksimal bagi pembangunan yang dilaksanakan.

<sup>88</sup> Poltak Partogi Nainggolan, *op.cit.*, hlm. 160.

Kendala terbesar selain modal adalah sistem birokrasi yang mengatur perekonomian negara. Hal ini ditandai dengan manajemen ekonomi dengan banyaknya pegawai dan bahkan tidak sesuai dengan keahliannya, tumpang tindihnya organisasi, prosedur yang rumit dan lama serta tingkat efisiensi yang rendah.<sup>89</sup> Kebijakan-kebijakan tersebut membuktikan bahwasanya pemerintahan Deng dalam rangka pembangunan sosialis RRC menekankan peranan swasta dan pasar serta bantuan asing untuk meningkatkan perekonomian negara. Selain pinjaman dari pihak asing seperti Jepang, beberapa negara tersebut juga melakukan investasi di RRC. Kerjasama Jepang dengan RRC dalam pendirian kilang minyak di perusahaan Tienjin, Jepang memiliki saham sebesar 40% dan saham pemerintah RRC sebesar 60%. AS tidak terlalu banyak menanamkan modalnya di RRC pada masa pembangunan ekonomi RRC selain dalam bidang penerbangan. Gambaran kerjasama tersebut membuktikan bahwa sebuah negara membutuhkan peranan asing terutama mengenai pembangunan ekonomi suatu negara. Di sisi lain partai juga harus mengembangkan kebijaksanaan untuk memecahkan persoalan-persoalan baru dan strategi tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip komunis.

Kebijakan dalam partai selama kepemimpinan Deng Xiaoping banyak ditujukan pada pembenahan struktural partai yang meliputi peremajaan kader, dan menambah beberapa badan atau departemen dalam partai yang berfungsi menjaga dan mendukung keberlangsungan partai. Seperti Kongres Partai ke-12 pada 1-11 September 1982 yang menghasilkan dibentuknya Komite Penasehat Pusat untuk memberikan bantuan dan nasehat politik untuk Komite Sentral partai. Pada dasarnya Komite Penasehat Nasional dipilih dari kader senior partai tertinggi dan secara tidak resmi terlihat lebih berkuasa daripada badan tersebut.<sup>90</sup> Selain itu dibentuk pula Komite Investigasi Disiplin Pusat yang merupakan lembaga pengawasan internal tertinggi dalam partai, yang bertugas untuk menguatkan kaidah dan peraturan internal serta memberantas korupsi dan pelanggaran karena

---

<sup>89</sup> *Ibid.*, hlm. 100-103.

<sup>90</sup> [https://en.wikipedia.org/wiki/Central\\_Advisory\\_Commission](https://en.wikipedia.org/wiki/Central_Advisory_Commission), diunduh pada 1 November 2015.

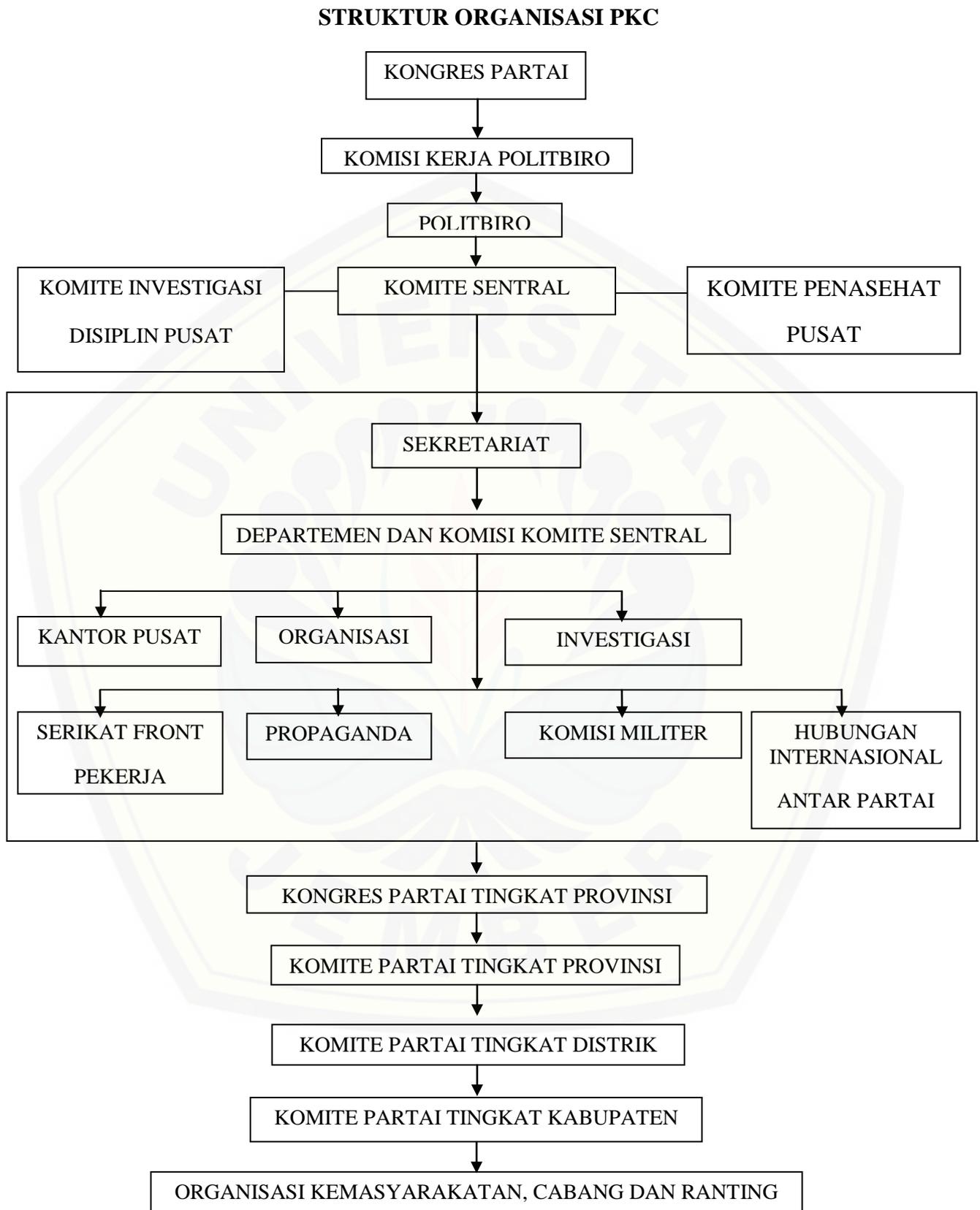
jabatan dalam partai.<sup>91</sup> Dua lembaga tersebut dibentuk sebagai bentuk upaya kepemimpinan Deng dalam partai untuk menguatkan internal partai, terutama selama pelaksanaan Reformasi Ekonomi. Kebijakan tersebut dibentuk sebagai bentuk proteksi internal terhadap ancaman dari luar salah satunya perkembangan liberalisme di RRC.

### **3.3.1.2 Dominasi Pengaruh dalam Internal PKC**

Kepemimpinan dalam partai menentukan keberadaan seseorang dalam organisasi dan hal ini juga digambarkan oleh PKC. Keberadaan kader-kader partai serta pejabat tinggi partai dalam menjalankan masing-masing wewenang dan tugasnya menjadi pedoman tersendiri atas sukses tidak karir politiknya. PKC merupakan partai tunggal yang ada di RRC serta organisasi yang terstruktur. Partai memiliki otoritas tertinggi dalam urusan pengambilan keputusan serta menentukan arah dan kebijakan yang berhubungan dengan keberlangsungan RRC. Keberadaan struktur organisasi menjamin keberlangsungan partai dalam menjalankan tugas dan wewenang sebagai pemegang otoritas tertinggi RRC. Kondisi tersebut didukung oleh keberadaan para pejabat partai yang juga memiliki posisi maupun jabatan tertentu di pemerintahan, sebagai salah satu bagian dari sistem negara sosialis yang menjadikan negara dan partai sebagai kesatuan. Ketika Reformasi Ekonomi mulai dilaksanakan, Deng selaku pimpinan juga dibantu oleh pejabat partai dan pemerintahan secara terstruktur. Adapun struktur organisasi PKC sebagai berikut:

---

<sup>91</sup> *Ibid.*



Gambar 3.10

Sumber: Jurgen Domes, *op.cit*, hlm. 70.

Anggota-anggota Politbiro PKC dari Komite Sentral ke-12 yang terpilih pada 1982 dan 1985 di antaranya Deng Xiaoping, Zhao Ziyang, Li Xiannian, Chen Yun, Hu Yaobang, Peng Zhen, Yang Shangkun, Li Peng dan ada beberapa anggota terpilih lainnya yang juga berasal dari dua faksi koalisi Deng.<sup>92</sup> Dengan Hu Yaobang, Ye Jianying, Deng Xiaoping, Zhao Ziyang, Li Xiannian, dan Chen Yun sebagai Komisi Kerja Politbiro yang terpilih pada Kongres PKC ke-12 pada 1-11 September 1982. Pada saat yang sama Deng menjabat sebagai ketua Komisi Penasehat Pusat dan kepala Komisi Militer. Zhao Ziyang dan Li Peng menjabat sebagai Perdana Menteri serta Hu Yaobang sebagai Sekjen partai yang terpilih pada 1982.<sup>93</sup> Pada Kongres ke-11 yang berlangsung selama 12-18 Agustus 1977, Komisi Kerja Politbiro diisi oleh Hua Guofeng, Ye Jianying, Deng Xiaoping, Li Xiannian, Wang Dongxing dan Chen Yun, dengan Hua Guofeng sebagai Ketua Komite Sentral dan beberapa anggota lainnya seperti Deng dan Chen sebagai Wakil Ketua Komite Sentral. Secara garis besar Deng tidak pernah menduduki jabatan tertinggi dalam partai maupun pemerintahan, namun demikian Deng merupakan pimpinan tertinggi RRC dari 1978-1992 yang merupakan inti dari pemimpin generasi kedua yang juga lebih dikenal dengan *Eight Elders*.

Keberlangsungan Reformasi Ekonomi sangat ditentukan oleh keberadaan Deng Xiaoping dalam partai dan pemerintahan. Selama Deng berkuasa, baik dalam jabatan formal maupun non formal pelaksanaan Reformasi Ekonomi RRC tetap menjadi prioritas utama bagi para kader partai dan pejabat pemerintahan lainnya. Pecahnya koalisi Deng menjadi dua faksi yang terdiri dari kelompok reformis dan kelompok konservatif dan militer mengakibatkan adanya dominasi pengaruh dalam internal partai selama reformasi dijalankan. Meskipun Deng berdiri sebagai penengah di antara keduanya, Deng tidak memiliki pendirian yang kuat untuk berada pada posisi keduanya. Sebagai penggagas Reformasi Ekonomi tersebut memiliki otoritas yang tinggi dalam partai dan negara, Deng mampu

---

<sup>92</sup> Parris H. Chang, *Problem of Communism*, Mei-Juni 1987, hlm. 40.

<sup>93</sup> *Ibid.*

mengendalikan dominasi pengaruh yang ada dalam internal PKC selama 1980an. Otoritas yang dimilikinya tersebut membantu Deng melancarkan pelaksanaan Modernisasi RRC dengan bantuan kedua pihak kelompok dalam partai.

Dominasi pengaruh tertinggi tetap dimiliki Deng dan beberapa senior partai lainnya bahkan ketika pemimpin tersebut tidak menjabat secara resmi. Banyaknya keterlibatan kelompok reformis selama reformasi RRC dijalankan memberikan sedikit perbedaan akan keberadaannya dengan kelompok konservatif dan militer. Kelompok reformis mendukung tindakan radikal dan agresif PKC serta pemerintah RRC dalam menjalankan reformasi. Untuk mempercepat laju Reformasi Ekonomi kelompok reformis mengusulkan beberapa hal seperti perluasan wilayah SEZ's, melaksanakan ekonomi pasar dengan adanya regulasi peraturan sampai pada melakukan pembenahan struktural dalam perusahaan dan desentralisasi ekonomi serta deregulasi harga ketika terjadi penurunan kinerja perekonomian negara pada 1988. Selain itu, kelompok reformis menganjurkan adanya reformasi struktural dalam partai guna meremajakan kader-kader yang sudah tua dengan yang muda. Dalam artian struktural partai perlu diisi oleh kader-kader muda yang lebih produktif dan potensial dibandingkan dengan kader tua yang sudah lama menjabat yang hanya berpegang pada kekuasaan. Usulan tersebut justru memunculkan sikap protes dari kelompok militer yang rata-rata tidak ingin meninggalkan jabatannya dalam partai. Tindakan radikal dan agresif kelompok reformis, mampu menarik simpati Deng terutama tindakan maupun kebijakan yang berkaitan dengan pelaksanaan Reformasi Ekonomi.

Kelompok reformis diperkuat oleh keberadaan punggawa kelompok tersebut seperti Hu Yaobang dan Zhao Ziyang. Keduanya berperan aktif dalam pelaksanaan reformasi RRC selama 1980an. Setelah Hu Yaobang menjabat sebagai Sekjen PKC pada 1982 dan Zhao Ziyang diangkat sebagai PM posisinya kedua lebih kuat dibandingkan kelompok militer. Posisi penting lainnya juga diisi oleh aktor-aktor politik dari kelompok konservatif dan militer selain dari senior militer seperti Chen Yun, yakni Deng Liqun yang menjabat sebagai Ketua Departemen Propaganda PKC serta PM Li Peng. Secara garis besar, Deng berasal dari kalangan militer dan memiliki pengaruh yang cukup kuat sebagai seorang

senior. Peta politik RRC memberikan gambaran yang berbeda menjelang Peristiwa Tiananmen 1989. Hal ini karena Hu Yaobang dipecat dari jabatannya sebagai Sekjen karena dianggap lunak terhadap demonstran pada 1986 dan digantikan oleh Zhao Ziyang. Hal yang sama terjadi ketika Zhao sebagai Sekjen dibebastugaskan dari jabatannya karena dianggap lalai dalam meredam para demonstran pada peristiwa Tiananmen 1989. Posisi justru berbalik ketika Deng turun sebagai seorang yang mampu mengendalikan militer untuk meredam peristiwa tersebut melalui darurat militer. Peristiwa tersebut dianggap Deng sebagai penghambat jalannya Reformasi Ekonomi.

Deng Xiaoping memegang kendali penuh atas perpolitikan RRC selama dua periode yakni pada 1978-1992.<sup>94</sup> Keberadaannya membawa banyak pengaruh terutama dalam perekonomian negara setelah era Mao Zedong. Kemampuan Deng berkonsolidasi serta megarahkan kedua kelompok yang berbeda pendapat atau pandangan dalam PKC menjadikannya sosok yang dianggap memiliki peran penting dalam hal pengambilan keputusan dalam partai dan pemerintahan sampai pada 1992. Dominasi pengaruh dan keberadaan seseorang dalam partai dapat dilihat dari kepemimpinannya selama menjadai kader partai. Berikut pemimpin-pemimpin partai pada 1977-1987:

**Tabel 3.11**  
**Kepemimpinan PKC Pada 1977-1987**

No.	Kongres PKC Ke-11 12-18 Agustus 1977	Kongres PKC Ke-12 1-11 September 1982
1.	Panitia Kerja Politbiro: Hua Goufeng <sup>a,l</sup> Ye Jianying <sup>c</sup> Deng Xiaoping <sup>c</sup> Li Xiannian <sup>c</sup> Wang Dongxing <sup>c</sup> Chen Yun <sup>c,h</sup>	Panitian Kerja Politbiro: Hu Yaobang <sup>b</sup> Ye Jianying <sup>q</sup> Deng Xiaoping Zhao Ziyang Li Xiannian Chen Yun
2.	Anggota Penuh: Wei Gouqing Ulanfu Fang Yi Liu Bocheng	Anggota Penuh: Wan Li Xi Zhongxun Wang Zhen <sup>q</sup>

<sup>94</sup> Edward Friedman, "Review: Deng Xiaoping and The Transformation of China by Erza Vogel", *Asian Studies*, Vol. 17 No. 2, hlm. 64-65.

	Xu Shiyou Ji Dengkui <sup>k</sup> Su Zhenhua Li Desheng Wu De <sup>k</sup> Yu Qiuli Zhang Tingfa Chen Tonggui Chen Xilian <sup>k</sup> Geng Biao Nie Rongzhen Ni Zhifu Xu Xiangqian Peng Chong Deng Yingchao <sup>k</sup> Hu Yaobang <sup>h,j,l</sup> Wang Zhen <sup>h</sup> Peng Zhen <sup>i</sup>	Wei Guoqing <sup>q</sup> Ulanhu <sup>n,q</sup> Fang Yi Deng Yingchao <sup>q</sup> Li Desheng <sup>q</sup> Yang Shangkun Yang Dezhi YU Qiuli Song Renqiong <sup>q</sup> Zhang Tingfa <sup>q</sup> Hu Qiaomu Nie Rongzhen <sup>q</sup> Ni Zhifu Xu Xiangqian <sup>q</sup> Peng Zhen Liao Chengzhi <sup>r</sup> Tian Jiyun <sup>s</sup> Qiao Shi <sup>s</sup> Li Peng <sup>s</sup> Wu Xueqian <sup>s</sup> Hu Qili <sup>s</sup>
3.	Anggota Pengganti: Chen Muhua Zhao Ziyang <sup>i,j,m</sup> Saifudin	Anggota Pengganti: Yao Yilin <sup>t</sup> Qin Jiwei Chen Muhua

## Keterangan:

<sup>a</sup> Ketua Komite Sentral. Mao Zedong meninggal pada 9 September 1976, dan Hua Guofeng menjadi ketua pada 7 Oktober 1976. Hua digantikan oleh Hu Yaobang pada Sidang Pleno ke-6 Kongres Komite sentral ke-11 pada 27-29 Juni 1981.

<sup>b</sup> Sekretaris Jenderal. Kongres Komite Sentral ke-11 menghapuskan kedudukan Ketua Partai dan menggantikan jabatan Sekjen.

<sup>c</sup> Wakil Ketua Komite Sentral.

<sup>h</sup> Diangkat pada Sidang Pleno ke-3 Kongres Komite Sentral ke-11 pada 18-22 Desember 1978.

<sup>i</sup> Diangkat sebagai anggota penuh pada Sidang Pleno ke-4 Kongres Komite Sentral ke-11 pada 25-28 September 1979.

<sup>j</sup> Diangkat Sebagai anggota panitia kerja politbiro pada Sidang Pleno ke-5 Kongres Komite Sentral ke-12 pada 23-29 Februari 1980.

<sup>k</sup> Dibebastugaskan pada sidang Pleno

<sup>l</sup> Hu yaobang menggantikan Hua Guofeng pada Sidang Pleno ke-6 Kongres Komite Sentral ke-11. Hua turun jabatan menjadi wakil ketua.

<sup>m</sup> Diangkat menjadi wakil ketua pada Sidang Pleno ke-6 Kongres Komite Sentral ke-11.

<sup>n</sup> Pergantian nama berlangsung pada saat kongres.

<sup>q</sup> Mengundurkan diri pada Sidang Pleno ke-4 Kongres Komite Sentral ke-12.

<sup>r</sup> Meninggal pada 1983.

<sup>s</sup> Dipilih pada Sidang Pleno ke-5 Kongres Komite Sentral ke-12

<sup>t</sup> Diusulkan sebagai anggota penuh pada Sidang Pleno ke-5 Kongres Komite Sentral ke-12.

Sumber: Roderick MacFarquhar, *The Politics of China 1949-1989*, (New York: Cambridge University Press, 1994), hlm. 476.

### 3.3.2 Pengaruh Pergulatan Politik Internal PKC Terhadap Partai

Kondisi PKC dari generasi ke generasi mengalami banyak perubahan mulai dari penerapan ideologi sampai pada aksi atau propaganda politik. Seiring dengan pergantian kekuasaan PKC berusaha tetap mempertahankan posisinya sebagai pemegang otoritas tertinggi di RRC. Namun yang tidak kalah penting, sejak berdirinya partai tersebut, terdapat perbedaan pendapat atau pemikiran yang kemudian menimbulkan faksi-faksi dalam partai tunggal. Kondisi yang sama juga diperlihatkan pada masa 1980an seperti yang telah dipaparkan pada sub bab 3.3. Perbedaan pendapat atau pemikiran antara kedua kelompok dalam partai mengakibatkan ketidakstabilan politik dalam internal partai dan secara tidak langsung berakibat pada kestabilan nasional. Adanya Deng Xiaoping di antara kedua kelompok sebagai penengah mampu mempertahankan keberlangsungan Reformasi Ekonomi yang diprakarsainya. Selama reformasi RRC berlangsung, kedua kelompok tersebut juga terus melancarkan pendapatnya masing-masing yang berhubungan dengan reformasi sesuai dengan kepentingan dan pemikiran kelompoknya.

Keradikalan kelompok reformis berdampak pada otoritas dan ideologi partai yang mulai dipertanyakan oleh kelompok konservatif dan militer. Kelompok reformis yang memberikan toleransi terhadap paham alternatif lain selain Marxisme, memberi dukungan terhadap pengembangan reformasi tanpa adanya batasan ideologi. Sebaliknya, kelompok lawan justru menentang hal tersebut dengan anggapan pengembangan reformasi telah menjurus pada berkembangnya paham Liberalisme Borjuis. Hal tersebut menimbulkan kekhawatiran kelompok konservatif. Berkembangnya paham liberal akan mengubah ajaran ideologi murni partai. Dampak lainnya yang terjadi meliputi

perubahan kebijakan, seperti kebijakan ekonomi dan administrasi yang menginginkan pemisahan dalam pengambilan keputusan. Menurunnya kontrol dan keberadaan partai dalam beberapa hal juga berakibat tidak langsung terhadap terjadinya demonstrasi pelajar dan mahasiswa pada 1986 akibat adanya inflasi, korupsi serta tuntutan untuk menyelenggarakan pemilu yang demokratis.<sup>95</sup> Tidak semua perubahan dapat dipaksakan terjadi pada RRC, seperti Uni Soviet yang mampu menyelenggarakan pemilu yang demokratis di bawah panji komunisme.

Kestabilan politik RRC menjelang 1989 berada pada posisi yang riskan, yakni PKC sebagai pemegang kontrol kekuasaan mulai dipertanyakan otoritasnya. Reformasi Ekonomi yang juga merupakan bagian dari gelombang perseteruan kedua kelompok juga berdampak langsung terhadap keutuhan dan otoritas partai. Kekuatan politik RRC yang semula berasal dari PKC dan TPR, menjelang akhir 1980an masyarakat dan mahasiswa menunjukkan persentase baru bahwa golongan tersebut menduduki fase baru sebagai kekuatan politik lain yang muncul dalam sebuah krisis. Munculnya gelombang gerakan prodemokrasi serta dukungan terhadap kemunculan liberalisme menjadi babak baru yang perlu dihadapi oleh perpolitikan PKC. Di sisi lain, kemunculan gerakan prodemokrasi hanya dianggap sebagai persekongkolan Barat untuk menghancurkan sosialisme Cina dan bukan lahir dari kesadaran politik RRC.<sup>96</sup> Kehidupan demokrasi tidak dapat dipaksakan dengan cepat di RRC, melihat kenyataan bahwa RRC merupakan negara dengan jumlah penduduk satu milyar lebih. Sistem demokrasi dengan multipartai gaya Barat tidak sesuai jika harus diterapkan dengan kondisi RRC dalam beberapa aspek. Pemerintahan terpusat lebih memungkinkan bagi keberlangsungan RRC

---

<sup>95</sup> Penghapusan monopoli negara serta sistem desentralisasi memberikan dampak secara tidak langsung terhadap perekonomian nasional, di samping itu ekonomi pasar di RRC belum melembaga. Kekhawatiran tersebut meliputi kenaikan harga barang-barang kebutuhan rakyat yang juga menyebabkan inflasi karena sebelumnya masyarakat lebih terbiasa dengan sistem tersentralisasi. Sedangkan kebijakan pintu terbuka yang juga dilaksanakan menimbulkan polusi spritual meliputi korupsi, penyelundupan bahkan penyalahgunaan kekuasaan. Untuk itu Deng memperkuat pertahanan lembaga-lembaga seperti hukum menjadi lebih disiplin dan terstruktur. Poltak Partogi Nainggolan, *op.cit.* hlm. 145.

<sup>96</sup> Umar Suryady Bakry, “Masa Depan Komunisme Cina Pasca Pembekuan PKUS”, dalam Umar Suryadi Bakri (Editor), *Pasca Deng Xiaoping: Cina Quo Vadis ?*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), hlm. 22-24.

dengan PKC sebagai pusat kontrol dan kekuasaan negara. Untuk itu reformasi yang terjadi di RRC akhir 1980an perlu dilaksanakan secara perlahan dan pasti.

Tidak semua akibat yang ditimbulkan oleh persetujuan dua kelompok dalam PKC memberikan dampak buruk terhadap negara. Di sisi lain, dengan terus dilaksanakannya Reformasi Ekonomi melalui pengembangan-pengembangan yang diusulkan oleh kedua belah kelompok, Deng sebagai penengah dan pemimpin yang berkuasa mampu memberikan otoritasnya dengan baik, dalam rangka melancarkan dan mencapai keberhasilan Reformasi Ekonomi untuk memperbaiki perekonomian negara. Sebagai senior partai Deng tidak memberikan toleransi terhadap orang-orang yang membahayakan kondisi partai. Bagi Deng pelaksanaan dan keberhasilan Reformasi Ekonomi adalah sebuah kemutlakan yang perlu dicapai, namun keberadaan partai sebagai kontrol juga harus tetap ditegakkan. Hal ini yang menggambarkan posisi Deng di antara kedua kelompok dalam partai. Kemampuannya mengendalikan partai dan militer memberikan sumbangsih besar terhadap kestabilan pelaksanaan Reformasi Ekonomi. Pembersihan terhadap kelompok konservatif yang bersifat hati-hati terhadap Reformasi Ekonomi, serta mengendalikan militer di bawah perintahnya dalam menyelesaikan Peristiwa Tiananmen 1989 merupakan salah satu bukti dari kuatnya posisi Deng. Pimpinan militer tersebut mendedikasikan keberadaannya bagi keberlangsungan partai serta perekonomian yang perlu dicapai RRC.

Kemajuan ekonomi serta pencapaian RRC dalam satu dasawarsa sepeninggal Mao Zedong menunjukkan kondisi baru yang lebih fleksibel. Reformasi yang dilangsungkan berdasarkan kebutuhan akan perbaikan perekonomian negara membuka peluang baru bagi keterlibatan negara Barat. Kemajuan ekonomi yang gemilang pernah dicapai RRC dengan memperoleh laju pertumbuhan terbesar setelah Perang Dunia Kedua.<sup>97</sup> Sebaliknya perkembangan tersebut mengalami kekacauan dan kemacetan selama Peristiwa Tiananmen 1989. Secara garis besar, kehadiran berbagai golongan atau kelompok dalam partai merupakan bagian kecil yang perlu menjadikan PKC untuk tetap menjaga eksistensinya. Munculnya alternatif dan kekuatan lain dalam perpolitikan RRC

---

<sup>97</sup> *Kompas* 1 Maret 1989, *loc.cit.*

dalam rangka menemukan sistem politik yang lebih cocok bagi negara akan selalu melibatkan keberadaan PKC di dalamnya. Hal ini membuktikan bahwa keutuhan RRC diperlihatkan oleh kekuatan politik yang dimiliki PKC yang terorganisir dengan baik oleh pemimpin serta golongan di dalamnya. Langkah-langkah politik maupun kebijakan yang ditempuh oleh Deng Xiaoping dalam rangka mendamaikan kedua kelompok tersebut yakni reformasi struktural dan peremajaan kader, menempatkan beberapa tokoh penting kedua kelompok dalam pimpinan partai seperti Zhao Ziyang yang ditunjuk sebagai sekjen pada 1987 menggantikan Hu Yaobang dan Li Peng yang menjabat sebagai PM pada Kongres PKC ke 13.<sup>98</sup> Penempatan jabatan dalam partai merupakan salah satu langkah politik Deng mendamaikan kedua kelompok. Deng mampu bertindak tegas terutama mengenai hal-hal yang menghambat jalannya reformasi. Salah satu tindakannya adalah memecat kader partai dari kedua kelompok tersebut seperti Deng Liqun yang dipecat dari Departemen Propaganda PKC karena kritiknya terhadap kebijakan politik pintu terbuka, serta Hu Yaobang dan Zhao Ziyang yang diturunkan dari jabatan sekjen ketika mendukung demonstrasi mahasiswa di Tiananmen.<sup>99</sup>

### **3.4 Pengaruh Kebijakan Ekonomi Sosialis Era Deng Xiaoping**

Reformasi Ekonomi era Deng Xiaoping pada akhir 1970an merupakan sebuah gelombang baru bagi lahirnya reformasi di RRC. Kebijakan-kebijakan yang ditetapkan mulai dari politik pintu terbuka sampai mekanisme ekonomi pasar yang diberlakukan, membuka peluang negara mengalami kemajuan ekonomi yang gemilang. Pencapaian-pencapaian yang diperoleh negara selama dasarwarsa pertama dibukanya RRC kembali terhadap negara luar memicu perubahan-perubahan lain. Seperti kekhawatiran akan polusi spritual yang meliputi korupsi dan penyalahgunaan wewenang, hingga kericuhan yang disebabkan Peristiwa Tiananmen 1989.

---

<sup>98</sup> Jurge Domes, *loc.cit.*

<sup>99</sup> *Ibid.*

Kebijakan ekonomi sosialis yang diterapkan Deng Xiaoping menggunakan mekanisme ekonomi pasar merupakan bagian dari strateginya menyilangkan antara sosialisme dengan kapitalisme. Sosialisme bagi Deng bukan sosialisme yang berdiri di atas negara yang masih memperjuangkan kondisi perekonomiannya, namun lebih kepada kesiapan ekonomi yang sudah dicapai untuk mewujudkan masyarakat sosialis sesungguhnya. Dampak yang diakibatkan oleh kebijakan ekonomi Deng Xiaoping selama Reformasi Ekonomi dapat dirangkum dalam beberapa bagian sebagai berikut:

1. Mengganti model pembangunan lama dengan sistem pembangunan baru yang lebih efektif.
2. Pemberlakuan politik pintu terbuka dan mekanisme ekonomi pasar.
3. Melemahnya stabilitas politik internal PKC.
4. Munculnya pandangan baru mengenai liberalisme yang lebih luas seperti gerakan prodemokrasi, aksi siswa dan mahasiswa, kontra terhadap pemerintah pusat dan lain sebagainya.
5. Pecahnya Peristiwa Tiananmen 1989.

Model pembangunan lama RRC yang banyak mengatasnamakan ideologi mulai digantikan dengan sistem pembangunan baru yang menggunakan cara-cara kapitalistik. Pembaruan dilakukan dalam berbagai hal, salah satunya dengan meniadakan organ-organ negara yang kurang efektif seperti Komune Rakyat yang merupakan pusat pengaturan kolektivisasi terbesar yang pernah dimiliki RRC. Komune Rakyat sebagai lembaga administratif yang mengatur fungsi pemerintahan lokal digantikan dengan Pemerintah Administratif setempat yang dianggap lebih efektif terutama dalam mengelola produksi nasional.

Upaya sentralisasi yang selalu dilakukan partai dalam mengatur hal-hal yang berhubungan dengan urusan administratif dan lainnya, pasca reformasi dilaksanakan. Upaya tersebut mulai disandingkan dengan program desentralisasi yang mampu memicu kreatifitas wilayah-wilayah di RRC. Penerapan kebijakan desentralisasi yang dimulai pada 1980an dilakukan untuk meningkatkan kinerja lokal dan memperkenalkan potensi daerah terutama wilayah pantai selatan seperti

provinsi Guangdong.<sup>100</sup> Memberikan otoritas pada daerah dalam melakukan eksperimen dan mampu mengendalikan intervensi dari pusat. Selain itu kebijakan ini ditujukan untuk menarik minat asing menginvestasikan modal di daerah-daerah otonom tersebut dan menjadi tempat berkembangnya ekonomi pasar RRC. Kebijakan lain seperti monopoli negara juga dihapuskan, sistem yang sebelumnya memberikan wewenang pada negara dalam menentukan harga kemudian diganti dengan sistem mekanisme pasar. Hal tersebut dilakukan dalam rangka memacu kreatifitas serta daya saing masyarakat dalam meningkatkan produksi serta kualitas tinggi atas barang yang dihasilkan terutama dalam bidang pertanian. Selain itu juga diberlakukan liberalisasi usaha dan manajemen, dimana kepemilikan individu serta peran usaha ditingkatkan guna membantu meningkatkan perekonomian negara. Sistem perekonomian yang mulanya terpusat, lambat laun mulai menganut asas liberal, namun tidak semua sistem diberlakukan tanpa pengawasan. Sistem tanggungjawab diberlakukan dan terdapat badan-badan hukum yang memiliki hak dan tanggungjawab khusus atas badan usaha yang dijalankan.

Politik pintu terbuka serta mekanisme ekonomi pasar merupakan serangkaian dalam rangka membangun perekonomian negara yang lebih fleksibel. Upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan pengadaan modal dilakukan melalui investasi asing. Untuk itu dibuka wilayah ekonomi khusus yang dikenal dengan SEZ's sebagai wilayah bagi pihak asing menanamkan investasinya di RRC. Sejak keterbukaannya terhadap negara-negara luar, RRC tercatat tergabung dalam organisasi-organisasi perdagangan dan perekonomian dunia seperti World Trade Organization (WTO) serta International Monetary Federation (IMF). Tercatat setelah bergabungnya RRC dengan IMF, pemerintah telah memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh organisasi internasional tersebut

---

<sup>100</sup> Hongbin Chai dan Daniel Triesman, "Did government Decentralization Cause China's Economic Miracle?", *World Politics* Januari 2007 dalam [http://www.sscnet.ucla.edu/polisci/faculty/treisman/Papers/did\\_government.pdf](http://www.sscnet.ucla.edu/polisci/faculty/treisman/Papers/did_government.pdf), diunduh pada 23 Agustus 2015.

dan telah memperoleh pinjaman sebesar US\$ 1.1 Milyar.<sup>101</sup> Selain itu tidak kurang dari 27 perusahaan minyak asing mulai bergabung dan menjalin kerjasama modal dalam eksplorasi dan eksploitasi minyak bumi dan gas alam di RRC. Perusahaan asing lainnya bergabung dalam area yang berbeda misalnya pabrik yang memproduksi alat transportasi dan bahkan dalam bidang produksi pertanian. Dari serangkaian kerjasama yang dilakukan oleh RRC dengan pihak asing mampu meningkatkan produksi nasional serta nilai ekspor RRC yang berkembang pesat sehingga mendesak komoditas yang dihasilkan negara-negara maju. Hal itu terbukti setelah pernyataan yang disampaikan oleh asosiasi pedagang Taiwan pada Maret 1985 yang mengakui bahwa RRC mulai menyaingi komoditas Taiwan dan mengancam peluang eksportnya.<sup>102</sup> Perkembangan lain membuktikan bahwa komoditas ekspor RRC telah memenuhi permintaan pasar Hongkong serta negara lain seperti Inggris, Irlandia, Perancis, dan Amerika Serikat.<sup>103</sup>

Pencapaian yang diperoleh oleh pemerintahan RRC tersebut pada 1988 justru menimbulkan fase baru dengan adanya inflasi tinggi, pertumbuhan sektor industri yang terlalu cepat serta kekurangan produksi pangan bagi masyarakatnya.<sup>104</sup> Hal tersebut karena ketidakmampuan pemerintah menyesuaikan diri dengan perkembangan baru tersebut. Ketidakmampuan tersebut bukan saja kekurangiapan menghadapi gelombang baru, namun kondisi internal partai yang juga menimbulkan perbedaan pendapat antar kelompok juga menjadi salah satu penyebab macetnya pelaksanaan Reformasi Ekonomi. Pelaksanaan Reformasi RRC yang juga berujung pada reformasi politik justru menimbulkan krisis ekonomi serta pemberontakan baru yang menimbulkan tercetusnya Peristiwa Tiananmen 1989. Munculnya aksi pemberontakan oleh para demonstran di Lapangan Tiananmen mencapai puncaknya pada kematian Hu Yaobang, mantan Sekjen PKC, pada April 1989 dan berlanjut hingga Mei dengan

---

<sup>101</sup> Erhard Louven, *loc.cit.*

<sup>102</sup> Poltak Partogi Nainggolan, *op.cit.*, hlm. 162.

<sup>103</sup> *Ibid.*

<sup>104</sup> *Kompas*, 1 Maret 1989, *loc.cit*

tuntutan pemerintah harus melakukan pembaruan politik.<sup>105</sup> Mahasiswa yang berawal dari beberapa universitas seperti Universitas Beijing, Nankai, Tianjin, dan Shanghai mengusung potret Hu Yaobang sebagai seorang reformis yang diturunkan jabatannya pada 1987 karena keradikalannya. Aksi demonstrasi mahasiswa tersebut dianggap sebagai sebuah pemberontakan pada partai bagi para petinggi partai seperti Deng Xiaoping. Hal ini menjadikan Deng turun tangan dengan memberlakukan darurat militer untuk mengatasi pemberontakan yang dilakukan mahasiswa pada partai. Pemberontakan tersebut dianggap Deng sebagai penghambat jalannya Reformasi Ekonomi dan menyebabkan krisis ekonomi RRC.

Seperti yang diungkapkan PM Li Peng bahwa RRC menghadapi krisis ekonomi sebagai akibat dari sentralisasi yang terlalu ketat dan reformasi politik yang berlebihan.<sup>106</sup> Untuk itu perlu diberlakukan kebijakan yang lebih luwes dan penghentian terhadap reformasi politik. Melihat dari kongres-kongres sebelumnya yang banyak menyerukan langkah demokrasi dan usaha-usaha yang berani untuk membebaskan ekonomi RRC dari perencanaan pusat yang kaku, maka perlu diadakan konsolidasi kebijakan ekonomi dan politik menurut PM Li.<sup>107</sup> Seperti yang diungkapkan PM Li sebelumnya, bahwa sentralisasi dan kontrol yang berlebihan kurang baik bagi perkembangan ekonomi RRC, begitu juga dengan pembaruan yang terlalu cepat yang justru menyebabkan RRC mengalami inflasi tinggi yang mencapai 36% pada 1989. Untuk itu PM Li menegaskan bahwa:

“Pengalaman berulang kali membuktikan bahwa tanpa sentralisasi dan persatuan, tanpa organisasi dan disiplin yang ketat, benar-benar mustahil mengatur kembali perekonomian dan mengatasi kesulitan-kesulitannya. Namun kita tidak akan kembali pada model perekonomian lama yang sifatnya sentralisasi dengan kontrol yang berlebihan. Kita juga tidak akan kembali ke sistem pemilikan pribadi yang mengabaikan sistem sosialis.”<sup>108</sup>

Untuk itu RRC membangun pusat ekonomi dan politik baru bagi yang kokoh dengan mempertahankan eksistensi PKC sebagai pemegang otoritas

---

<sup>105</sup> “Mahasiswa Cina Unjuk Rasa Tuntut Pembaruan Politik”, dalam *Kompas* 20 April 1989, hlm.1.

<sup>106</sup> “Reformasi Politik di RRC Timbulkan Krisis Ekonomi”, dalam *Kompas* 22 Maret 1989, hlm. VII.

<sup>107</sup> *Ibid.*

<sup>108</sup> *Ibid.*

tertinggi. Segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan Reformasi Ekonomi menjadi tanggungjawab bersama yang dikomandoi oleh Deng sebagai senior tertinggi yang berkuasa. Keberhasilannya meredam Peristiwa Tiananmen 1989 dengan menggunakan kekuatan militer juga merupakan salah satu bentuk tanggung jawabnya untuk mengawal Reformasi Ekonomi sampai tuntas. Secara garis besar dampak akan reformasi yang dilakukan di RRC pada 1980an, memberikan pandangan baru bagi masyarakat RRC dalam menghadapi dan menerima perubahan-perubahan dalam Reformasi Ekonomi. Hampir semua aspek kehidupan masyarakat tersentuh oleh dampak reformasi, bukan hanya persoalan ekonomi maupun politik tetapi juga berpengaruh terhadap kondisi pendidikan, sosial masyarakat dan aspek lainnya. Mulai dari berkembangnya pendidikan modern yang banyak berafiliasi dengan negara-negara lain sampai pada migrasi yang dilakukan masyarakat RRC ke daerah-daerah industri bahkan ke luar negara. Kondisi wilayah yang potensial dalam wilayah SEZ's melalui kebijakan politik pintu terbuka menjadikan RRC sebagai lahan investasi yang ramai dan menguntungkan. Bahkan disertai dengan ketentuan pihak asing menyediakan investasi, peralatan dan teknologi, sedangkan pihak RRC menyediakan lokasi usaha dan unsur tenaga kerja.<sup>109</sup> Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor tingkat migrasi meningkat terutama di wilayah industri yang merupakan kawasan SEZ's. Keberhasilan yang ditunjukkan SEZ's membawa Deng sebagai salah satu pemimpin yang sukses membawa modernisasi dan mengembangkan ekonomi pasar sosialis di RRC.

---

<sup>109</sup> Poltak Partogi Nainggolan, *op.cit.*, hlm 192-201.